

PERENCANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Administrasi Publik



Oleh:
Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM.6661121012

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, Januari 2018**

ABSTRAK

Mirza Hafidzati Syarofah Adlina. NIM. 6661121012. 2018. Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I: Dr. Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si dan Dosen Pembimbing II: Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si

Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten belum mencapai 5% dari total Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah. Permasalahannya adalah SKPD masih menentukan kebutuhan gender secara *top-down*, kurangnya kesepahaman tim *driver* PPRG serta belum dilakukannya proses *transfer knowledge* oleh para pegawai yang telah mengikuti Bimbingan Teknis PPRG. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan anggaran responsif gender dalam anggaran, pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Banten pada tahun 2016. Dengan menggunakan teori proses perencanaan oleh Anton Athoillah (2010) yaitu menetapkan sasaran atau perangkat tujuan; menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat; mengembangkan rencana dan menjabarkannya serta menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan model analisisnya Miles dan Huberman. Ditemukan hasil penelitian bahwa Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten hanya mencapai 2,30% dari total Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah. Beberapa kendalanya yaitu pimpinan SKPD belum memahami persoalan gender, kegiatan responsif gender belum menjadi prioritas SKPD, dan belum terpenuhinya tugas-tugas tim *driver* PPRG. Rekomendasinya adalah dengan mengkomunikasikan pentingnya anggaran responsif gender kepada pimpinan pelaksana kegiatan, koordinasi melalui pertemuan setahun tiga kali agar lebih intensif, menetapkan *reward and punishment* bagi tiap anggota tim percepatan penganggaran responsif gender, membahas tolak ukur bagi capaian anggaran responsif gender ketika pembahasan anggaran daerah.

Kata Kunci: Perencanaan, Anggaran Responsif Gender, APBD

ABSTRACT

Mirza Hafidzati Syarafah Adlina. NIM. 6661121012. 2018. Planning of Gender Responsive Budgeting on Banten Province Regional Budget Fiscal Year 2016. Departement of Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences. The 1st advisor: Dr. Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si and 2nd advisor: Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si

Gender Responsive Budgeting in Banten Province hasn't reached 5% of total Regional Budget Fiscal. The problems are unit of work/SKPD determine gender needs in top-down, lack of understanding of driver PPRG teams and not do the transfer knowledge by the staffs that follow PPRG's workshop. This study aim to describe planning of gender responsive budgeting on Banten Province regional budget fiscal year 2016. This study used Planning Process by Anton Athoillah that are set targets or device purpose; determine the circumstances, the present situation and condition; identifying supporters and restricting factors; identify supporting and inhibiting factors; developing plans and describe it, also used descriptive and qualitative approaches with Miles and Huberman analysis model. The findings showed that Gender Responsive Budgeting in Banten Province only reached 2,3%. Some of the causes are head of SKPD hasn't understanding about gender, gender responsive activities have not been a priority of SKPD, and has not fulfilled the PPRG driver team tasks. The recommendations are communicate the importance of gender responsive budgeting to executing leaders, coordinating through three times meetings in a year, assigning reward and punishment to each member of driver PPRG teams, making benchmarks for gender responsive budgeting achievement when discussing local budgets.

Keywords: Planning, Gender Responsive Budget, Regional Budget Fiscal

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina

NIM : 6661121012

Tempat Tanggal lahir : Serang, 23 Januari 1994

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PERENCANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar keserjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 15 Januari 2018



Mirza Hafidzati Syarofah Adlina

LEMBAR PERSETUJUAN

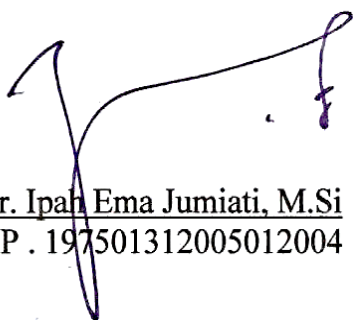
Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012
Judul Skripsi : **PERENCANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016**

Serang, 15 Januari 2018

Skripsi Ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I



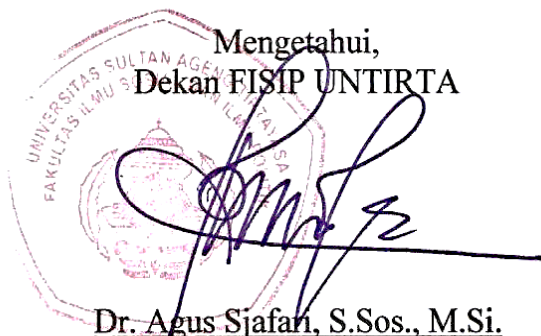
Dr. Ipah Ema Jumiati, M.Si
NIP . 197501312005012004

Pembimbing II



Yeni Widyastuti, M.Si
NIP . 197602102005012003

Mengetahui,
Dekan FISIP UNTIRTA



Dr. Agus Sjafar, S.Sos., M.Si.
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MIRZA HAFIDZATI SYAROFAH ADLINA
NIM : 6661121012
Judul Skripsi : **PERENCANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016**

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 22
Januari 2018 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 22 Januari 2018

Ketua Penguji :

Dr. Arenawati, M.Si.
NIP. 197004102006042001



Anggota

Riswanda, Ph.D.
NIP. 198101122008121001

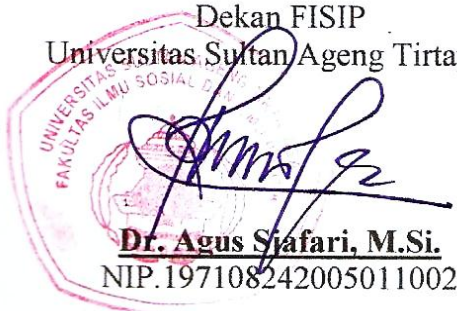


Anggota

Dr. Ipah Ema Jumiati, M.Si.
NIP. 197501312005012004

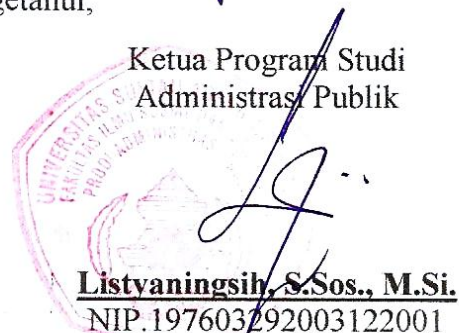
Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjaafari, M.Si.
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi
Administrasi Publik



Listyaningsih, S.Sos., M.Si.
NIP. 197603292003122001

“Barangsiapa yang mengerjakan amal sholih,
baik laki-laki maupun perempuan dalam
keadaan beriman, maka sesungguhnya akan
Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik
dan sesungguhnya akan Kami beri balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik
dari apa yang telah mereka kerjakan”

(QS. An-Nahl : 97)

Tetap Bertahan, Jangan Takut dan Mulai Saja

(Mirza)

Skripsi ini kupersembahkan untuk
Orangtuaku, Adik-adikku, & Keluarga Besarku
yang selama ini mencurahkan energi,
perhatian dan dukungan yang sangat besar
kepadaku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin atas Kehendak-Nya dan Kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016” sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian ilmu sosial serta memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada konsentrasi Manajemen Publik dalam Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam manajemen publik, perencanaan anggaran responsif gender merupakan hal penting untuk dipahami sebab melalui proses inilah titik awal dari tujuan untuk mencapai kebutuhan masyarakat yang setara dan berkeadilan sehingga diperlukan perencanaan anggaran responsif gender yang tepat dalam pengelolaannya agar anggaran yang terdapat di Provinsi Banten dapat mencapai sasaran yang tepat.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang muncul karena keterbatasan penulis. Untuk itu, demi kesempurnaan tulisan ini, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memberikan pemahaman kepada penulis untuk dapat membuat tulisan yang lebih baik lagi ke depannya. Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik kecuali dengan bantuan dari pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil demi kelancaran skripsi ini. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Ibu Rahmawati, M.Si., Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. Bapak Iman Mukhroman, M.Ikom., Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, M.Si., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6. Ibu Listyaningsih, M.Si., Ketua Program Studi Administrasi Publik
7. Ibu Dr. Arenawati, M.Si., Sekretaris Program Studi Administrasi Publik
8. Ibu Dr. Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si., Dosen Pembimbing I yang membimbing dengan penuh kesabaran dalam penelitian ini
9. Ibu Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing II yang memberikan masukan yang berarti dalam penelitian ini
10. Ibu Dr. Arenawati, S.Sos., M.Si., Pembimbing Akademik Program Studi Administrasi Publik sekaligus Ketua Penguji Sidang Skripsi Penulis. Terimakasih atas jasa ibu yang begitu besar selama ini
11. Para Dosen dan Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

12. Ibu Dra. Kuftri Eka Prasetia, M.Si., Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial Provinsi Banten
13. Ibu Dra. Evi Sofia., Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten
14. Ibu Lia Muliawati, SKM., Staf Pelaksana Bidang Sosial Kemasyarakatan Bappeda Provinsi Banten
15. Bapak M. Hamdi, S.Sos., Staf Pelaksana Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
16. Ibu Nunuk Dwi Maryati, ST., MT., Staf Pelaksana Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten
17. Bapak M. Imron., Staf Pelaksana Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satpol PP Provinsi Banten
18. Ibu Pipit Puspita, S.HI., Staf Pelaksana Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pariwisata Provinsi Banten
19. Bapak M. Ridwan Kurniawan, S.IP., Staf Pelaksana Bidang Sekretariat Umum Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten
20. Bapak Yanyan Royani., Staf Pelaksana Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
21. Ibu Sri Hartati, SH., Ketua Kaukus Parlemen Perempuan Provinsi Banten
22. Ibu Encop Sofia, M., Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Banten
23. Kak Angga Andrias, S.Pd., Spesialis Kebijakan Publik LSM Pattiro Provinsi Banten

24. Orangtuaku yang selalu memberikan do'a, dukungan yang bersifat moril maupun materil. *Alhamdulillah Jaza Kumullahu Khoiron*, kepercayaan dan curahan kasihmu begitu berarti dalam penyelesaian tulisan ini.
25. Kedua Adikku yang rela meluangkan waktunya untuk sekedar bertanya dan menyemangati, *Alhamdulillah Jaza Kumullahu Khoiron* atas semangat dari kalian.
26. Keluarga Besar Soewandi yang meluangkan perhatian dan saran yang membangun kepada penulis.
27. Untuk sahabat terbaikku Desy Retno Hapsari, SP., Lestari Sianturi, ST., dan Vina Noer Aliyah El-Fauzi, S.Sos., terimakasih atas keramaian dan keramahan kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
28. Teman-teman Ilmu Administrasi Negara 2012 dan kawan satu kelas Baneta 2012 yang telah membuat kenangan bersama saat masa-masa perkuliahan khususnya Nong Diana, S.Sos., Nong Heni, S.Sos., Mbak Mar, S.Sos., Mbak Peka S.AP, Sinta, S.AP, Ita, S.AP, Yandi, S.Sos, Santi, S.AP, Dina, S.AP.
29. Ibu Masita, M. Kes., terimakasih telah mengenalkan dunia gender dengan penulis
30. Bapak Arif, Bapak Kasubbag PEP BPMD Provinsi Banten sebagai partner *sharing* segala hal tentang anggaran responsif gender di Provinsi Banten
31. Bapak Jettyako, Bapak Henri dan Teh Tari yang bersedia membantu menyediakan data-data yang dibutuhkan penulis

32. *Mubaligh* dan *mubalighot* serta teman-teman yang bening hatinya yang memberikan nasehat-nasehat positif supaya melakukan yang terbaik dan selalu tawakal.
33. Keluarga KKM kelompok 47 Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu untuk waktu sebulan yang penuh pembelajaran.
34. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doanya kepada peneliti selama ini.

Penulis berharap semoga tulisan dari skripsi ini dapat berfaedah sebagaimana mestinya dan dapat membantu memperluas wawasan bagi mereka yang membutuhkan tulisan ini.

Serang, Januari 2018

Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	19
1.3 Batasan masalah	19
1.4 Rumusan masalah	19
1.5 Tujuan Penelitian	20
1.6 Manfaat Penelitian	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori	22
2.1.1 Manajemen	22
2.1.2 Perencanaan	24
2.1.2.1 Definisi Perencanaan	24

2.1.2.2 Alasan Perlunya Perencanaan	26
2.1.2.3 Jenis-jenis Perencanaan	28
2.1.2.4 Proses Perencanaan	29
2.1.3 Anggaran	34
2.1.3.1 Anggaran Sektor Publik	34
2.1.3.2 Siklus APBD	38
2.1.4 Gender	39
2.1.5 Anggaran Responsif Gender	41
2.2 Penelitian Terdahulu	46
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	51
2.4 Asumsi Dasar	52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	53
3.2 Fokus Penelitian	54
3.3 Lokasi Penelitian	54
3.4 Fenomena yang diamati	54
3.4.1 Definisi Konsep	54
3.4.2 Definisi Operasional	56
3.5 Instrumen Penelitian	57
3.6 Informan Penelitian	59
3.7 Teknik Pengumpulan Data	61
3.8 Teknik Analisis Data	63
3.8.1 Reduksi Data	63
3.8.2 Penyajian Data	64
3.8.3 Verifikasi/Penarikan Kesimpulan	64
3.9 Uji Keabsahan data	66
3.10 Jadwal Penelitian	67

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	69
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Provinsi Banten	69
4.2 Deskripsi data.....	77
4.2.1 Deskripsi Informan	78
4.2.2 Deskripsi Hasil Penelitian	79
4.2.2.1 Menetapkan Sasaran atau Perangkat Tujuan ARG Tahun 2016	80
4.2.2.2 Menentukan Keadaan, Situasi dan Kondisi ARG Tahun 2016	90
4.2.2.3 Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat ARG Tahun 2016	147
4.2.2.4 Mengembangkan Rencana dan Menjabarkannya	158
4.3 Pembahasan.....	160

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	166
5.2 Saran	167

DAFTAR PUSTAKA	xiii
-----------------------------	-------------

LAMPIRAN	xvii
-----------------------	-------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rencana Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Banten Tahun 2016	11
Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Banten Tahun 2008-2014	13
Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Gender Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2014	14
Tabel 1.4 Daftar Nama SKPD di Provinsi Banten yang Telah Mengumpulkan Dokumen Anggaran Responsif Gender SKPD Provinsi Banten Tahun 2015-2016	16
Tabel 2.1 Daur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	38
Tabel 3.1 Indikator Operasional.....	56
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara.....	58
Tabel 3.3 Informan Penelitian.....	60
Tabel 3.4 Jadwal dan Waktu Penelitian.....	68
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten dan Kota.....	71
Tabel 4.2 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen Tahun 2015.....	72
Tabel 4.3 Indeks Pembangunan Gender Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen Tahun 2015.....	74
Tabel 4.4 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen Tahun 2015.....	75
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Di Provinsi Banten Tahun 2015	76
Tabel 4.6 Kode Informan Penelitian	78
Tabel 4.7 Program dan Kegiatan Responsif Gender Tahun 2016.....	87
Tabel 4.8 Daftar Nama SKPD Provinsi Banten yang Telah Mengumpulkan Dokumen Responsif Gender Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Empat Tahap Perencanaan	32
Gambar 2.2 Skema Perencanaan Responsif Gender	45
Gambar 2.3 Skema : Integrasi Gender dalam Anggaran Kinerja	46
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir.....	51
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Istilah

Lampiran 2 *Member Check* Hasil Wawancara

Lampiran 3 Pedoman Wawancara Umum dan Transkrip Data

Lampiran 4 Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Banten

Lampiran 5 Surat Izin Mencari Data

Lampiran 6 Dokumentasi

Lampiran 7 Catatan Bimbingan

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap individu di lingkungan masyarakat pada dasarnya memiliki kesempatan dalam pembangunan dengan tidak membedakan suku, agama, ras maupun jenis kelamin, seperti yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 Huruf H ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Meski begitu, kesenjangan masih terjadi dalam proses pembangunan yang dilaksanakan seperti contohnya pemisahan peran antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pekerjaan, kedudukan politik dan tingkat pendidikan sehingga perlu adanya perhatian ke arah pembangunan gender. Adapun Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen kepada pembangunan gender telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat baik di pusat maupun di daerah.

Selain itu, di ranah Internasional Pemerintah berpartisipasi dalam pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)* yang pada tahun 2015 telah dilanjutkan menjadi *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *SDGs* atau pembangunan berkelanjutan merupakan agenda pembangunan yang difokuskan pada tiga elemen inti yang saling terkait yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi

sosial dan perlindungan lingkungan hidup melalui komponen-komponen tujuannya ialah :

- | | |
|---|--|
| (1) Pemberantasan Kemiskinan | (10) Pengurangan Kesenjangan |
| (2) Peniadaan Kelaparan | (11) Kota dan Masyarakat Berkelanjutan |
| (3) Kesehatan yang Baik | (12) Konsumsi yang Bertanggung Jawab |
| (4) Pendidikan Berkualitas | (13) Aksi Perubahan Iklim |
| (5) Kesetaraan Gender | (14) Kehidupan Bawah Laut |
| (6) Air Bersih dan Sanitasi | (15) Perdamaian dan Keadilan |
| (7) Energi Bersih dan Terjangkau | (16) Kemitraan Demi Mencapai Tujuan |
| (8) Kerja Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | |
| (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur | |

Komponen pencapaian tujuan yang menjadi perhatian dalam pembangunan gender yaitu kesetaraan gender dalam point kelima pencapaian *SDGs*. Kesetaraan Gender dimaksudkan agar laki-laki dan perempuan memiliki dan mendapatkan penghargaan yang setara sebagai manusia dalam memperoleh akses, mampu berpartisipasi, dan memiliki kontrol serta mendapatkan manfaat dari intervensi pembangunan.

Perlu diketahui bahwa gender berbeda sama sekali dengan jenis kelamin yang sering dibedakan atas perempuan dan laki-laki. Gender dapat berubah seiring berkembangnya sosial dan budaya dalam suatu masyarakat sedangkan jenis kelamin sifatnya kodrati atau menetap. Perbedaan gender tidak akan menjadi suatu permasalahan apabila tidak menimbulkan kesenjangan pada perempuan atau laki-laki. Namun kenyataannya, kesenjangan gender dalam pembangunan masih dapat dirasakan. Kesenjangan tersebut muncul dikarenakan terjadinya proses sosial dan budaya di masyarakat mengenai pembedaan peran serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

Kesenjangan tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk strategi melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dimulai pada tahun 2009 dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui :

- a. Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, nomor KEP.30/M.PPN/HK03/2009,
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), yakni PMK Nomor 119 Tahun 2009,
- c. PMK Nomor 104 Tahun 2010
- d. PMK Nomor 93 Tahun 2011
- e. PPRG di daerah dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Adapun di daerah mulai dilakukan ujicoba implementasi PPRG pada tahun 2012.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan langkah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan gender di dalam masyarakat melalui serangkaian perencanaan sehingga alokasi anggaran dalam program dan kegiatan pembangunan tersebut mampu mendukung kesetaraan gender dalam pembangunan bangsa. Pemanfaatan anggaran untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender inilah yang disebut sebagai anggaran responsif gender.

Anggaran responsif gender merupakan penerapan pengarusutamaan gender yang menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Secara umum, anggaran responsif gender bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan, serta menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan, laki-laki, anak-anak, lanjut usia dan kaum difabel secara memadai dan tepat sasaran.

Salah satu faktor penting dalam anggaran responsif gender adalah perencanaan. Tahapan perencanaan akan menjadi basis bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pengarusutamaan gender akan sangat tergantung kepada kualitas perencanaan yang dijadikan dasar pijakan. Adapun beberapa prinsip dalam anggaran responsif gender yang perlu diperhatikan antara lain:

- (1) Anggaran ini tidak bertujuan untuk membagi 50:50 bagi laki-laki dan perempuan;
- (2) Anggaran difokuskan kepada penyadaran gender dan pengarusutamaan dalam seluruh area penganggaran di semua level;
- (3) Anggaran ini mempromosikan partisipasi aktif *stakeholder* perempuan dan masyarakat lain yang kurang beruntung yang diabaikan dalam pembuatan keputusan publik;
- (4) Anggaran ini mempromosikan penggunaan sumber daya lebih efektif dalam pencapaian kesetaraan gender dan transparansi;
- (5) Memperlihatkan hubungan antara inefisiensi dan ketidaksetaraan dalam penggunaan sumber daya (Budlender, 2003).

Dengan demikian, perlunya perencanaan yang baik dalam mewujudkan anggaran yang responsif gender sehingga nantinya akan didapat manfaat yang optimal dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Selain itu, terdapat tiga kategori belanja pemerintah responsif gender (Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, 2015:38) :

- a) Anggaran khusus target gender yaitu alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender. Contohnya seperti pengembangan ruang bersalin, pembangunan trotoar untuk disabilitas.
- b) Anggaran kesetaraan gender yaitu alokasi anggaran untuk masalah kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol di semua sektor pembangunan. Contohnya seperti pelatihan keterwakilan perempuan di legislatif, bantuan kredit masyarakat, sosialisasi pemanfaatan alat KB.
- c) Anggaran pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) yaitu alokasi anggaran yang digunakan untuk penguatan prasyarat PUG dalam

kelembagaan PUG. Contohnya seperti pendataan pilah gender, bimbingan teknis fasilitator

Kebutuhan mendasar dalam anggaran responsif gender adalah permasalahan-permasalahan kesenjangan gender di masyarakat yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Kekeliruan pemahaman instansi pemerintahan dalam menanggapi penyelesaian masalah gender akan berdampak pada pembangunan secara menyeluruh. Contohnya permasalahan tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Lebak. Mengapa hal itu bisa terjadi? lalu dilakukan analisis kebutuhan. Apakah karena aksesnya yang sulit karena tidak ada jembatan misalnya, lalu dibutuhkan Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman yang bertanggung jawab, atau apakah karena tidak ada biaya untuk membeli peralatan sekolah? ada Dinas Pendidikan yang punya kewenangan pengelolaan dana pendidikan atau apakah karena sang anak dijadikan tulang punggung keluarga? Ada Badan Pemberdayaan Masyarakat yang dapat memberdayakan orangtuanya agar anaknya tidak kembali bekerja.

Hal inilah yang menjadi fokus dalam anggaran responsif gender yaitu bagaimana permasalahan anak putus sekolah bukan hanya ditanggung semata-mata oleh Dinas Pendidikan sebagai *leading sector*nya tetapi diperlukan kontribusi dari berbagai Satuan Kerja Pemerintahan Daerah sesuai peranannya. Apabila berbagai Satuan Kerja tidak dapat berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan gender seperti kasus anak putus sekolah tersebut dan hanya menyerahkan permasalahan ini hanya kepada Dinas Pendidikan maka dampaknya yaitu tingkat pendidikan menjadi rendah sehingga daerah yang bersangkutan lama

kelamaan akan terus tertinggal dan tujuan pembangunan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan tidak tercapai.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka setiap Instansi Pemerintahan diarahkan untuk menyusun program dan kegiatan responsif gender sesuai kesenjangan gender yang menjadi tanggung jawab di sektornya secara menyeluruh. Intinya gender menjadi masalah apabila salah satu pihak baik laki-laki, perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kaum difabel yang merasa dirugikan atas program dan kegiatan yang diselenggarakan selama ini sehingga tidak semua program dan kegiatan dapat dianggap responsif gender.

Adapun perencanaan anggaran responsif gender dilakukan dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki serta kaum difabel, lanjut usia dan anak-anak dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dengan ketentuan pada pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Penyusunan anggaran responsif gender dilakukan oleh perencana kebijakan, program ataupun kegiatan di setiap tahunnya saat menyusun rencana

kerja SKPD (Renja SKPD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) yang disertai dengan menyusun dokumen responsif gender dengan analisis gender menggunakan metode GAP (*Gender Analysis Pathway*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2014 yang terdiri dari 9 (sembilan) langkah yaitu :

- Langkah 1. Tujuan Kebijakan (Program, Kegiatan, *Output*)
- Langkah 2. Menyajikan Data Terpilah (Kuantitatif dan Kualitatif)
- Langkah 3. Mengenal Isu Kesenjangan Gender
- Langkah 4. Menemukan Isu Gender (Unit Organisasi/Lembaga)
- Langkah 5. Menemukan Isu Gender (Eksternal Lembaga)
- Langkah 6. Merumuskan Kembali Tujuan (Reformulasi Tujuan)
- Langkah 7. Menyusun Rencana Aksi
- Langkah 8. Pengukuran Hasil/Data dasar (*base-line data*)
- Langkah 9. Menetapkan indikator gender

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah. (2016:40)

Adapun setelah dilakukan analisis gender tersebut dilanjutkan dengan menyusun GBS (*Gender Budget Statement*). Penyusunan GBS bertujuan untuk menginformasikan bahwa biaya yang dialokasikan untuk menghasilkan *output* kegiatan telah responsif gender dan akan mengatasi permasalahan gender. Selanjutnya yaitu penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang memuat rincian kegiatan yang responsif gender yang akan dilakukan.

Salah satu daerah yang telah menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah Provinsi Banten. Daerah ini menjadi Provinsi pertama di Indonesia yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Provinsi Banten memberi tanggapan lebih cepat daripada jadwal ujicoba Perencanaan Dan

Penganggaran Responsif Gender di daerah yang dijadwalkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2012. Komitmennya tersebut menjadikan Provinsi Banten mendapatkan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE), sebuah penghargaan atas pengabdian, komitmen dan pengimplementasian strategi pengarusutamaan gender (sumber: Pergub Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Provinsi Banten).

Melihat kondisi saat ini, perencanaan anggaran responsif gender ternyata masih belum sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat diketahui dari wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Ruang Kerja Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, 10 Agustus 2016) yang menyatakan bahwa anggaran responsif gender disusun setelah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) selesai dibuat. Hal tersebut juga telah dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten bahwa memang masih ada keterlambatan dalam penyusunan dokumen responsif gender dan bahkan dokumen tersebut dibuat saat setahun setelahnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah dalam pasal 5A ayat 2 menyatakan bahwa hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA-SKPD sehingga dalam hal ini dokumen responsif gender tersebut

disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) agar program dan kegiatan yang responsif gender dapat diasistensi oleh Tim Penganggaran Daerah atau paling minimal disusun saat SKPD membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD). (Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten di ruang Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten, 28 Juni 2016).

Idealnya, proses perencanaan anggaran responsif gender dimulai dengan pegawai yang telah mendapat pelatihan PPRG berkoordinasi dengan Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan (PEP) dan Kepala SKPD masing-masing untuk membahas kesenjangan gender yang dapat diselesaikan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing SKPD, dan meminta data kepada bidang-bidang lainnya di sektor kesenjangan tersebut setelah mendapatkan data terpilah gender itu barulah secara minimalis dianalisis bagaimana aksesnya, partisipasinya, kontrolnya dan manfaatnya di dalam masyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan gender tersebut, terdapat salah satu program atau kegiatan yang ada dalam kewenangan masing-masing SKPD, dalam hal ini kegiatan apa yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah kesenjangan gender. Jika masih belum memahami cara menganalisis atau menemukenali masalah kesenjangan gender, pegawai tersebut dapat berkonsultasi dengan pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten (BPPMD

Provinsi Banten) atau Bappeda Provinsi Banten tetapi hal itu jarang dilakukan oleh para pegawai tersebut kecuali ada pemantauan dari Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan (PEP) atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten terkait. Akibatnya, SKPD tidak dapat menyertakan dokumen responsif gender yang diminta oleh BPPMD Provinsi Banten. Jadi, proses perencanaan anggaran responsif gender diawali dengan data terpilah gender yang merupakan kebutuhan masyarakat yang juga disesuaikan dengan prioritas pembangunan Provinsi Banten kemudian ditemukeni permasalahan tersebut untuk diselesaikan dengan salah satu program atau kegiatan SKPD dan bukan memilih program atau kegiatan terlebih dahulu baru kemudian menganalisis permasalahan gendernya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah dalam pasal 5A ayat 2 menyatakan bahwa hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA-SKPD tetapi faktanya dokumen responsif gender tidak diminta waktu asistensi RKA-SKPD. Dokumen anggaran responsif gender SKPD pada akhirnya dikumpulkan ke BPPMD Provinsi Banten dan diinventarisir oleh Bappeda Provinsi Banten. (Berdasarkan wawancara dengan pelaksana bagian PEP Disnakertrans Provinsi Banten di Ruang Kerja PEP, Rabu, 10 Agustus 2016).

Adapun rencana kerja pengarusutamaan gender Tahun 2016-2017 dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Rencana Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten
Tahun 2016

NO	TAHAPAN KERJA	SKPD PELAKSANA	WAKTU
1.	Asistensi Penyusunan Usulan Rancangan RENJA SKPD SKPD Mitra TA. 2017 (Draft Rancangan Renja SKPD Mitra Bidang Sosmas) a. Menyiapkan Materi Asistensi Penyusunan Usulan Rancangan RENJA SKPD SKPD Mitra TA. 2016 (Sumber RPJMD) dan Draft RKPD 2016; b. Membuat Outline paparan capaian program / kegiatan tahun 2016 untuk setiap usulan kegiatan yang sudah disinkronkan dengan sasaran program RPJMD (revisi); c. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan sinkronisasi pada mitra Sosmas sebelum pelaksanaan berlangsung; d. Membuat analisa prioritas pembangunan beserta indikatornya, kemudian dibandingkan dengan target RPJMN dan RPJMD serta hasil pembangunan yang sudah berjalan; e. Membuat analisa pembangunan gender f. Membuat kesepakatan dan tindaklanjut untuk menyempurnakan isian format dan outline setiap program dan kegiatan yang diusulkan tahun 2017; g. Membuat Notulensi Asistensi Sinkronisasi rancangan Prioritas Pembangunan Bidang Sosmas TA. 2016.	Bappeda Provinsi Banten	Maret 2016
2.	Asistensi Penyusunan Usulan Program dan Kegiatan APBD 2017 Mitra Bidang Sosmas a. Membuat format usulan Prioritas Pembangunan SKPD Mitra Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Tahun 2017 sesuai ketentuan; b. Membuat arahan pembangunan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan sesuai RPJM disertai Analisis Hasil Kegiatan tahun 2015; c. Masing capaian indikator pembangunan sesuai SKPD teknis yang sudah dihasilkan; d. Mengecek format usulan Prioritas Pembangunan SKPD Mitra Sosial dan Budaya tahun 2017 untuk setiap kegiatan yang sudah diisi oleh SKPD Mitra Sosial dan Kemasyarakatan, apakah sudah sesuai RPJMD; e. Membuat instrumen asistensi kegiatan pembangunan gender 2017; f. Membuat kesepakatan dan tindaklanjut untuk menyempurnakan isian format Renja SKPD 2017; g. Membuat Notulensi Penyusunan Usulan Program dan Kegiatan APBD 2017 Mitra Bidang Sosial dan Kemasyarakatan.	Bappeda Provinsi Banten	Maret 2016
3.	Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Tahun 2016.	Bappeda Provinsi Banten	Maret 2016
4.	Rakor Pembangunan PUG a. Mempersiapkan bahan materi dalam Pelaksanaan Rakor Pembangunan PUG; b. Mengadakan konfirmasi baik secara internal maupun eksternal; c. Menyusun jadwal acara kegiatan Rakor Pembangunan PUG; d. Menggandakan materi dan bahan kegiatan Rakor Pembangunan PUG; e. Merumuskan hasil Rakor Pembangunan PUG.	Bappeda Provinsi Banten	April 2016
5.	Inventarisasi Anggaran yang Responsif Gender a. Membuat format Inventarisasi Anggaran yang Responsif Gender; b. Inventarisasi Program dan Kegiatan SKPD Provinsi yang Responsif Gender Tahun 2016; c. Mengecek setiap kegiatan SKPD, apakah anggarannya sudah responsif gender; d. Merumuskan dan membuat Notulensi hasil Inventarisasi Anggaran yang Responsif Gender.	Bappeda Provinsi Banten	Maret 2016
6.	Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD	Bappeda Provinsi Banten	Februari - Mei 2016
7.	Menyusun Program Kerja PUG setiap tahun	Subbag Program, Evaluasi & Pelaporan Seluruh SKPD Provinsi Banten	Oktober 2015
8.	Mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender	Bidang PPAP Bappeda Provinsi Banten	Triwulan ke II 2016
9.	Membuat Pokja PUG pada masing-masing SKPD dan menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun	Sekretariat di Seluruh SKPD dan Pokja PUG Provinsi Banten	-
10.	Bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur	Seluruh SKPD / Pokja PUG Provinsi Banten	Juli 2016
11.	Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur	Pokja PUG Provinsi Banten	Juli 2016
12.	Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi	Subbag PEP di Seluruh SKPD Provinsi Banten	Triwulan I – IV Tahun 2016
13.	Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah	Tim Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Banten	Agustus 2016
14.	Memberi muatan materi gender pada bintek / Pelatihan PPRG	BPPMD Provinsi Banten	Maret 2016

(Sumber : Profil Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten Tahun 2016)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah dalam Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa “Gubernur menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG provinsi dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG provinsi”.

Selanjutnya, dalam mempercepat strategi pengarusutamaan gender di Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Provinsi Banten. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten membentuk Sekretariat Bersama Fasilitasi Pelaksanaan.

Sekretariat Bersama Fasilitasi Pelaksanaan merupakan Tim Penggerak (*lembaga driver*) yang terdiri dari Kepala Bappeda Provinsi Banten, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten (BPPMD) Provinsi Banten, Inspektur Inspektorat Provinsi Banten, Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dengan melibatkan sektor-sektor teknis yang berhubungan dengan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Sejauh ini kinerja Sekretariat Bersama Fasilitasi Pelaksanaan PPRG seluruh prosesnya masih dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Banten dan Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten (BPPMD) Provinsi Banten dikarenakan tim ini baru terbentuk tahun 2014 dan penetapan tugas masing-masing anggota baru ditetapkan tahun 2016 (Sumber : Rekapitulasi Hasil Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten, Bappeda Provinsi Banten Tahun 2016).

Saat ini hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang ada di Provinsi Banten telah melaksanakan PPRG. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
REALISASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)
PADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2008-2014

Program/Kegiatan Gender Tahun 2008-2014				
Tahun	Jumlah SKPD	Program	Kegiatan/ Tolak Ukur	Anggaran
2008	14	28	46	Rp 57.916.823.848
2009	11	23	33	Rp 54.491.967.150
2010	17	24	59	Rp 52.419.936.700
2011	37	26	48/88	Rp 81.485.927.500
2012	38	33	57/84	Rp 110.695.757.596
2013	38	33	57/84	Rp 177.568.504.746
2014	41	42	62	Rp 195.318.548.850

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa
Provinsi Banten, 2015

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan jumlah SKPD di Provinsi Banten yang melaksanakan PPRG dan jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG) juga meningkat setiap tahunnya. Meski begitu, saat ini

pencapaian pembangunan gender di Provinsi Banten Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2014

Provinsi/ Kabupaten / Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribu Rupiah)		Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	L	P	L	P	L	P	L	P	
Pandeglang	61,03	64,68	13,10	13,78	7,12	5,89	11.895	5.365	85,84
Lebak	63,95	67,71	12,05	11,70	6,38	5,28	11.968	3.739	77,86
Tangerang	66,99	70,86	11,69	11,65	8,57	7,42	16.465	10.160	91,11
Serang	61,21	64,86	12,02	12,78	7,54	5,99	13.815	9.134	91,78
Kota Tangerang	69,06	73,00	13,04	12,65	10,74	9,63	17.644	13.455	93,90
Kota Cilegon	63,92	67,67	12,11	14,55	10,29	8,36	19.026	7.157	86,75
Kota Serang	65,29	69,08	12,52	12,15	9,23	7,84	17.263	11.408	91,29
Kota Tangerang Selatan	70,06	74,04	13,70	13,24	11,61	10,60	20.017	13.834	93,13
Banten	67,24	71,11	12,29	12,32	8,76	7,60	15.870	9.651	90,99
Indonesia	68,87	72,60	12,37	12,40	8,24	7,23	14.150	8.316	90,34

Sumber: Publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan gender di kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Banten padahal Provinsi Banten telah memiliki berbagai peraturan yang mendukung tercapainya pembangunan gender di lingkungan pemerintahannya. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG juga serupa dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur tingkat pencapaian harapan hidup, tingkat

pendidikan dan pendapatan hanya saja dalam IPG lebih spesifik melihat seberapa besar kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia. Dengan demikian, IPG dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, masih terdapat pula beberapa hal yang menghambat proses perencanaan anggaran tersebut. Berikut hasil dari observasi awal, yaitu:

Pertama, Dalam menentukan kebutuhan yang responsif gender berpola *top-down* maksudnya yaitu terlebih dahulu menentukan kegiatan yang menurut perencana berkaitan dengan responsif gender dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baru kemudian mencari permasalahan yang sesuai dengan kegiatan yang responsif gender. Hal tersebut seperti dinyatakan dalam wawancara dengan informan dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten bahwa program dan kegiatannya tidak diperuntukkan dalam mengatasi kesenjangan gender tetapi karena diminta membuat analisis gender jadi disiasati agar kegiatan itu terlihat responsif gender namun tidak mengubah apa yang telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Berdasarkan wawancara dengan informan dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten pada Selasa, 09 Agustus 2016 pukul 14.49 WIB di Ruang Bidang PEP).

Jika hal ini dikaitkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Di Provinsi Banten yang menyatakan bahwa dalam penetapan kegiatan responsif gender terlebih dahulu membuat analisis gendernya sehingga dalam proses menentukan kebutuhan

masyarakat akan solusi untuk ketimpangan gender di Provinsi Banten menjadi optimal.

Kedua, Pencapaian anggaran responsif gender di Provinsi Banten pada tahun 2015 maupun tahun 2016 kurang dari 5%. Anggaran responsif gender tahun 2015 hanya mencapai 0,83% sedangkan tahun ini mencapai 2,83%. Capaian ARG mengalami kenaikan meskipun tidak dapat mencapai seperti yang tertera di dalam Perda Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang menetapkan batasan minimal anggaran responsif gender sebesar 5% dari total APBD Provinsi. Berikut tabel 1.4 menunjukkan SKPD mana saja di Provinsi Banten yang telah menyusun anggaran responsif gender :

Tabel 1.4

Daftar Nama SKPD di Provinsi Banten yang Telah Mengumpulkan Dokumen Anggaran Responsif Gender Tahun 2015 dan Tahun 2016

No.	Nama SKPD	Tahun 2015		Tahun 2016	
		ARG (Rp)	% APBD	ARG (Rp)	% APBD
1	DBMTR	50.476.278.766	0,69%	185.286.690.435	2,14%
2	BPAD	580.950.000	0,01%	42.825.000	0,00%
3	Dindik	518.620.000	0,01%	449.957.000	0,01%
4	Dispora	1.950.000	0,00%	266.657.000	0,00%
5	Satpol PP	1.492.794.000	0,02%	3.303.611.000	0,04%
6	Distamben	4.458.024.500	0,06%	777.145.000	0,01%
7	BPPMD	2.900.000.000	0,04%	2.900.000.000	0,03%
8	RSUD Malingping	61.600.000	0,00%	355.590.000	0,00%

9	Disbudpar	124.171.450	0,00%	-	0,00%
10	Dinsos	-	-	1.983.763.000	0,02%
11	Dinkes	-	-	807.865.000	0,01%
12	Distanak	-	-	72.866.000	0,00%
13	Biro Ekbang	-	-	2.100.000	0,00%
14	Disnaker-trans	-	-	1.100.000.000	0,01%
15	Bappeda	-	-	340.180.000	0,00%
16	DKP	-	-	600.000.000	0,01%
17	Badan Diklat	-	-	840.229.000	0,01%
	TOTAL	60.614.388.716	0,83%	199.129.478.435	2,30%
	Syarat ARG 5% dari APBD	5% * 7.328.220.769.427 366.411.038.471	* Rp = Rp	5% * Rp 8.656.395.495.445 = Rp 432.819.774.772	

Sumber : Data diolah penulis dari BPPMD Prov. Banten, DPPKD
Prov.Banten, Bappeda Prov. Banten, 2016

Ketiga, Pekerjaan tim percepatan penganggaran responsif gender masih dibebankan kepada Bappeda Provinsi Banten dan BPPMD Provinsi Banten. (Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten di ruang Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten, 28 Juni 2016).

Tim Sekretariat Bersama Fasilitasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ini baru terbentuk tahun 2014 (sumber: Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Provinsi Banten) serta menurut data di lapangan melalui

wawancara bahwa SKPD akan melakukan pergerakan jika BPPMD Provinsi Banten maupun Bappeda Provinsi Banten memberikan dorongan dan arahan terkait hal-hal yang responsif gender sehingga pekerjaan tim percepatan penganggaran responsif gender masih dibebankan kepada Bappeda Provinsi Banten dan BPPMD Provinsi Banten.

Keempat, Belum diprioritaskannya kegiatan responsif gender oleh masing-masing SKPD. Hanya 17 SKPD dari 42 SKPD (38 % dari jumlah keseluruhan SKPD) di Provinsi Banten yang telah mengumpulkan dokumen responsif gender hasil analisis di masing-masing SKPD. Para pegawai SKPD yang telah mengikuti proses Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG bertanggungjawab melaporkan hasil pelatihannya kepada pimpinan di SKPD masing-masing peserta yang telah dilatih. Melaporkan hasil pelatihan ini bertujuan agar proses perencanaan anggaran responsif gender dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing SKPD. Berdasarkan wawancara dengan pegawai di Satpol PP Provinsi Banten menyatakan bahwa proses penyampaian informasi hasil pelatihan kepada pimpinan sudah menjadi kebiasaan setiap selesai pelatihan atau pun sosialisasi selain gender tetapi dukungan yang diberikan belum sampai tahap pengakomodiran usulan. (Berdasarkan wawancara dengan informan Satpol PP Provinsi Banten pada Rabu, 21 Juni 2016 pukul 12.25 WIB di Ruang Bidang Pemadam Kebakaran)

Dengan demikian berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perencanaan anggaran responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2016.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan proses pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Menentukan kebutuhan akan ketimpangan gender secara *top-down*.
2. Pencapaian anggaran responsif gender di Provinsi Banten pada tahun 2015 maupun tahun 2016 kurang dari 5%.
3. Pekerjaan tim *driver* percepatan penganggaran responsif gender masih dibebankan kepada Bappeda Provinsi Banten dan BPPMD Provinsi Banten.
4. Belum diprioritaskannya kegiatan responsif gender oleh masing-masing SKPD.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi tentang perencanaan anggaran responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2016.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah maka perumusan masalah ini yaitu bagaimana perencanaan anggaran responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berhubungan dengan perumusan masalah yakni untuk mengetahui bagaimanaperencanaan anggaran responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2016.

1.6 Manfaat Penelitian

Selanjutnya manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam penelitian dan pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai perencanaan anggaran responsif gender.

b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat membantu beberapa pihak yaitu bagi dinas yang bersangkutan, hasil penelitian ini merupakan salah satu bahan masukan dan saran yang membangun bagi perbaikan perencanaan anggaran responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Banten.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan mengenai perencanaan anggaran responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten sehingga masyarakat benar-benar dapat memberikan aspirasinya dan dapat diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Bagi Penulis, penelitian ini merupakan sarana peningkatan kemampuan ilmiah penulis dari teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan.

Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Deskripsi teori adalah suatu rangkaian penjelasan yang mengungkapkan suatu fenomena atau realitas tertentu yang dirangkum menjadi suatu konsep gagasan, pandangan, sikap dan atau cara-cara yang pada dasarnya menguraikan nilai-nilai serta maksud dan tujuan tertentu yang teraktualisasi dalam proses hubungan situasional, hubungan kondisional, atau hubungan fungsional di antara hal-hal yang terekam dari fenomena atau realitas tertentu.

Dalam suatu penelitian, teori menjadi hal yang penting untuk digunakan sebagai alat analisis atas suatu permasalahan yang muncul. Dengan mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan maka konsep penelitian menjadi jelas sehingga dapat menjadi pedoman pertanyaan yang rinci untuk penelitian secara mendalam.

2.1.1 Manajemen

Manajemen memiliki banyak pengertian, tergantung bagaimana kita memandangnya. Menurut Daft (2002:8) menyatakan manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasi.

Penjelasan tersebut mengemukakan bahwa dalam manajemen terdapat suatu cara yang khas untuk melaksanakan aktivitas yang saling berkaitan dan dilakukan oleh beberapa pihak dalam suatu kelompok sehingga mencapai suatu target yang telah ditetapkan. Maka dari itu, manajemen selain sebagai ilmu juga sebagai seni karena tiap orang memang memiliki cara khas tersendiri dalam mencapai sesuatu yang ingin dicapainya. Dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan. Salah satunya yaitu fungsi manajemen menurut Terry dalam Siagian (2005:35):

1. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
4. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri dari pemaparan fungsi yang berbeda-beda akan tetapi pada intinya tetap fungsi *planning* menjadi fungsi pertama dan selalu ada dalam setiap proses manajemen.

2.1.2 Perencanaan

2.1.2.1 Definisi Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi yang pertama dalam manajemen.

Hal ini seperti dinyatakan oleh Handoko (2001:53) :

Perencanaan diibaratkan sebagai inti manajemen, karena perencanaan membantu untuk mengurangi ketidakpastian di waktu yang akan datang, dan oleh karena itu memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya-sumber daya mereka yang terbatas secara paling efisien dan efektif.

Adapun menurut Hasibuan (2008:248) mengatakan perencanaan merupakan masalah memilih, yaitu memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada.

Selanjutnya, menurut Terry dalam Hasibuan (2008:249) yaitu:

“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believe necessary to achieve to achieve desired result.”(Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan).

Selain itu, Goetz dalam Hasibuan (2008:249) mendefinisikan perencanaan sebagai berikut:

“Planning is fundamentally choosing and a planning arises only when an alternative course of action is discovered.” (Perencanaan adalah pemilihan yang fundamental dan masalah perencanaan timbul, jika terdapat alternatif-alternatif).

Panggabean (2004:14) memberikan pengertian bahwa perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berkaitan

dengan penentuan rencana yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Simamora (2004:50) :

Rencana merupakan landasan bagi setiap jenis aktivitas organisasi. Perencanaan merupakan proses untuk menetapkan tujuan apa yang akan diraih selama periode waktu ke depan dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Perencanaan haruslah mendahului semua aktivitas manajemen supaya organisasi sukses mencapai tujuannya.

Adapun The Liang Gie (2000:25) menyatakan bahwa perencanaan yaitu pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. Selain itu, Seigel dan Shim dalam Fahmi (2014:9) mendefinisikan perencanaan adalah pemilihan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta merencanakan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Firdaus (2008:26) Perencanaan dapat didefinisikan sebagai hasil pemikiran yang mengarah ke masa depan, menyangkut serangkaian tindakan berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap semua faktor yang terlibat dan yang diarahkan kepada sasaran khusus. Dengan kata lain, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan berdasarkan pemilihan dari berbagai alternatif data yang ada, dirumuskan dalam bentuk keputusan yang akan dikerjakan untuk masa yang akan datang dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya Nasution (2006:11) menjabarkan definisi *planning* adalah :

Memutuskan di depan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana melaksanakannya, kapan dilaksanakannya, dan siapa yang melaksanakannya. *Planning* menjembatani jarak (*gap*) antara di mana kita berada dengan ke mana kita ingin berada di masa depan yang dikehendaki. Ia bukan saja berarti introduksi hal-hal baru,

tetapi juga pelaksanaan yang logis dan dapat dikerjakan. Ia memungkinkan hal-hal terjadi yang tanpa dia tidak akan terjadi. Walaupun masa depan itu jarang dapat diramalkan dengan tepat, dan kejadian-kejadian tak teramalkan mungkin saja terjadi pada rencana terbaikpun, namun tanpa *planning*, tindakan-tindakan cenderung tak bertujuan dan hanya terserah pada kesempatan saja.

Dalam penjabaran definisi perencanaan, para ahli memiliki perbedaan cara pandang yang khas sesuai latar belakang pendidikannya. Namun, pada dasarnya para ahli memiliki kesamaan dalam mengartikan perencanaan yaitu perencanaan merupakan kegiatan yang diarahkan kepada hal yang diharapkan di masa mendatang sehingga kebutuhan yang perlu dipersiapkan dengan matang dan antisipatif untuk memperoleh kejadian di masa mendatang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2.1.2.2 Alasan Perlunya Perencanaan

Ada beberapa alasan mengapa perencanaan itu perlu, Menurut Simamora (2004:50) yaitu pertama, perencanaan membuahkan keberhasilan. Kedua, perencanaan membuat manajemen merasa bahwa mereka mengendalikan nasib mereka sehingga perencanaan membantu manajemen menunaikan pekerjaannya secara lebih baik dalam menanggulangi perubahan teknologi, sosial, politik, lingkungan. Ketiga, perencanaan mewajibkan manajemen menentukan tujuan organisasi. Tanpa adanya tujuan organisasi, pengendalian yang efektif tidak akan mungkin terselenggara.

Adapun menurut Handoko (2013:80), ada dua alasan dasar perlunya perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk mencapai 1) “*protective benefits*” yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan, dan 2) “*positive benefits*” dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Effendi (2014:84), paling sedikit ada empat alasan perlunya perencanaan dilakukan antara lain:

1. Perencanaan sebagai Penentu Arah, maksudnya rencana memberikan arah ketika para karyawan mengetahui ke mana arah organisasi itu dan apa yang harus mereka sumbangkan untuk mencapai sasaran. Mereka dapat mengoordinasikan aktivitas, bekerja sama dalam satu tim. Tanpa perencanaan departemen-departemen mungkin bekerja dengan tujuan yang saling bertentangan dan menghambat organisasi bergerak menuju sasarannya.
2. Perencanaan Mengantisipasi Dampak Perubahan, maksudnya rencana memberikan dorongan untuk melihat jauh ke depan, mengantisipasi perubahan, pertimbangan dari dampak perubahan. Perencanaan memperjelas konsekuensi tindakan-tindakan yang mungkin diambil oleh para manajer dalam menanggapi perubahan.
3. Perencanaan Memperkecil Pemborosan, maksudnya perencanaan dapat mengurangi pemborosan-pemborosan, tumpang tindih kegiatan. Koordinasi sebelum terjadi akan cenderung menunjuk pada pemborosan dan berlebihan. Selain itu sarana dan tujuan yang jelas, ketidakefektifan menjadi jelas dan dapat dikoreksi atau dihilangkan.
4. Perencanaan sebagai Ukuran, maksudnya perencanaan digunakan untuk mengendalikan dalam arti dalam pelaksanaan kegiatan apabila terjadi penyimpangan, maka akan mudah untuk diketahui dan secepatnya diperbaiki. Dalam fungsi pengendalian manajer dapat membandingkan kinerja aktual dengan sasaran organisasi, mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan koreksi seperlunya. Tanpa perencanaan tidak ada pengendalian.

Kesamaan yang diungkapkan oleh para ahli tentang alasan perlunya perencanaan yaitu bahwa perencanaan akan menggambarkan persiapan yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan sehingga akan memudahkan organisasi dalam menghadapi perubahan yang terjadi.

2.1.2.3 Jenis-jenis Perencanaan

Adapun jenis-jenis perencanaan menurut Robin dan Coulter dalam Effendi (2014:88):

1. Perencanaan Menurut Ruang Lingkupnya, terdiri dari perencanaan strategis dan perencanaan operasional:
 - a. Perencanaan strategis (*strategic plan*) yaitu rencana-rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi, menentukan sasaran umum organisasi dan berusaha menempatkan organisasi dalam lingkungannya. Perencanaan strategis biasanya dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi yang lebih luas, menetapkan misi yang memberikan alasan khusus tentang keberadaan organisasi.
 - b. Perencanaan operasional (*operational plans*) yaitu rencana yang menetapkan rincian tentang cara mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Perencanaan operasional biasanya dirancang untuk menguraikan lebih spesifik dan terperinci perencanaan strategis, bagaimana rencana-rencana strategis akan dicapai.
2. Perencanaan Berdasarkan Kerangka Waktu, terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan menengah dan jangka pendek.
 - a. Perencanaan jangka panjang yaitu rencana yang ditetapkan dengan batas waktu berkisar antara tiga tahunan.
 - b. Perencanaan jangka menengah dengan batas waktu di antara jangka panjang dengan jangka pendek.
 - c. Perencanaan jangka pendek yaitu rencana yang ditetapkan dengan batas waktu yang mencakup satu tahun.
3. Perencanaan Bersifat Khusus, terdiri dari perencanaan direksional dan perencanaan spesifik.
 - a. Perencanaan direksional yaitu rencana yang fleksibel yang menetapkan pedoman umum bagi para manajer. Rencana

direksional berfokus untuk membatasi manajer ke dalam sasaran khusus atau urangkaian tindakan.

- b. Perencanaan spesifik yaitu rencana yang sudah dirumuskan dengan jelas dan tidak menyediakan ruang untuk interpretasi.
4. Perencanaan Berdasarkan Frekuensi Penggunaan terdiri dari perencanaan sekali pakai dan perencanaan tetap.
 - a. Rencana sekali pakai (*single use plans*) merupakan rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak akan digunakan kembali setelah rencana tercapai.
 - b. Rencana tetap (*standing plans*) merupakan pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang.

2.1.2.4 Proses Perencanaan

Menurut Firdaus (2008:28) ada enam langkah dalam proses perencanaan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan fakta dan informasi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang ada
2. Menganalisis situasi dan masalah yang terlibat.
3. Memperkirakan (*forecasting*) perkembangan yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
4. Menetapkan tujuan dan hasil, sebagai pedoman untuk sasaran yang akan dicapai. Penetapan tujuan merupakan langkah penting dalam penyusunan perencanaan sebelum suatu tindakan perencanaan dilaksanakan. Dari tujuan perusahaan inilah akan diketahui gambaran tentang apa yang akan diharapkan.
5. Mengembangkan berbagai alternatif sebagai arah tindakan dan memilih alternatif yang paling sesuai. Dan berbagai tindakan yang dianggap sesuai, kemudian dilakukan penilaian lagi terhadap alternatif-alternatif tindakan tersebut, dimana ditinjau secara ekonomi lebih menguntungkan. Alternatif tersebut memberikan hasil yang maksimal dengan pengeluaran yang minimal.
6. Mengevaluasi kemajuan dan mencocokkan kembali pandangan seseorang serentak dengan berlangsungnya perencanaan.

Kelebihan teori ini adalah memiliki lebih banyak indikator sehingga lebih operasional sedangkan kekurangannya yaitu kurangnya

penjabaran atas indikator-indikator yang terdapat dalam teorinya. Selain itu, teori ini dilihat dari sisi agribisnis sebagai kompetensi yang dikuasai oleh peneulis teorinya.

Selanjutnya menurut Effendi (2014:81) ada beberapa tindakan atau langkah yang harus dilalui dalam tingkatan proses perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tugas dan tujuan

Tugas dan tujuan adalah dua pengertian yang berhubungan erat sekali bila kita melaksanakan tugas pasti ada yang menjadi tujuan kegiatan. Sebaliknya suatu tujuan tidak akan tercapai bila tidak melakukan aktivitas yaitu melakukan suatu tugas. Kedua pengertian itu sangat erat hubungannya. Dalam membuat suatu rencana harus menetapkan tugas yang dimaksudkan bahwa kegiatan yang harus dijalankan, seperti memproduksi, mengangkut, menjual dan lain sebagainya. Di lain pihak tujuan merupakan nilai-nilai yang diharapkan untuk dipelihara, diperoleh atau diadakan, misalnya mengangkut untuk menyampaikan produk ke pelanggan, menjual produk untuk mendapatkan profit demi kelangsungan hidup organisasi. Tegasnya bahwa perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif.

2. Mengobservasi dan Menganalisis

Setelah tugas dan tujuan suatu perusahaan ditetapkan langkah berikutnya ialah mencapai atau mengobservasi faktor yang mempermudah untuk mencapai tujuan. Segala kekuatan, kelemahan, kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.

Bila faktor itu sudah diketahui, dianalisis sebagai antisipasi, maka akan dapat membantu organisasi mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut, didapat dari pengalaman lain yang mungkin dapat digunakan, demikian juga pengalaman dari organisasi lain. Bila data tersebut sudah diperoleh, kemudian dianalisis untuk menetapkan apakah faktor tersebut masih efektif digunakan untuk masa depan.

3. Mengidentifikasi Alternatif

Tersedianya bahan yang diperoleh pada langkah terdahulu, memberikan perencana dapat membuat beberapa alternatif untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemahaman posisi perusahaan sekarang ini adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan ini dianalisis rencana dirumuskan untuk menggambarkan beberapa alternatif untuk kegiatan pekerjaan selanjutnya. alternatif dapat diurutkan atas dasar prioritas, misalnya lamanya waktu penyelesaian, biaya yang dibutuhkan dan lain sebagainya.

4. Membuat Sintesis

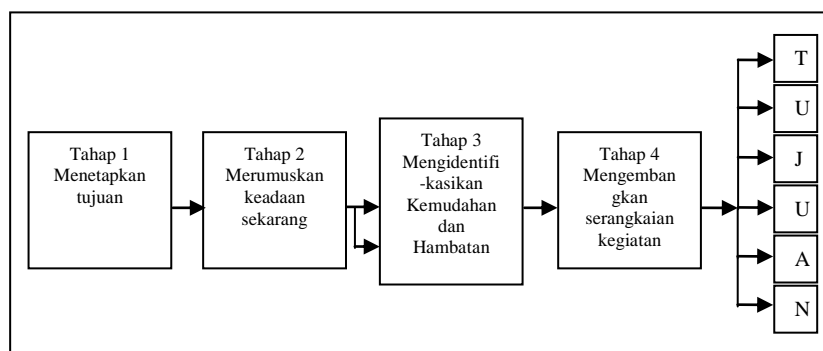
Terdapat beberapa alternatif untuk mencapai suatu tujuan yang memaksa pembuat rencana harus memilih berbagai alternatif. Pemilihan salah satu kemungkinan sering kali tidak tepat sebab masing-masing alternatif selalu mengandung unsur yang baik di samping adanya sela-sela negatifnya. Oleh karenanya, pada fase ini pembuat rencana harus mengawinkan atau membuat berbagai kemungkinan itu. Sela-sela negatif dari masing-masing kemungkinan dibuang, dan unsur-unsur yang positif diambil sehingga diperoleh sintesis dari berbagai alternatif itu. Dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian dari alternatif tersebut pilih yang paling terbaik sebagai prioritas utama.

Berdasarkan indikator-indikator proses perencanaan yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa dalam teorinya tidak hanya menetapkan tugas sebagai bagian dari proses perencanaan tetapi juga tugas-tugas perlu ditetapkan sebagai kegiatan yang perlu dijalankan. Selanjutnya proses observasi terhadap kemampuan organisasi dilihat dari pengalaman organisasi dalam mencapai tujuan sehingga dapat dianalisis faktor yang mempermudah dan mempersulit posisi perusahaan. Adapun setelahnya dilakukan identifikasi berbagai alternatif yang kemudian alternatif-alternatif tersebut dirangkai menjadi

kumpulan alternatif yang berunsur positif atau dapat disebut sebagai sintesis.

Adapun menurut Handoko (2013:79) Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini:

Gambar 2.1
Empat Tahap Perencanaan



Tahap 1: Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya-sumber dayanya secara tidak efektif.

Tahap 2: Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisis, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi-terutama keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi.

Tahap 3: Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.

Tahap 4: Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan, alternatif terbaik (paling memuaskan) di antara berbagai alternatif yang ada.

Teori ini lebih memfokuskan kepada tujuan dimana dalam indikator pertama dijelaskan tentang perlunya menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan sesuai kebutuhan organisasi sehingga dapat dilanjutkan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan pencapaian organisasi saat ini terhadap tujuan. Selanjutnya, organisasi dapat mengukur kemampuannya dengan mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan dalam perusahaan sehingga dapat mengembangkan rencana dan serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Selain teori-teori tersebut, ada pula dari Athoillah (2010:108) yang mengatakan bahwa terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan
Langkah ini berkaitan dengan kebutuhan organisasi dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam penentuan tujuan, disusun pula prioritas utama dan sumber daya yang dimiliki sehingga memudahkan pelaksanaan rencana.
2. Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang
Situasi sekarang perlu diperhatikan sebelum perencanaan dibuat, kemudian ukur menurut kemampuan organisasi dari seluruh komponen yang ada secara sistematis.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat
Memperkuat semua faktor yang mendukung terlaksananya perencanaan dan meminimalisasikan semua faktor yang akan menghambat. Demikian pula, dengan antisipasi terhadap gangguan yang datang secara tidak terduga.

4. Mengembangkan rencana dan menjabarkannya

Pengembangan rencana dan penjabarannya harus dipahami oleh seluruh pelaksana kegiatan sehingga memudahkan tercapainya sasaran dan tujuan. Caranya adalah dengan mengembangkan berbagai alternatif yang dapat dijadikan solusi permasalahan yang berkembang ketika rencana sedang dilaksanakan.

Berdasarkan penjabaran di atas, bahwa dalam menentukan tujuan perlu disusun prioritas utama dan sumber daya yang dimiliki untuk memudahkan pelaksanaan rencana kemudian memperhatikan kemampuan organisasi dari seluruh komponen saat ini sehingga dapat diidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat yang digunakan untuk pengembangan rencana agar dapat mengatasi permasalahan. Teori ini mengemukakan bahwa penentuan prioritas utama dikemukakan pada proses yang paling awal yaitu ketika menetapkan sasaran dan perangkat tujuan.

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan di atas tersebut penulis memilih teori dari Athoillah (2010:108) karena teori ini sesuai dengan identifikasi masalah yang penulis temukan di lapangan sehingga penulis dapat membedah permasalahan tersebut menggunakan teori ini.

2.1.3 Anggaran

2.1.3.1 Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2009:61) menyebutkan definisi anggaran yaitu merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan Bastian (2010:191) menjelaskan bahwa anggaran

diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Adapun anggaran publik menurut Mardiasmo (2009:61) yaitu berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Contoh jenis anggaran publik antara lain menurut Bastian (2010:191) yaitu Anggaran Negara dan Daerah/APBN/APBD (*Budget of state*) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-privat.

Melihat pengertian yang dijabarkan oleh Bastian dan Mardiasmo dapat diketahui bahwa intinya sama yaitu sesuatu rangkaian aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang disertai alokasi dana untuk kegiatan tersebut. Anggaran publik itu sendiri berarti anggaran yang berisi kegiatan publik. Mardiasmo (2009:63) menjabarkan fungsi utama dari anggaran sektor publik yaitu :

- (1) Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)
Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja Pemerintah tersebut.
- (2) Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran Pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, Pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran.

- (3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal Pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal Pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
- (4) Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)
Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill, coalition building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya atau paling tidak menurunkan kredibilitas Pemerintah.
- (5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)
Anggaran sebagai alat koordinasi antar bagian dalam Pemerintahan sehingga anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Maka dari itu, anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.
- (6) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- (7) Anggaran sebagai alat motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- (8) Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Awalnya program pembangunan lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, akan tetapi sejak daerah diberi kewenangan secara luas dan nyata, Pemerintah Daerah dapat menentukan sendiri program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya sehingga pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak lagi disahkan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri tetapi cukup disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Perubahan dalam sistem penganggaran tidak hanya terjadi pada prosesnya saja tetapi juga pada struktur anggarannya. Sebelum otonomi daerah, struktur anggaran yang digunakan adalah struktur anggaran tradisional dengan pendekatan anggaran berimbang namun saat ini berubah menjadi struktur anggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan penganggaran yang mendekatkan pencapaian hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan APBD dikaitkan dengan target kinerja terukur (Mahmudi, 2010:4). Dengan demikian, anggaran yang disusun memuat informasi/keterangan antara lain (Soleh dan Rochmansjah, 2010:106):

1. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
2. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
3. Persentase dari jumlah pendapatan APBD yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah perlu dikembangkan Analisa Standar Belanja (ASB), Tolak Ukur Kinerja dan Standar Biaya.

2.1.3.2 Siklus APBD

Fuady dkk (2010:44) menjabarkan prinsip-prinsip pokok siklus anggaran yang perlu dipahami dengan baik oleh penyelenggara Pemerintahan, antara lain :

Tabel 2.1
Daur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

No.	Tahapan	Durasi (bulan)	Rentang Waktu
1.	Persiapan dan Penyusunan	6	April-September
2.	Ratifikasi	3	Oktober-Desember
3.	Implementasi	12	Januari-Desember
4.	Pelaporan dan Evaluasi	3	Januari-Maret

(Sumber: Fuady dkk, 2010:44)

1) Tahap Persiapan dan Penyusunan Anggaran (*Budget Preparation*)

Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan anggaran.

Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor "*uncertainly*" (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangatlah tergantung pada teknik dan sistem anggaran yang digunakan. Besarnya mata anggaran pada suatu anggaran yang menggunakan "*line-item budgeting*" akan berbeda pada "*performance budgeting*", "*input-output budgeting*", "*program budgeting*", atau "*zero based budgeting*".

2) Tahap Ratifikasi Anggaran (*Budget Ratification*)

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif (kepala daerah) dituntut tidak hanya memiliki “*manajerial skill*” namun juga harus mempunyai “*political skill*” “*salesmanship*” dan “*coalition building*” yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3) Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*)

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung pengendalian anggaran.

4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah.

2.1.4 Gender

Definisi konsep jenis kelamin (*sex*) menurut Fakih (2007:7) bahwa Jenis kelamin (*sex*) adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender menurut Fakih (2007:8) bahwa gender

merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Jadi, dalam hal ini Fakih memfokuskan definisinya pada perbedaan berdasarkan ketetapan sifat. Jenis kelamin yang bersifat tetap dan Gender yang bersifat akan berubah mengikuti perubahan zaman.

Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Bab I Umum poin pertama mendefinisikan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Sedangkan dalam poin ketiga dinyatakan bahwa kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sedangkan pada poin keempatnya menyebutkan bahwa keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dimana hal tersebut dimaksudkan agar perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasinya.

2.1.5 Anggaran Responsif Gender

Sodani dan Sharma (2008:228) mengungkapkan bahwa anggaran responsif gender adalah tentang penentuan hal-hal mana terdapat perbedaan dan hal-hal mana terdapat persamaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Ketika kebutuhan berbeda maka seharusnya terdapat alokasi anggaran yang berbeda. Kemudian Sundari dkk (2008:8) menerangkan anggaran responsif gender adalah anggaran yang berpihak kepada masyarakat, memprioritaskan pembangunan manusia, dan merespon kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Praktiknya, implementasi anggaran responsif gender dapat merespons kebutuhan berdasarkan lokasi geografis (desa-kota), kemampuan yang berbeda (normal-penyandang cacat), dan kelompok umur (anak, remaja, lanjut usia). Dengan demikian, dari definisi anggaran responsif gender di atas dapat diketahui bahwa Sodani dan Sharma serta Sundari dkk memfokuskan definisinya pada perbedaan kebutuhan setiap kelompok masyarakat yang harus mendapat alokasi anggaran yang berbeda sehingga anggaran bisa lebih adil dan tepat sasaran.

Penelitian ini menggunakan perspektif gender realisme. Gender realisme adalah dimana wanita dikelompokkan secara individu dengan fitur yang sama, sebagai insan sosial atau alami dari keperempuanannya secara universal. (Civardi, Deborah. 2014. *Stoljar's Gender Nominalism vs Gender Realism*. Melalui, <http://www.academia.edu/7835355/Stoljars_Gender_Nominalism_vs_Gender_Realism>. Diakses tanggal 23 Januari 2018). Gender

realisme ini berbeda dengan feminisme. Feminisme adalah gerakan untuk mengakhiri penindasan wanita sebagai wajah kelompok dan para feminis bertujuan untuk berbicara dan mengajukan tuntutan politik atas nama perempuan, sekaligus menolak gagasan bahwa ada kategori perempuan yang bersatu dan tidak seperti yang dinyatakan dari sudut pandang gender realisme bahwa gender dibangun secara independen dari ras, kelas, etnisitas dan kebangsaan. Jika jenis kelamin dapat dipisahkan dari, misalnya, ras dan kelas dengan cara ini, semua wanita akan mengalami kewanitaan dengan cara yang sama. (Mikkola, Mari. 2017. *Feminist Perspectives on Sex and Gender*. Melalui, <<https://plato.stanford.edu/entries/feminism-gender>>. Diakses tanggal 23 Januari 2018).

Jadi, feminimisme memfokuskan kepada bagaimana menyelesaikan tuntutan hak wanita dalam politik sedangkan penelitian yang berperspektif gender realisme ini memfokuskan pada bagaimana menyelesaikan masalah akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan untuk berperan serta dalam pembangunan terlepas dari ras atau kelas yang ada pada diri perempuan atau laki-laki melalui perencanaan anggaran responsif gender.

Mastuti dan Rinusu (2006:37) mengungkapkan keuntungan yang akan diperoleh Pemerintah jika menerapkan anggaran responsif gender, antara lain:

1. Anggaran responsif gender merupakan salah satu cara bagi Pemerintah untuk mengimplementasikan komitmen yang terkait dengan gender sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi dari konferensi internasional seperti konferensi Beijing dan konferensi sesudahnya.

2. Dengan diterapkannya *gender budget*, maka dapat mengukur kemajuan dalam pelaksanaan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus perhatian pada *output* dan dampak dari belanja Pemerintah.
3. Alat yang dapat digunakan untuk menjamin tidak adanya *gap* antara prioritas alokasi anggaran dengan kebijakan pembangunan daerah.
4. Mendorong Pemerintah untuk fokus pada kelompok-kelompok marginal dan tidak beruntung untuk melihat kesadaran implikasi gender pada belanja dan penerimaan publik.
5. Memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk menetapkan dan mencapai hasil pembangunan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.
6. Mengembangkan instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas hasil pelaksanaan kebijakan.

Model anggaran responsif gender yang ditawarkan terdiri 4 kategori, yaitu (Mastuti dan Rinusu, 2007):

1. Alokasi anggaran khusus perempuan dan anak, yaitu pos anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program atau proyek yang secara langsung ditujukan untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak. Contoh: alokasi anggaran posyandu, peningkatan gizi anak sekolah, pemeriksaan *papsmear* gratis kepada ibu di pedesaan.
2. Alokasi untuk *affirmative action* bagi kelompok marginal yaitu alokasi anggaran yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program atau proyek bagi kelompok masyarakat baik laki-laki dan atau perempuan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan mengejar ketertinggalannya. Contoh: beasiswa, *capacity building*.
3. Alokasi untuk Pengarusutamaan Gender dalam anggaran utama, yaitu alokasi anggaran yang diposkan untuk pelatihan, penelitian atau evaluasi dan penyiapan perlengkapan termasuk antara lain bagi upaya-upaya terlaksananya pengarusutamaan gender dalam setiap Departemen/Dinas. Contoh: pelatihan Pengarusutamaan Gender untuk pegawai eselon 2.
4. Pengimplementasian Pengarusutamaan Gender adalah alokasi anggaran Departemen/Dinas yang digunakan untuk mendukung terlaksananya reformasi kebijakan atau rekomendasi dari hasil analisa dampak bagi laki-laki dan perempuan. Contoh: alokasi anggaran untuk fasilitas mall respon gender.

Kemudian sebagai alat untuk membantu memetakan alokasi anggaran untuk masing-masing kategori, berikut beberapa *item* yang diperhatikan:

1. Alokasi anggaran khusus perempuan dan anak, meliputi:
 - a) Persentase alokasi anggaran khusus bagi perempuan dan persentase alokasi anggaran khusus bagi anak dibandingkan total anggaran.
 - b) Persentase alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan prioritas perempuan dalam pelayanan publik (kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat).
 - c) Persentase alokasi anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak perempuan dan laki-laki dibandingkan total anggaran.
 - d) Pembagian alokasi anggaran untuk peningkatan keadaan ekonomi perempuan miskin.
 - e) Penetapan belanja berdasarkan prioritas kebutuhan Pemerintah termasuk dana untuk anak yang dibayarkan untuk membiayai perawatan anak keluarga miskin.

2. Alokasi untuk *affirmative action* bagi kelompok marginal, meliputi:
 - a) Persentase alokasi anggaran untuk kelompok-kelompok marginal (seperti kelompok miskin, etnis minoritas, suku terasing) dibandingkan total anggaran.
 - b) Alokasi anggaran untuk program pelatihan Pemerintah yang mengutamakan keseimbangan gender.
 - c) Alokasi anggaran untuk mewujudkan keseimbangan gender di sektor-sektor kepegawaian publik.
 - d) Ada alokasi anggaran penyediaan payung hukum untuk *affirmative action* atau upaya mewujudkan kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan di sektor publik.

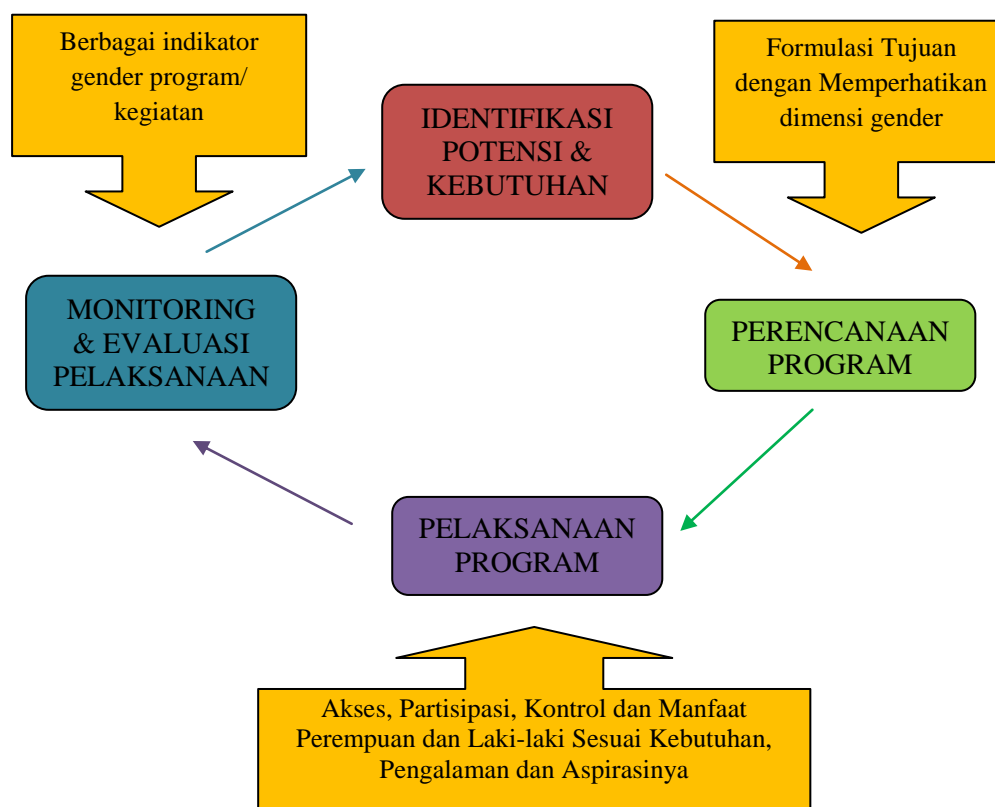
3. Alokasi untuk Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam anggaran utama, meliputi:
 - a) Persentase alokasi anggaran untuk program Pengarusutamaan Gender dibandingkan total anggaran.
 - b) Adanya alokasi anggaran untuk keperluan analisis gender termasuk penyediaan data terpilah.
 - c) Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan pelatihan gender dan penyediaan modul-modul untuk Pengarusutamaan Gender sesuai sektor.
 - d) Adanya alokasi anggaran untuk penelitian dan evaluasi terhadap dampak program atau proyek terhadap laki-laki dan perempuan.

4. Alokasi untuk Pengimplementasian Pengarusutamaan Gender, meliputi:
 - a) Adanya alokasi anggaran untuk melaksanakan hasil reformulasi program atau proyek Pemerintah berdasarkan hasil evaluasi dampaknya terhadap laki-laki dan perempuan.

- b) Alokasi untuk membangun perlengkapan dan fasilitas umum sesuai dengan hasil rekomendasi analisis atau penelitian kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Adapun berikut ini adalah skema perencanaan yang responsif gender yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia:

Gambar 2.2
Skema Perencanaan Responsif Gender



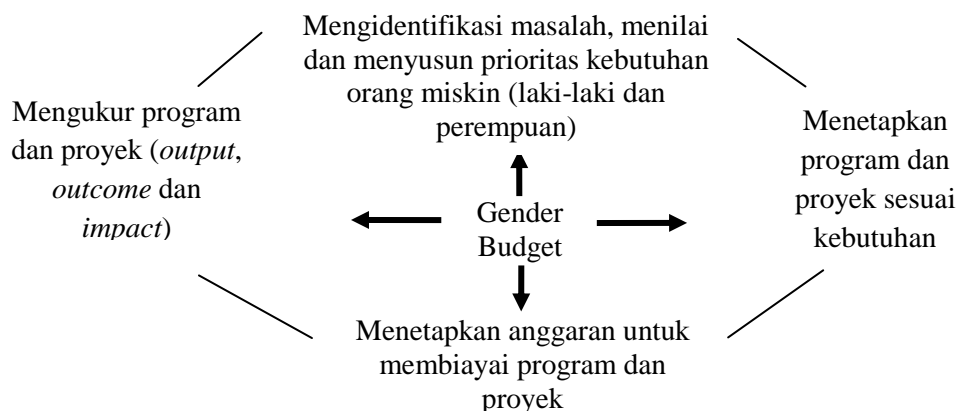
Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2013. Pedoman PPRG Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Skema tersebut rupanya diadopsi secara sederhana teknik atau caranya mengintegrasikan gender dalam proses penyusunan anggaran program dan

proyek yang responsif gender yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Rinusu, 2006):

1. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi kelompok masyarakat (laki-laki dan perempuan), menilai dan menyusun apa yang menjadi prioritas kebutuhan mereka dan sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. Prioritas masalah diambil dari sejumlah masalah yang teridentifikasi.
2. Mengusulkan atau menetapkan program dan proyek sesuai hasil pemetaan kebutuhan yang telah diidentifikasi, disepakati bersama-sama oleh kelompok masyarakat miskin.
3. Menetapkan perkiraan anggaran untuk membiayai program dan proyek.
4. Mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan proyek, apakah mempunyai manfaat dan dampak terhadap perubahan masyarakat sebelum dan sesudah proyek diberlakukan.

Gambar 2.3
Skema: Integrasi Gender Dalam Anggaran Kinerja



Sumber : Rinusu, Gender Budget Analysis : Upaya untuk mewujudkan keadilan gender, Jurnal Perempuan No 46, 2006

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang dijadikan bahan masukan atau referensi peneliti yang kurang lebihnya memiliki bahasan topik yang serupa dengan yang peneliti lakukan yaitu mengenai anggaran responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Kajian penelitian yang terdahulu ini dapat digunakan sebagai data pembandingan yang relevan dengan fokus penelitian peneliti. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Pertama, penelitian skripsi tahun 2010 oleh Marisa Pitu yang merupakan mahasiswa dari Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “Analisis Anggaran Responsif Gender Di Provinsi Banten Tahun 2008 & 2009”. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana anggaran responsif gender di Provinsi Banten Tahun 2008 dan 2009. Penelitian ini menggunakan model teori anggaran Debbie Bundlender’s *5 step approach* dalam menganalisis anggaran responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan indikator teorinya yaitu analisis situasi gender, kebijakan/program, input (keuangan dan sumber lain), *output* (implementasi anggaran), dan *outcome*.

Jenis penelitiannya adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun Marisa Pitu memfokuskan penelitiannya untuk mengkaji analisis anggaran responsif gender di Provinsi Banten Tahun 2008 dan 2009. Hasil penelitiannya yaitu anggaran responsif gender di Provinsi Banten belum memenuhi ketentuan peraturan daerah yang mengamanatkan anggaran responsif gender sebesar minimal 5% dari APBD Provinsi Banten. Hal tersebut berdasarkan data bahwa dari besaran anggaran responsif gender pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 57.916.823.848 atau sebesar 2,4% dari APBD Provinsi Banten dan pada tahun 2009, besaran anggaran responsif gendernya menurun menjadi 2,1% dari APBD Provinsi Banten atau sebesar Rp.54.491.967.150. Selain itu, dari total 34 Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Banten, yang menyusun anggaran responsif gender di Provinsi Banten hanya 14 SKPD di tahun 2008 dan 11 SKPD di tahun 2009.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, objek penelitian ini juga sama mengenai anggaran responsif gender namun menggunakan alat analisis yang berbeda serta lokus penelitian yang sama yaitu di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. Kemudian, terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini yaitu penelitian ini terfokus pada analisis anggaran responsif gender sedangkan penelitian saat ini terfokus kepada proses perencanaan anggaran responsif gender.

Kedua, penelitian tesis berjudul “Analisis Alokasi Anggaran Responsif Gender Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Pada APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2008-2010” yang ditulis oleh Mira Kestari dari Prodi Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2011. Tujuan penelitiannya ialah menganalisis komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan anggaran responsif gender dan menganalisis alokasi belanja Kabupaten Bogor apakah sudah menunjukkan tingkat responsivitas pada aspek keberpihakan pada kesetaraan gender pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Dalam mengukur komitmen dan tingkat responsivitas tersebut maka menggunakan konsep komitmen dari Thomas R. Dye dan konsep responsivitas dari Siagian yang dipadukan dengan kategori-kategori anggaran responsif gender yaitu kategori alokasi anggaran yang spesifik gender, kategori tindakan afirmatif

(*affirmative action*), dan kategori *mainstreaming* gender. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan metode kualitatif dan pendekatan positivisme. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis mengenai komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan anggaran responsif gender dan alokasi belanja Kabupaten Bogor apakah sudah menunjukkan tingkat responsivitas pada aspek keberpihakan pada kesetaraan gender pada sektor pendidikan dan kesehatan.

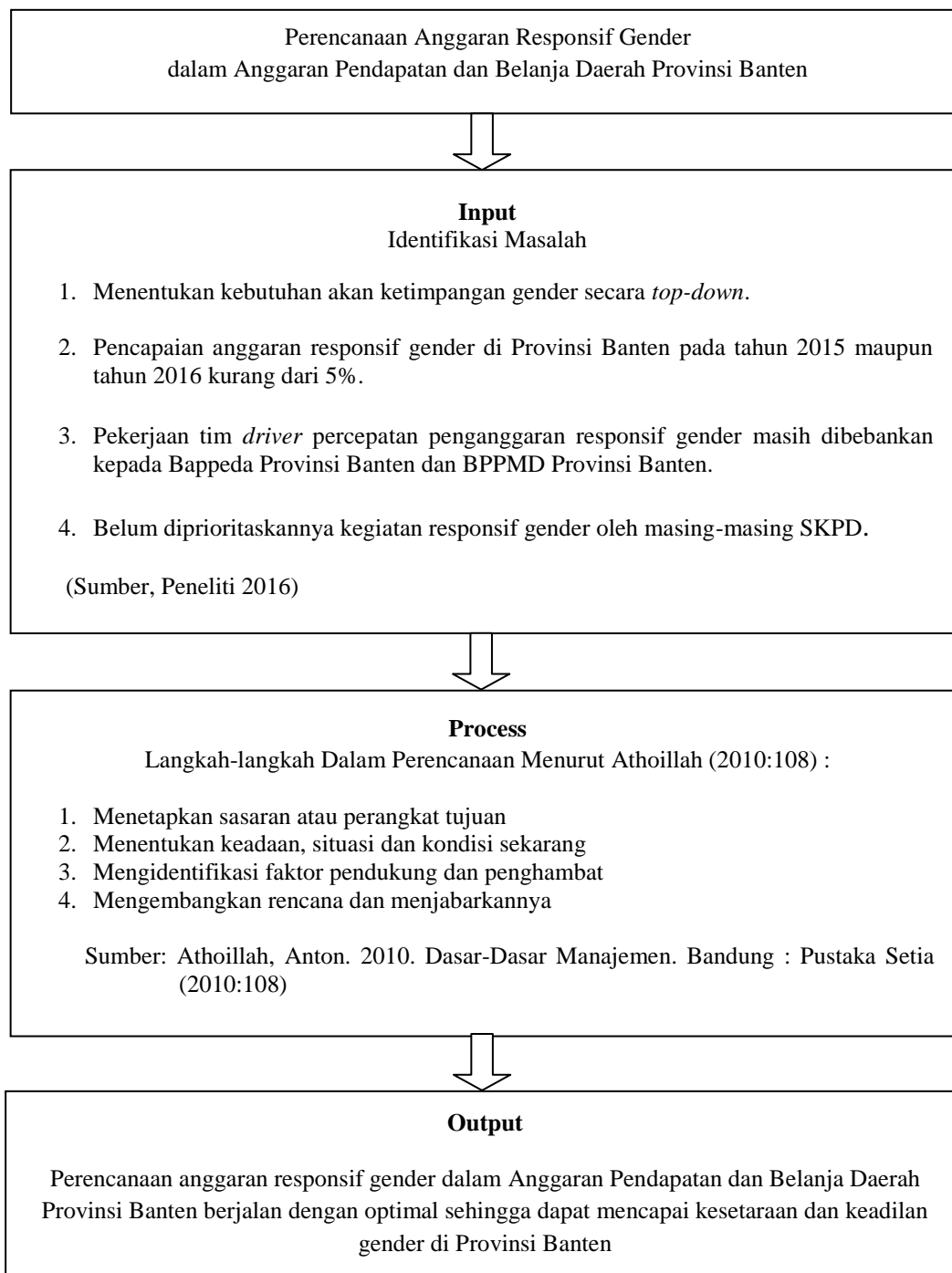
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu pertama, komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pelaksanaan anggaran responsif gender masih lemah. Hal ini ditandai dengan tidak adanya peraturan atau kebijakan yang mendukung program tersebut, termasuk diantaranya Perda mengenai peningkatan kualitas perempuan. Tidak adanya peraturan atau kebijakan tersebut mengakibatkan tidak adanya perangkat untuk melaksanakan anggaran responsif gender. Salah satu perangkat yang sangat penting adalah data pilah gender. Dengan tidak adanya data pilah gender ini menyulitkan pembuatan instrumen untuk mengukur target dan capaian anggaran responsif gender berdasarkan kriteria-kriteria dan indikator-indikator penting dari setiap kategori anggaran gender. Kedua, alokasi belanja Kabupaten Bogor di sektor pendidikan dan kesehatan sudah menggunakan anggaran responsif gender, namun masih sangat kecil. Hal ini akan berdampak pada tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Kecilnya alokasi anggaran yang responsif gender ini karena alokasi belanja untuk aparat masih lebih besar dari pada anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini yaitu sama-sama menggunakan objek penelitian mengenai anggaran responsif gender namun menggunakan teori yang berbeda dan juga penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif dengan metode kualitatif. Kemudian, terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini yaitu penelitian ini terfokus pada analisis terhadap komitmen dan responsivitas dalam mengalokasikan anggaran responsif gender sedangkan penelitian saat ini terfokus kepada perencanaan anggaran responsif gender.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan teori yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat digunakan salah teori yang indikator-indikatornya dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam perencanaan anggaran responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 sehingga akan didapatkan *output* yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah perencanaan anggaran responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Athoillah (2010:108) dan lebih jelasnya, kerangka berfikir penulis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.4
Kerangka Berpikir



Sumber: Peneliti, 2016

2.4 Asumsi Dasar

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang dipaparkan di atas, peneliti memfokuskan pada pembahasan Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016. Akan tetapi, berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bahwa perencanaan anggaran responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Banten Tahun 2016 belum optimal.

Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa masalah dalam melakukan perencanaan tersebut seperti menentukan kebutuhan akan ketimpangan gender secara *top-down*, pencapaian anggaran responsif gender di Provinsi Banten pada tahun 2015 maupun tahun 2016 kurang dari 5%, pekerjaan tim *driver* percepatan penganggaran responsif gender masih dibebankan kepada Bappeda Provinsi Banten dan BPPMD Provinsi Banten, dan belum diprioritaskannya kegiatan responsif gender oleh masing-masing SKPD.

Dari beberapa masalah tersebut maka dibutuhkan perencanaan anggaran responsif gender yang optimal agar dapat mencapai kesetaraan dan keadilan gender di Provinsi Banten.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Menurut Bungin (2009:44) diyakini bahwa “cara kerja” ilmuwan (melakukan observasi dan menafsirkan) juga berlangsung dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, dan itu dilakukan oleh siapa pun termasuk orang awam sekalipun. Itu dimungkinkan oleh adanya basis perbendaharaan “metodologi” yang berupa kerangka pemikiran, asumsi, dalil dan teori sehari-hari.

Selanjutnya Bungin (2009:68) juga menjabarkan mengenai pendekatan kualitatif. Ia mengatakan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

Dalam penelitian mengenai “Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016” ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena pendekatan ini dimaksudkan untuk memberi suatu gambaran mendalam mengenai proses perencanaan anggaran responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Banten Tahun 2016 dengan memusatkan melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam terhadap pihak yang terlibat

dalam perencanaan anggaran responsif gender sehingga dapat ditemukan dan dipelajari berbagai aspek secara menyeluruh.

3.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan observasi awal, penelitian ini difokuskan mengenai Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016. Sebagai situasi sosial, dalam melakukan perencanaan anggaran responsif gender (*activity*) di Pemerintahan Provinsi Banten (*place*) terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan anggaran responsif gender (*actor*) yaitu pegawai yang terlibat dalam keanggotaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Provinsi Banten yaitu Bappeda Provinsi Banten dan BPPMD Provinsi Banten, Anggota Legislatif, LSM dan pegawai SKPD yang terlibat dalam perencanaan anggaran responsif gender.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu berada di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang beralamat di Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi Banten.

3.4 Fenomena yang diamati

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan sehingga dalam penelitian ini menggunakan konsep teori antara lain:

1. Manajemen

Manajemen merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari fungsi-fungsi manajemen yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam mengatur sumber daya-sumber daya yang dimiliki organisasi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Perencanaan

Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan di masa mendatang serta mengidentifikasi apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah tahapan dalam menentukan kegiatan apa saja yang akan dianggarkan berdasarkan tujuan organisasi.

4. Anggaran Responsif Gender

Anggaran yang mengakomodir perbedaan kebutuhan pada pihak-pihak yang terkena isu gender yaitu anak-anak, perempuan, kaum difabel, lanjut usia dan laki-laki.

5. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dokumen APBD adalah suatu dokumen yang memuat rincian anggaran pada program dan kegiatan pemerintah, pendapatan per tahun serta kegiatan belanja yang telah direncanakan di suatu daerah.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Variabel penelitian dilengkapi dengan tabel matriks variabel, indikator, sub indikator dan nomor pertanyaan sebagai lampiran. Indikator Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Operasional

Variabel	Dimensi	Operasional
Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016	Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan anggaran responsif gender. 2. Pihak yang terlibat dalam menetapkan seperangkat sasaran dalam mencapai tujuan penerapan anggaran responsif gender ini. 3. Cara mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam penerapan anggaran responsif gender.
	Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi sumber daya atau komponen yang dibutuhkan dalam penerapan anggaran responsif gender saat ini. 2. Kemampuan organisasi dalam mempersiapkan sumber daya atau komponen yang dibutuhkan dalam penerapan anggaran responsif gender saat ini.
	Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor yang mendukung terlaksananya penerapan anggaran responsif gender. 2. Faktor yang menghambat terlaksananya penerapan anggaran responsif gender.
	Mengembangkan rencana dan menjabarkannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab peserta pelatihan setelah mendapatkan pelatihan PPRG 2. Tanggapan pimpinan berdasarkan pelaporan hasil pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender di Provinsi Banten.

Sumber: Peneliti, 2016

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan, proses pengumpulan data dan teknik penentuan kualitas instrumen. Konsep Instrumen penelitian dipahami sebagai alat yang dapat mengungkap fakta-fakta lapangan dan tidak ada alat yang paling elastis dan tepat untuk mengungkap data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri (Satori dan Komariah, 2010:61). Posisi peneliti dalam meneliti anggaran responsif gender adalah menggunakan perspektif realis meskipun peneliti berjenis kelamin perempuan. Perspektif gender realis adalah peneliti memposisikan fakta-fakta yang ada di lapangan tidak hanya dari permasalahan perempuan saja tetapi meliputi kesenjangan gender yang dialami laki-laki maupun perempuan.

Dalam penelitian ini data yang diteliti adalah data berupa data lisan dan tulisan, maka dari itu untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan untuk mewawancarai informan dan alat perekam. Alat perekam digunakan untuk merekam proses wawancara dengan informan. Hasil rekaman kemudian ditranskripsikan melalui peralatan sehingga memudahkan untuk mengelompokkan data. Data tulisan yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan anggaran responsif gender di Provinsi Banten.

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No.	Dimensi	Pertanyaan	Informan
1.	Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana menetapkan tujuan dalam perencanaan anggaran responsif gender? 2. Apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penerapan anggaran responsif gender? 3. Bagaimana mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam penerapan anggaran responsif gender? 	<i>Pokja PUG dan SKPD Focal Point</i>
	Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kondisi dari hal-hal yang perlu dipersiapkan tersebut dalam perencanaan anggaran responsif gender saat ini? 2. Bagaimana kemampuan organisasi dalam mempersiapkan sumber daya atau komponen yang dibutuhkan dalam penerapan anggaran responsif gender saat ini? 	<i>Pokja PUG dan SKPD Focal Point</i>
	Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya penerapan anggaran responsif gender? 2. Bagaimana cara memperkuat faktor yang mendukung terlaksananya penerapan anggaran responsif gender selama ini? 3. Apa saja faktor yang menghambat terlaksananya penerapan anggaran responsif gender? 4. Bagaimana cara meminimalisasi faktor yang menghambat terlaksananya penerapan anggaran responsif gender selama ini? 5. Bagaimana antisipasi terhadap gangguan yang datang secara tidak terduga? 	<i>Pokja PUG dan SKPD Focal Point</i>
	Mengevaluasi rencana dan pelaksanaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggung jawab peserta pelatihan setelah mendapatkan pelatihan PPRG? 2. Bagaimana tanggapan pimpinan berdasarkan pelaporan hasil pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender di Provinsi Banten? 	<i>Pokja PUG dan SKPD Focal Point</i>

Sumber: Peneliti, 2016

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2009:76). Jadi, penelitian tentang Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016, informan penelitiannya adalah perencana anggaran responsif gender yaitu pegawai yang terlibat dalam keanggotaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Provinsi Banten yaitu Bappeda Provinsi Banten dan BPPMD Provinsi Banten, Anggota Legislatif, LSM dan pegawai SKPD yang terlibat dalam perencanaan anggaran responsif gender.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *snowballing*. Memperoleh informan dengan cara *snowballing* digunakan apabila peneliti tak tahu siapa yang memahami informasi objek penelitian, karena itu ia harus melakukan langkah-langkah (Bungin, 2009:77) :

(1) Peneliti ketika memulai melakukan penelitian dan pengumpulan informasi, ia berupaya menemukan *gatekeeper*, yaitu siapa pun orang yang pertama dapat menerimanya di lokasi objek penelitian yang dapat memberi petunjuk tentang siapa yang dapat diwawancarai atau diobservasi dalam rangka memperoleh informasi tentang objek penelitian; (2) *Gatekeeper* bisa pula sekaligus menjadi orang pertama yang diwawancarai, namun kadang *gatekeeper* menunjuk orang lain yang lebih paham tentang objek penelitian; (3) Setelah wawancara pertama berakhir, peneliti meminta informan menunjuk orang lain berikutnya yang dapat diwawancarai untuk melengkapi informasi yang sudah

diperolehnya; (4) Terus-menerus setiap habis wawancara peneliti meminta informan menunjuk informan lain yang dapat diwawancarai pada waktu lain.

Dalam penelitian ini *Gatekeeper*nya adalah Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten (BPPMD) yang menerima peneliti di lokasi penelitian dan memberi informasi awal. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian mengenai Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 adalah :

Tabel 3.3
Informan Penelitian

No.	Jenis Informan	Kode Informan	Kategori Informan	Peran dan Fungsi
1.	Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG)	I ₁₋₁	Bappeda Provinsi Banten	Ketua Kelompok Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten
2.		I ₁₋₂	BPPMD Provinsi Banten	Sekretaris Kelompok Pengarusutamaan Gender (Berrperan dalam bantuan teknis substansi PUG)
3.	Lembaga Eksekutif	I ₂₋₁	Dinas Sosial	Pelaksana sekaligus perencana program dan kegiatan responsif gender
4.		I ₂₋₂	Disnakertrans	
5.		I ₂₋₃	DBMTR	
6.		I ₂₋₄	DSDAP	
7.		I ₂₋₅	Badan Ketahanan Pangan	
8.		I ₂₋₆	Satpol PP	
9.		I ₂₋₇	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
10.	Lembaga Legislatif	I ₃₋₁	Anggota Fraksi Gerindra	Penghubung antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah sebagai pelaksana kegiatan masyarakat
11.		I ₃₋₂	Ketua Kauskus Parlemen Perempuan	Ikut andil dalam menyuarakan aspirasi yang berkaitan dengan hak-hak perempuan
12.	Masyarakat	I ₄₋₁	PATTIRO Provinsi Banten	LSM yang fokus terhadap anggaran responsif gender di Provinsi Banten

Sumber: Peneliti, 2016

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suparmoko (2009:67), data yang dikumpulkan dapat dibedakan berdasarkan sumbernya menjadi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan berbagai instansi lain. Alat yang digunakan untuk penelitian ini antara lain, pedoman wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2009:108).

2. Metode Observasi

Menurut Suparmoko (2009:68), informasi atau data dapat dikumpulkan dengan metode observasi, dengan cara ini peneliti hanya mengamati dan tidak banyak melakukan kegiatan, melainkan hanya mencatat apa yang dilihat atau disaksikan. Teknik ini memungkinkan peneliti menarik inferensi (kesimpulan)

ihwal makna dan sudut pandang responden, kejadian, peristiwa, atau proses yang diamati Alwasilah (2003:154).

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperanserta, namun peranan penelitalah yang menentukan keseluruhan skenarionya (Moleong, 2011:163). Sebagai pengamat, peneliti berperan serta dalam kehidupan sehari-hari subjeknya pada setiap situasi yang diinginkannya untuk dapat dipahaminya dan ini jelas tidak pada seluruh peristiwa ia perlu berperan-serta (Moleong, 2011:164).

Jadi, dalam hal ini peneliti hanya terlibat dalam mengamati sudut pandang responden, kejadian, peristiwa, atau proses yang berkaitan dengan Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten. Hal ini memberi peluang bagi peneliti untuk dapat memandang kebiasaan, konflik, dan keterkaitannya dengan lingkungannya.

3. Metode Dokumenter

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2009:121). Adapun dokumen yang ditelaah dalam penelitian ini yaitu dokumen resmi berupa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan dokumen resmi lainnya.

4. Studi Literatur/Pustaka

Studi literatur/kepuustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pencarian data-data yang berhubungan dari berbagai sumber pustaka untuk kelengkapan data yang dibutuhkan (Notoatmodjo, 2005:93).

3.8 Teknik Analisis Data

Selama proses pengumpulan data, data mentah tersebut kemudian dianalisa menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman. (Miles dan Huberman, 1992:16), yaitu:

3.8.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilihnya.

Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun (Miles dan Huberman, 1992:16).

3.8.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Manusia tidak cukup mampu sebagai pemroses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi kompleks ke dalam satuan bentuk (*Gestalt*) yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami (Miles dan Huberman, 1992:17).

Sebagaimana halnya dengan reduksi data, penciptaan dan penggunaan penyajian data tidaklah terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan kegiatan analitis, hal itu juga merupakan kegiatan reduksi data (Miles dan Huberman, 1992:18).

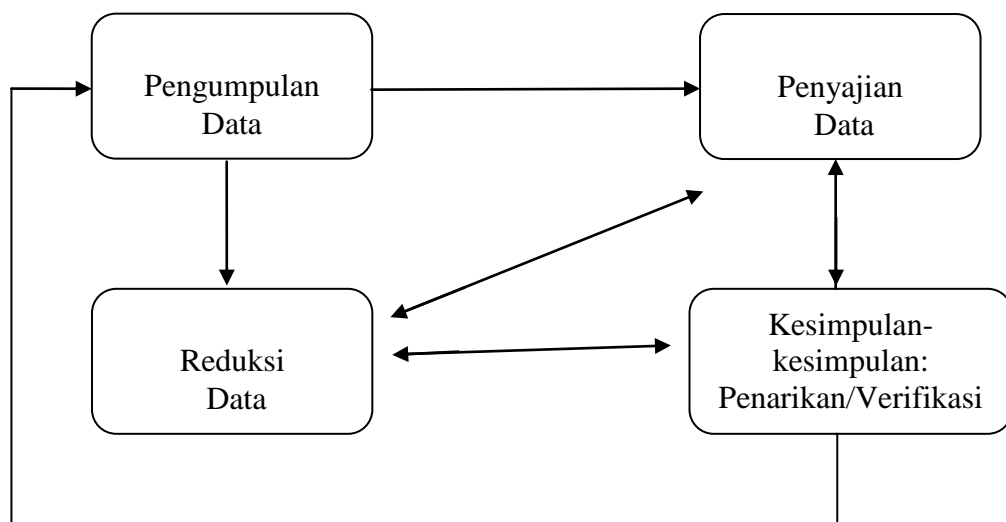
3.8.3 Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penejlasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapana peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun

seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif.”(Miles dan Huberman, 1992:19)

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif,” atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya (Miles dan Huberman, 1992:19).

Gambar 3.1
Teknik Analisis Data



Analisis Data Kualitatif Model Interaktif
(Miles dan Huberman, 1992:20)

3.9 Uji Keabsahan Data

Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, pada penelitian ini digunakan dua cara yaitu triangulasi dan *member check*. Penjelasan, yaitu:

A. Triangulasi

Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Satori dan Komariah, 2010:170-171). Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan ada dua macam yaitu triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2012:127)

B. Pengecekan anggota atau *member check*

Pengecekan anggota berarti peneliti mengumpulkan para peserta yang telah ikut menjadi sumber data dan mengecek kebenaran data dan interpretasinya (Moleong, 2011:336). Hal itu dilakukan dengan jalan: (1) penilaian dilakukan oleh responden; (2) mengoreksi kekeliruan; (3) Menyediakan tambahan informasi secara sukarela; (4) Memasukkan responden dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data; (5) Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

3.10 Jadwal Penelitian

Penelitian yang berjudul “Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016” dimulai sejak observasi awal hingga penelitian ini melalui penyempurnaan sampai sidang skripsi. Adapun penjabaran waktunya dapat dilihat dalam jadwal penelitian berikut ini:

Tabel 3.4
Jadwal dan Waktu Penelitian
Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten
Tahun 2016

No	Kegiatan	Waktu Penelitian																							
		2016												2017											
		M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
A	P	E	U	U	G	E	K	O	E	A	E	A	P	E	U	U	G	E	K	O	E				
		R	R	I	N	L	S	P	T	V	S	N	B	R	R	I	N	L	S	P	T	V	S		
1.	Pengajuan Judul																								
2.	Penetapan Judul																								
3.	Observasi awal																								
4.	Penyusunan Proposal Skripsi																								
5.	Bimbingan Bab I – Bab III																								
6.	Seminar Proposal Skripsi																								
7.	Pengumpulan Data di Lapangan																								
8.	Pengolahan Data di Lapangan																								
9.	Penyusunan Hasil Penelitian																								
10.	Sidang Skripsi																								

Sumber : Peneliti, 2016

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Bagian ini menggambarkan tentang obyek penelitian sebagai kerangka awal dalam memahami obyek penelitian. Adapun gambaran umum dalam penelitian ini meliputi berbagai kondisi yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti misalnya kondisi geografis, kondisi kependudukan, kondisi sosial, dan kondisi ketenagakerjaannya di Provinsi Banten. Berbagai kondisi tersebut ikut melatarbelakangi permasalahan dalam penelitian ini sehingga perlu untuk digambarkan secara jelas.

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Provinsi Banten

1. Kondisi Geografis

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 menyatakan luas wilayah Provinsi Banten adalah 9.662,92 km². Wilayahnya terdiri dari 8 (delapan) daerah otonom yang masing-masing terdiri dari 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Serang (1.734,28 Km²), Kabupaten Pandeglang (2.746,89Km²), Kabupaten Lebak (3.426,56 Km²), dan Kabupaten Tangerang (1.011,86 Km²) dan 4 (empat) Kota yaitu Kota Tangerang (153,93 Km²), Kota Cilegon (175,50 Km²), Kota Serang (266,71 Km²) dan Kota Tangerang Selatan (147,19 Km²). Secara astronomis, wilayah Provinsi Banten terletak antara 05°07'50" sampai dengan 07°01'01" Lintang Selatan dan antara

105°01'11" sampai dengan 106°07'12" Bujur Timur (sumber: <http://banten.bps.go.id>).

Wilayah Provinsi Banten memiliki posisi yang strategis karena di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Berdasarkan posisi tersebut, Provinsi Banten sebagai jalur perhubungan yang strategis memiliki kesempatan untuk memajukan pembangunan di wilayahnya apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat dicapai dengan cara memenuhi kebutuhan dasar penduduknya secara responsif gender.

2. Kondisi Kependudukan

Proyeksi penduduk Provinsi Banten tahun 2015 adalah sebanyak 11.955.243 jiwa yang terdiri dari 6.097.184 jiwa penduduk laki-laki dan 5.858.059 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi yang sebaiknya dikembangkan tidak hanya kepada penduduk laki-laki tetapi juga kepada penduduk perempuan sehingga perlu adanya kesetaraan dan keadilan bagi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dapat dinikmati baik oleh laki-laki maupun perempuan. Berikut tabel jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015 :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Banten Tahun 2015

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jenis Kelamin (jiwa) <i>Sex (people)</i>			Rasio Jenis Kelamin <i>Sex Ratio</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Kabupaten/Regency</i>				
1. Pandeglang	610 412	584 499	1 194 911	104,43
2. Lebak	650 912	618 900	1 269 812	105,17
3. Tangerang	1 724 915	1 645 679	3 370 594	104,81
4. Serang	747 808	726 493	1 474 301	102,93
<i>Kota/Municipality</i>				
1. Tangerang	1 045 113	1 001 992	2 047 105	104,30
2. Cilegon	210 505	201 601	412 106	104,42
3. Serang	329 806	313 399	643 205	105,24
4. Tangerang Selatan	777 713	765 496	1 543 209	101,60
Banten	6 097 184	5 858 059	11 955 243	104,08

Sumber : <http://banten.bps.go.id>, 2016

Dari tabel 4.1 tersebut diketahui bahwa rasio jenis kelamin penduduk di Provinsi Banten paling besar berada di wilayah Kota Serang dengan rasio 105,24 dan paling kecil berada di wilayah Kota Tangerang Selatan. Semakin kecil rasio jenis kelamin maka akan semakin sedikit selisih antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan. Hal ini mengartikan bahwa kegiatan pembangunan tidak bisa hanya ditujukan untuk penduduk laki-laki tetapi juga perlu melibatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari penduduk perempuan. Harapannya, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat mendapat prioritas sesuai kondisi kebutuhan tiap-tiap masyarakat.

3. Kondisi Sosial

Kondisi sosial perlu dikaitkan dengan kualitas hidup masyarakat. UNDP mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mengukur kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Dalam IPM terdapat tiga komponen dasar meliputi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Komponen kesehatan mengukur angka harapan hidup, komponen pendidikan mengukur angka harapan lama sekolah beserta rata-rata lama sekolah sedangkan komponen ekonomi menghitung pengeluaran per kapita masyarakat. Berikut capaian IPM Provinsi Banten Tahun 2014-2015 :

Tabel 4.2

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen Tahun 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
BANTEN	69,13	69,43	12,31	12,35	8,19	8,27	11.150	11.261	69,89	70,27
Pandeglang	62,91	63,51	13,38	13,39	6,45	6,60	7.589	7.730	62,06	62,72
Lebak	65,88	66,28	11,88	11,90	5,84	5,86	7.977	8.111	61,64	62,03
Tangerang	68,98	69,28	11,65	11,89	8,20	8,22	11.666	11.727	69,57	70,05
Serang	63,09	63,59	12,35	12,36	6,69	6,90	9.886	10.004	63,97	64,61
Kota Tangerang	71,09	71,29	12,86	12,90	10,20	10,20	13.671	13.766	75,87	76,08
Kota Cilegon	65,85	66,15	13,07	13,10	9,66	9,67	12.057	12.127	71,57	71,81
Kota Serang	67,23	67,33	12,34	12,36	8,58	8,59	12.091	12.289	70,26	70,51
Kota Tangerang Selatan	72,11	72,12	13,58	13,61	11,56	11,57	14.361	14.588	79,17	79,38
INDONESIA	70,59	70,78	12,39	12,55	7,73	7,84	9.903	10.150	68,90	69,55

Sumber : *E-book* Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016

Tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa tiap komponen IPM mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke 2015 baik itu dalam kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Hanya saja tidak semua daerah memiliki IPM yang sama dengan capaian Provinsi Banten maupun capaian Indonesia. Untuk itulah, kualitas hidup masyarakat Provinsi Banten masih perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat merasakan pembangunan secara adil.

Berkaitan dengan hal tersebut, UNDP kemudian memperkenalkan suatu metode untuk mengukur ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ini diukur berdasarkan *gap* yang terjadi dalam tiap-tiap komponen IPM untuk setiap jenis kelamin. Hal inilah yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG akan memperlihatkan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Semakin mendekati angka 100 maka dapat dikatakan semakin kecil ketimpangan pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan. Berikut capaian IPG Provinsi Banten Tahun 2014-2015 :

Tabel 4.3

**Indeks Pembangunan Gender Provinsi dan Kabupaten/Kota
Menurut Komponen Tahun 2015**

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
BANTEN	67,54	71,41	12,30	12,47	8,86	7,66	16.093	9.729	74,59	67,96	91,11
Pandeglang	61,63	65,28	13,11	13,80	7,12	6,07	12.497	5.458	67,99	58,39	85,88
Lebak	64,35	68,11	12,06	11,72	6,39	5,29	12.210	3.759	67,02	52,14	77,80
Tangerang	67,29	71,16	11,92	11,80	8,58	7,43	16.972	10.188	74,16	67,28	90,72
Serang	61,71	65,36	12,05	12,79	7,58	6,23	14.304	9.146	68,67	63,02	91,77
Kota Tangerang	69,26	73,20	13,05	12,82	10,78	9,65	17.863	13.543	79,64	74,88	94,03
Kota Cilegon	64,22	67,97	12,67	14,58	10,32	8,48	19.233	7.397	76,67	66,43	86,64
Kota Serang	65,39	69,18	12,54	12,31	9,33	7,84	17.627	11.658	75,17	68,70	91,40
Kota Tangerang Selatan	70,06	74,06	13,74	13,54	11,70	10,61	20.498	13.873	83,12	77,42	93,14
INDONESIA	68,93	72,78	12,42	12,68	8,35	7,35	14.163	8.464	73,58	66,98	91,03

Sumber : *E-book* Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat ketimpangan pencapaian pembangunan di Provinsi Banten. Ketimpangan gender ini memperlihatkan ada 4 (empat) daerah yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon yang mengalami pencapaian IPG di bawah pencapaian Provinsi Banten sehingga Provinsi Banten memerlukan adanya perencanaan anggaran yang responsif gender. Selain itu, ada pula metode untuk menampilkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, ranah politik dan ekonomi melalui komponen-komponen yang ada dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berikut tabel IDG Provinsi Banten Tahun 2015 :

Tabel 4.4

**Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi dan Kabupaten/Kota
Menurut Komponen Tahun 2015**

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BANTEN	18,82	41,32	30,34	67,94
Pandeglang	12,00	47,57	29,54	61,47
Lebak	14,00	35,10	30,91	62,27
Tangerang	14,00	43,81	27,88	62,54
Serang	14,00	37,32	25,82	58,32
Kota Tangerang	18,00	41,76	31,66	69,16
Kota Cilegon	11,43	43,90	20,32	52,66
Kota Serang	15,56	40,86	27,09	62,88
Kota Tangerang Selatan	18,00	41,60	25,37	63,17
INDONESIA	17,32	46,03	36,03	70,83

Sumber : *E-book* Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016

Dari tabel 4.4 ini menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di parlemen di Provinsi Banten sebesar 18,82 % sudah di atas capaian Indonesia secara umum meskipun begitu Provinsi Banten belum memenuhi aturan kuota keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30%. Capaian partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional di Provinsi Banten rata-rata sudah di atas 40% yang berarti kesempatan sudah terbuka bagi perempuan dalam hal manajerial namun di Kabupaten Lebak dan Kota Serang masih rendah capaiannya. Meskipun begitu, kontribusi perempuan dalam pendapatan kerja masih minim.

4. Kondisi Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja pada penduduk 15 tahun keatas yaitu 82,06% penduduk laki-laki dan 41,67% penduduk perempuan. Persentase tersebut menyatakan bahwa perempuan mulai terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Berikut tabel yang menampilkan di bidang apa sajakah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan terlibat dalam kegiatan utama perekonomian :

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Banten Tahun 2015

Lapangan Pekerjaan Utama <i>Main Industry</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	436.265	191.782	628.047
2	27.751	2.247	29.998
3	788.276	410.490	1.198.766
4	22.415	1.004	23.419
5	274.800	12.195	286.995
6	669.434	520.474	1.189.908
7	334.755	24.458	359.213
8	224.927	59.195	284.122
9	467.602	357.390	824.992
Jumlah/Total	3.246.225	1.579.235	4.825.460
Keterangan : 1 Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan 2 Pertambangan dan penggalian 3 Industri pengolahan 4 Listrik, Gas dan Air 5 Bangunan 6 Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel 7 Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi 8 Keuangan, Asuransi, Usaha Perawatan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan 9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan			

Sumber : <http://banten.bps.go.id>, 2016

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu sebesar 3.246.225 jiwa penduduk laki-laki cenderung terlibat secara hampir merata di segala bidang pekerjaan karena berkaitan konstruksi budaya yang berkembang di masyarakat yang mengatakan pencari nafkah adalah laki-laki sedangkan penduduk perempuan yang terlibat dalam perekonomian hanya setengahnya dari jumlah penduduk laki-laki berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu dan umumnya penduduk perempuan memilih bidang pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan dan hanya sedikit jumlah penduduk perempuan yang berada di ranah pertambangan dan penggalian serta listrik, gas dan air.

4.2 Deskripsi Data

Bagian ini merupakan penggambaran dari analisis data yang telah dilakukan sejak menyusun latar belakang masalah. Adapun deskripsi data dalam penelitian ini dimulai dengan bahasan mengenai informan penelitian yang dilanjutkan dengan penggambaran hasil penelitian berdasarkan indikator teori. Dengan demikian, setelah data melalui proses pendeskripsian maka dapat dilakukan pembahasan atas rangkaian data-data tersebut.

4.2.1 Deskripsi Informan

Penentuan informan dilakukan secara purposif sesuai peran dan fungsinya dalam Perencanaan Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 dengan melakukan interpretasi dan interaksi dengan data maupun informan. Berikut informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang diantaranya yaitu:

Tabel 4.6
Kode Informan Penelitian

No .	Jenis Informan	Kode Informan	Kategori Informan	Peran dan Fungsi
1.	Kelompok Kerja Pengarus-utamaan Gender (Pokja PUG)	I ₁₋₁	Bappeda Provinsi Banten	Ketua Kelompok Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten
2.		I ₁₋₂	BPPMD Provinsi Banten	Sekretaris Kelompok Pengarusutamaan Gender (Berrperan dalam bantuan teknis substansi PUG)
3.	Lembaga Eksekutif	I ₂₋₁	Dinas Sosial	Pelaksana sekaligus perencana program dan kegiatan responsif gender
4.		I ₂₋₂	Disnakertrans	Pelaksana sekaligus perencana program dan kegiatan responsif gender
5.		I ₂₋₃	DBMTR	Pelaksana sekaligus perencana program dan kegiatan responsif gender
6.		I ₂₋₄	DSDAP	Pelaksana sekaligus perencana program dan kegiatan responsif gender
7.		I ₂₋₅	Badan Ketahanan Pangan	Pelaksana sekaligus perencana program dan kegiatan responsif gender
8.		I ₂₋₆	Satpol PP	Pelaksana sekaligus perencana program dan kegiatan responsif gender
9.		I ₂₋₇	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pelaksana sekaligus perencana program dan kegiatan responsif gender
10.	Lembaga Legislatif	I ₃₋₁	Anggota Fraksi Gerindra	Penghubung antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah sebagai pelaksana kegiatan masyarakat
11.		I ₃₋₂	Ketua Kauskus Parlemen Perempuan	Ikut andil dalam menyuarakan aspirasi yang berkaitan dengan hak-hak perempuan
12.	Masyarakat	I ₄₋₁	PATTIRO Provinsi Banten	LSM yang fokus terhadap anggaran responsif gender di Provinsi Banten

Sumber: Peneliti, 2017

4.2.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Tahap ini merupakan proses interpretasi hasil analisis data. Dalam interpretasi hasil analisis data, penulis menafsirkan hasil akhir dari uji data dengan teori serta konsep para ahli yang kemudian muncul suatu fenomena baru atau perkembangan teori atau bahkan teori yang baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang mana data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan dokumentasi. Peneliti menganalisa data-data tersebut menggunakan teori Miles dan Huberman (2009:20) yang terdiri dari 4 (empat) aktivitas utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk mempermudah dalam menganalisis data, peneliti melakukan reduksi data dengan memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu sebagai berikut:

Kode Q₁, Q₂, Q₃ dan seterusnya yang menandakan daftar urutan pertanyaan

Kode I₁, I₂, I₃ dan seterusnya menandakan urutan informan

Tahap selanjutnya yaitu menyajikan data dalam bentuk teks naratif, bagan, matriks, hubungan antar kategori, *network*, *flowchart* dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan dilakukan apabila peneliti selesai mendapatkan data jenuh yang berarti telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang perencanaan anggaran responsif gender dalam APBD tahun 2016 yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Menurut Athoillah (2010:108)

terdapat 4 (empat) indikator yang dapat digunakan dalam proses perencanaan yaitu menetapkan sasaran atau perangkat tujuan, menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang, mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat, serta mengembangkan rencana dan menjabarkannya. Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan permasalahan mengenai Perencanaan Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016.

4.2.2.1 Menetapkan Sasaran atau Perangkat Tujuan ARG Tahun 2016

Sasaran atau tujuan merupakan bagian terpenting dari perencanaan karena tanpa menetapkan tujuan maka pelaksanaan akan menjadi tidak ada artinya. Tujuan organisasi di ranah publik yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga dalam merencanakan anggaran bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat di lingkungan masyarakat. Untuk itulah, penulis akan mendeskripsikan bagaimana Pemerintah Provinsi Banten menetapkan sasaran atau perangkat tujuan dari anggaran responsif gender dalam APBD Tahun 2016.

Dalam menetapkan sasaran atau perangkat tujuan ini berkaitan dengan penentuan kebutuhan. Kebutuhan yang dianggarkan secara responsif gender dapat diketahui melalui analisis gender dan Provinsi Banten telah mengaturnya dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Di Provinsi Banten. Di dalamnya

dibahas bagaimana mengidentifikasi kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan gender masyarakat Provinsi Banten melalui analisis gender. Hal ini termuat dalam Bab II Konsep Pengarusutamaan Gender pada poin III Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender menyebutkan bahwa :

“Untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan maka digunakanlah analisis gender.”

Berdasarkan isi Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Di Provinsi Banten Bab II Konsep Pengarusutamaan Gender pada poin III dapat diketahui bahwa program atau kegiatan yang ditetapkan adalah untuk mengatasi kesenjangan gender sehingga analisis gender digunakan untuk mengetahui kebutuhan yang responsif gender di masyarakat. Jadi, perencana mengetahui terlebih dahulu kesenjangan gender yang telah terjadi kemudian dilakukan analisis gender untuk menetapkan program atau kegiatan yang relevan dalam mengatasi permasalahan gender tersebut. Ketika analisis gender telah dilakukan maka dapat ditetapkan program atau kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan perempuan, laki-laki atau pun yang terkena dampak kesenjangan gender.

Sebelum dilakukan analisis gender, Bappeda Provinsi Banten Bidang Sosial Kemasyarakatan mengarahkan Kepala Sub Bidang Program SKPD agar program-program berkaitan dengan responsif gender maka dari itu bagian program SKPD menindaklanjutinya dengan menyampaikan ke

bidang-bidang teknis yang ada di SKPD bahwa program-program yang disusun harus responsif gender. Pernyataan disampaikan oleh staf bidang PEP DBMTR Provinsi Banten (I₂₋₃) :

“Ketika rapat koordinasi saya yang menghadiri lalu saya menyampaikan hasil rapat ke pimpinan saya (Kasubbid PEP). Saat membuat anggaran, di sini (DBMTR) dibahas oleh Kepala Sub Bidang PEP bahwa anggaran harus berkaitan dengan responsif gender. Ini disampaikan kepada bidang-bidang teknis saat rapat pembahasan anggaran.” (Wawancara dengan informan I₂₋₃ Selasa, 09 Agustus 2016 pukul 14.49 WIB di Ruang Bidang PEP)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam proses perencanaan anggaran di SKPD tersebut telah disampaikan kepada bidang-bidang teknis mengenai program dan kegiatan dihibau untuk memiliki kegiatan responsif gender. Namun penulis mengobservasi, setelah himbuan menyusun kegiatan responsif gender disampaikan saat rancangan pembahasan anggaran di masing-masing SKPD, hanya beberapa SKPD yang memberikan *feedback* berupa bukti telah merencanakan kegiatan responsif gender yang dapat dipenuhi oleh masing-masing SKPD. Menanggapi hal ini pernyataan lalu diutarakan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten :

“Beberapa SKPD telah merespon untuk mengumpulkan GAP, GBS (Gender Budget Statement)nya meskipun belum tepat waktu sesuai proses rancangan anggaran” (Wawancara dengan informan I₁₋₂, Selasa, 28 Juni 2016 pukul 14.35 WIB di Ruang Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten, penulis mengetahui bahwa beberapa SKPD telah mengumpulkan hasil

analisis gender tetapi belum tepat waktu sesuai alur perencanaan penganggaran. Penulis mengkaji apa yang disampaikan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup dalam wawancara dengan apa yang tertera di dalam Pergub Nomor 80 Tahun 2014 mengenai poin pelaksanaan analisis gender dilakukan setiap tahunnya sejak proses menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau minimalnya dilakukan saat penyusunan rencana kerja SKPD sehingga pada waktu asistensi Rencana Kerja dan Anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), SKPD dapat menyertakan hasil analisis gender pada saat asistensi tersebut namun saat asistensi RKA SKPD, belum ada yang melampirkan dokumen responsif gender tersebut.

Kendala terbesar dalam pengumpulan dokumen dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, SKPD sebagai pihak yang merencanakan program dan kegiatan serta wajib mengumpulkan dokumen responsif gender memiliki kendala dengan pimpinan yang belum memahami persoalan gender sehingga dokumen responsif gender belum dapat disusun dan di sisi lainnya, BPPMD sebagai pihak pengumpul dokumen responsif gender memiliki kendala dalam menghadapi SKPD yang kurang aktif dalam memberikan tanggapan ketika diminta mengumpulkan dokumen responsif gender.

Dokumen responsif gender disusun saat proses perencanaan anggaran responsif gender melalui analisis gender. Berdasarkan isi Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan

Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Di Provinsi Banten, analisis gender dilakukan setiap tahunnya saat perencanaan anggaran berlangsung. Adapun analisis gender menggunakan metode GAP (*Gender Analysis Pathway*) yang terdiri dari 9 (sembilan) langkah yaitu:

- Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang sangat prioritas, *service delivery*, atau yang berhubungan dengan capaian SDGs
- Langkah 2. Data Pembuka Wawasan
- Langkah 3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender
- Langkah 4. Menemukanali Sebab Kesenjangan Gender (Internal Lembaga)
- Langkah 5. Menemukanali Sebab Kesenjangan Gender (Eksternal Lembaga)
- Langkah 6. Reformulasi Tujuan
- Langkah 7. Rencana Aksi
- Langkah 8. Data dasar (*base-line data*)
- Langkah 9. Menetapkan indikator gender

Sumber : Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah Tahun (2015:40)

Setelah dilakukan analisis gender menggunakan GAP tersebut dilanjutkan dengan menyusun GBS (*Gender Budget Statement*). Penyusunan GBS bertujuan untuk menginformasikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat menghasilkan *output* kegiatan yang responsif gender dan dapat mengatasi permasalahan gender. Selanjutnya yaitu penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang memuat rincian kegiatan yang responsif gender yang akan dilakukan. Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten mengatakan tentang proses analisis gender yang dilakukan di Provinsi Banten, berikut hasil wawancaranya :

“Kegiatan yang responsif gender bukan alasan untuk menambah anggaran kegiatan yang baru tetapi kegiatan yang sudah dibuat dianalisis gender, seperti itu mekanismenya” (Wawancara dengan

informan I₁₋₂, Selasa, 28 Juni 2016 pukul 14.35 WIB di Ruang Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten bahwa proses perencanaan anggaran responsif gender bukan alasan bagi SKPD untuk meminta anggaran baru karena mekanisme analisis gender dimulai dengan kegiatan yang sudah ada lalu dianalisis secara responsif gender. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan urutan proses analisis gender menggunakan *Gender Analysis Pathway* yang pada poin pertama dimulai dengan nama kegiatan lalu diakhiri dengan manfaat yang didapat oleh masyarakat terdampak kesenjangan gender akan tetapi sebelum mencantumkan nama kegiatan dalam proses analisis gender, perencana sudah memiliki data terpilah gender sehingga program atau kegiatan yang dipilih merupakan sarana untuk menyelesaikan kesenjangan gender yang ada di Provinsi Banten namun faktanya di lapangan proses analisis gender belum ideal sesuai yang diharapkan. Berikut fakta yang didapat melalui wawancara dengan salah satu informan di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten yang telah mendapat pelatihan Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG :

“Kemarin saya menganalisis dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Sebelum adanya DPA, semua bidang di sini (DBMTR) telah mengumpulkan kegiatan yang direncanakan kepada kami bidang PEP. Jadi, dari DPA ini, Saya melihat kegiatan-kegiatan yang ada di Bina Marga, dilihat mana yang memiliki hubungan dengan gender sambil juga bertanya pada pihak BPPMD dan saya juga sempat mencari contoh kegiatan responsif gender Bina Marga di internet. Akhirnya kita memilih pembangunan jalan sebagai kegiatan responsif gender dan kalau dikaitkan dengan gender ya pembangunan jalan bisa sebagai penghubung akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi, pokoknya dihubungkan saja dengan gender meski secara spesifik

belum dapat menampilkan data seperti berapa jiwa yang melewati jalan tersebut dalam akses pendidikan, kesehatan” (Wawancara dengan informan I₂₋₃ Selasa, 09 Agustus 2016 pukul 14.49 WIB di Ruang Bidang PEP)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten yang telah mendapat pelatihan Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG bahwa proses analisis gender dilakukan dengan mengamati secara seksama pada DPA Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Tahun 2016 sembari berkonsultasi dengan pihak BPPMD Provinsi Banten dan melihat contoh kegiatan responsif gender yang ada di situs internet kemudian informan tersebut mendapat ide untuk menjadikan pemeliharaan jalan Palima menjadi kegiatan yang responsif gender dengan *output* responsif gendernya yaitu menghubungkan akses dalam pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Penulis mengobservasi bahwa data terpilah gender yang dipergunakan oleh informan tersebut berdasarkan pengetahuan informan tentang kegiatan pemeliharaan jalan dengan manfaat gendernya. Pengetahuan itu didapat dari pelatihan yang pernah diikuti, konsultasi dengan pihak BPPMD Provinsi Banten yang menangani pelatihan Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG dan juga didapat dari referensi di situs internet.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis kebutuhan gender di Provinsi Banten ini memiliki pola *top-down* maksudnya yaitu dengan melihat terlebih dahulu memilih program atau kegiatannya yang memiliki keterkaitan dengan gender kemudian dicari data ketimpangan yang memungkinkan untuk dilihat responsif gendernya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya program dan

kegiatannya tidak diperuntukkan dalam mengatasi kesenjangan gender tetapi karena diminta membuat analisis gender jadi disiasati agar kegiatan itu terlihat responsif gender namun tidak mengubah apa yang telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Jika hal ini dikaitkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Di Provinsi Banten yang menyatakan bahwa dalam penetapan kegiatan responsif gender terlebih dahulu melihat data kesenjangan gendernya sehingga dalam proses menentukan kebutuhan masyarakat di Provinsi Banten menjadi tepat sasaran. Berikut program dan kegiatan dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2016 yang telah dianalisis gender oleh SKPD di Provinsi Banten tahun 2016 yaitu :

Tabel 4.7

**Program dan Kegiatan Responsif Gender Provinsi Banten
Tahun 2016**

NO.	UNIT KERJA	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DINAS SOSIAL	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Dan Keagamaan	Pembinaan Tugas TKSK	1.983.763.000,00
2.	DINAS KESEHATAN	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	807.865.000,00
3.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Kepemudaan Kepramukaan	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	266.657.000,00
4.	RSUD MALINGPING	Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin	355.590.000,00
5.	SATPOL PP	Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.430.860.000,00

			Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan	115.574.000,00
				115.604.000,00
				283.888.000,00
				71.042.000,00
			Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas	499.890.000,00
				372.025.000,00
				371.900.000,00
			Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	42.828.000,00
6.	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	42.825.000,00
7.	DINAS PENDIDIKAN	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	449.957.000,00
8.	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	72.866.000,00
9.	DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak	24.297.940.400,00
			Pembangunan Jalan Tahun Jamak	160.988.750.035,56
10.	BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar	2.100.000,00
11.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak)	777.145.000,00
12.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	1.100.000.000,00

13.	BAPPEDA	Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Gender	340.180.000,00
14.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peningkatan Daya Saing Dan Pemasaran Produk Perikanan, Perikanan, Pertanian, Dan Perkebunan	Diversifikasi Produk Perikanan	600.000.000,00
15.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DESA	Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender	1.000.000.000,00
			Fasilitasi Peingkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	500.000.000,00
			Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	900.000.000,00
			Kependudukan dan Keluarga Berencana	Fasilitasi Peningkatan Program Keluarga Berencana
16.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Diklat Struktural Bagi PNS Daerah	840.229.000,00
Total				199.129.478.435,56

Sumber : BPPMD Provinsi Banten, 2016

Dari tabel 4.7 tersebut menampilkan 17 SKPD yang telah melakukan analisis gender dan telah memiliki program dan kegiatan yang responsif gender dan besaran anggaran responsif gender paling besar dari program dan kegiatan tersebut dialokasikan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten yang berjumlah Rp 185.286.690.435,- dan besaran anggaran responsif gender paling kecil dari program dan kegiatan tersebut dialokasikan oleh Sekretariat Daerah Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten sebesar Rp 2.100.000. Hal ini mengartikan bahwa dengan

lebih besarnya anggaran untuk gender maka SKPD tersebut menunjukkan perhatian yang lebih besar kepada kesenjangan gender yaitu untuk infrastruktur namun proses analisis gender yang belum sesuai harapan mengakibatkan pencapaian tujuan keadilan dan kesetaraan gender menjadi terhambat.

4.2.2.2 Menentukan Keadaan, Situasi dan Kondisi ARG Tahun 2016

Situasi saat ini perlu diperhatikan sehingga rencana dapat disusun sesuai gambaran saat ini. Situasi ini dilihat dari posisi organisasi saat ini berada dari tujuan yang hendak dicapai. Selain itu, mengukur kemampuan organisasi berdasarkan sumber daya yang dimiliki saat ini. Dengan demikian, organisasi akan dapat menentukan gambaran keadaan organisasi saat ini. Berdasarkan hal tersebut, untuk merencanakan anggaran responsif gender perlu dilihat bagaimana situasi saat ini dan sejauh mana kemampuan yang dimiliki Provinsi Banten.

Provinsi Banten merupakan pionir dalam Perda Pengarusutamaan Gender. Idealnya, capaian pembangunan gendernya sudah dapat menjadikan Provinsi Banten sebagai daerah yang responsif gender terutamanya dilihat dari alokasi anggaran responsif gender. Provinsi Banten menyatakan bahwa segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender dibebankan kepada APBD Provinsi Banten diupayakan minimal 5% (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah).

Dalam rangka memenuhi persentase minimal anggaran responsif gender sebesar 5% maka Pemerintah Provinsi Banten menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Di Provinsi Banten Bab II Konsep Pengarusutamaan Gender pada poin III Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang menyebutkan bahwa:

“Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan responsif gender dan anggaran responsif gender pada Penerapan PRG dan ARG fokus pada program dan kebijakan dalam rangka:a.) Penugasan prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas pembangunan nasional dan pencapaian *MDG's*;b.) Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*) berdasarkan pencapaian SPM; dan/atau; c.) Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Berdasarkan poin III pada Bab II di dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Di Provinsi Banten ini dapat diketahui bahwa penerapan anggaran responsif gender difokuskan pada penugasan prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas pembangunan nasional dan pencapaian *MDG's*, pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*) berdasarkan pencapaian SPM; dan/atau, pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Adapun tema pembangunan daerah Provinsi Banten pada tahun 2016 yaitu “*Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing SDM Untuk Kesejahteraan Rakyat yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian dan Berkeadilan*” dan komponen prioritas pembangunan di Provinsi Banten antara lain:

- (1) Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran;
- (2) Perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan antisipasi kerawanan sosial;
- (3) Pemantapan ketahanan pangan;
- (4) Peningkatan daya saing, pemasaran investasi dan komoditas;
- (5) Peningkatan konektivitas dan daya dukung kawasan pusat pertumbuhan;
- (6) Peningkatan kapasitas pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja;
- (7) Optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan dan integrasi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- (8) Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi, serta adaptasi bencana;
- (9) Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah;
- (10) Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kondusivitas masyarakat.

10 isu pembangunan daerah Provinsi Banten menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD di tahun 2016. Dalam perencanaan anggaran yang responsif gender, SKPD diamanati oleh Sekretaris Daerah untuk membuat minimal satu kegiatan responsif gender dari Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Berikut pernyataan melalui wawancara dengan Kepala Bidang PUG dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten (I₁₋₂) :

“Surat edaran dari Bapak Sekretaris Daerah sudah turun (ke seluruh SKPD) dan GAP (Gender Analysis Pathway), GBS (Gender Budget Statement) yang baru masuk ke BPPMD ada 15 SKPD, targetnya semua SKPD paling telat mengumpulkan saat pertengahan Juli.” (Wawancara dengan informan I₁₋₂, Selasa, 28 Juni 2016 pukul 14.35 WIB di Ruang Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup)

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten bahwa seluruh SKPD telah mendapat surat edaran dari Sekretaris Daerah untuk menyusun kegiatan responsif gender di setiap SKPD dan dokumen responsif gender yang baru diterima oleh BPPMD berjumlah 15 SKPD dari

40 SKPD per tanggal 28 Juni 2016 sedangkan menurut Kabid PUG dan Kualitas Hidup menghimbau SKPD lainnya paling lambat mengumpulkan dokumen responsif gender saat pertengahan Juli 2016.

Adapun pada saat akhir Juli 2016, dokumen responsif gender yang telah diterima oleh BPPMD Provinsi Banten totalnya berjumlah 17 SKPD. Hal ini berarti sebanyak 25 SKPD tidak mengumpulkan dokumen responsif gender. Berikut pernyataan dari Kabid PUG dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten (I₁₋₂) melalui wawancara :

“Kita memang mengejar target untuk seluruh SKPD agar mengumpulkan GAP (Gender Analysis Pathway), GBS (Gender Budget Statement)nya tetapi ternyata itu tidak bisa tercapai sedangkan kita ada penilaian APE oleh KPPPA, mau tidak mau kita yang menyusun dokumen responsif gendernya SKPD yang belum mengumpulkan.”(Wawancara dengan informan I₁₋₂, Jum’at, 29 Juli 2016 pukul 13.37 WIB di Ruang Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten bahwa target untuk semua SKPD agar mengumpulkan dokumen responsif gender paling lambat bulan Juli 2016 tidak dapat tercapai sehingga staf di bidang pengarusutamaan gender dan kualitas hidup BPPMD Provinsi Banten menyusun dokumen responsif gender SKPD-SKPD yang belum mengumpulkan. Hal ini dilakukan karena akan ada penilaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berikut daftar nama SKPD di Provinsi Banten yang telah mengumpulkan dokumen anggaran responsif gender tahun 2015-2016 :

Tabel 4.8

**DAFTAR NAMA SKPD DI PROVINSI BANTEN YANG TELAH
MENGUMPULKAN DOKUMEN RESPONSIF GENDER
TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016**

No.	Nama SKPD	Tahun 2015		Tahun 2016	
		ARG (Rp)	% APBD	ARG (Rp)	% APBD
1	DBMTR	50.476.278.766	0,69%	185.286.690.435	2,14%
2	BPAD	580.950.000	0,01%	42.825.000	0,00%
3	Dindik	518.620.000	0,01%	449.957.000	0,01%
4	Dispora	1.950.000	0,00%	266.657.000	0,00%
5	Satpol PP	1.492.794.000	0,02%	3.303.611.000	0,04%
6	Distamben	4.458.024.500	0,06%	777.145.000	0,01%
7	BPPMD	2.900.000.000	0,04%	2.900.000.000	0,03%
8	RSUD Malingping	61.600.000	0,00%	355.590.000	0,00%
9	Disbudpar	124.171.450	0,00%	-	0,00%
10	Dinsos	-	-	1.983.763.000	0,02%
11	Dinkes	-	-	807.865.000	0,01%
12	Distanak	-	-	72.866.000	0,00%
13	Biro Ekbang	-	-	2.100.000	0,00%
14	Disnaker-trans	-	-	1.100.000.000	0,01%
15	Bappeda	-	-	340.180.000	0,00%
16	DKP	-	-	600.000.000	0,01%
17	Badan Diklat	-	-	840.229.000	0,01%
	TOTAL	60.614.388.716	0,83%	199.129.478.435	2,30%
	Syarat ARG 5% dari APBD	5% * Rp 7.328.220.769.427 = Rp 366.411.038.471		5% * Rp 8.656.395.495.445 = Rp 432.819.774.772	

Sumber : Data diolah penulis dari BPPMD Prov. Banten, DPPKD Prov.Banten, Bappeda Prov. Banten, 2017

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015, ARG Provinsi Banten mencapai 0,83% sedangkan pada tahun 2016 sebesar 2,30%. ARG pada tahun 2015 maupun ARG pada tahun 2016 tidak dapat mencapai 5% dari APBD meskipun persentase ARGnya mengalami kenaikan. Hal ini berarti Provinsi Banten belum fokus untuk menyelesaikan ketimpangan gender yang ada di Provinsi Banten. Penulis mengkonfirmasi kepada SKPD yang belum menyusun dokumen responsif gender. Pernyataan dari pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang juga telah mengikuti Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG Tahun 2016 namun belum mengumpulkan dokumen responsif gender, berikut wawancara dengan informan tersebut (I₂₋₇) :

“Saya sudah membuat namun rasanya kurang pas karena kita diharuskan mencari kegiatan yang kira-kira responsif gender di dalam anggaran kita yang kemudian dicari-cari data terpilah gender yang memungkinkan dengan kegiatan tersebut tetapi sebenarnya anggaran responsif gender tidak ada dalam anggaran kita sehingga saya berpikir ini kurang tepat jika tiba-tiba kegiatan ini tujuannya untuk mengurangi kesenjangan gender yang ada.” (Wawancara dengan informan I₂₋₇, Senin, 22 Mei 2017 pukul 12.33 WIB di Ruang Tamu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang juga telah mengikuti Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG Tahun 2016 ini mengkonfirmasi bahwa dirinya telah membuat dokumen responsif gender akan tetapi merasa kurang tepat jika mengumpulkan dokumen anggaran responsif gender yang sebenarnya tidak ada keterangan responsif gender dalam salah satu kegiatan yang dianggarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Penulis mencocokkan dengan data

dokumen responsif gender yang ada di BPPMD Provinsi Banten, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya mengumpulkan dokumen anggaran tahun 2015. Pernyataan tentang kegiatan responsif gender tersebut diperkuat oleh salah satu pegawai dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten (I₂₋₅) yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG Tahun 2016 melalui wawancara sebagai berikut :

“Untuk anggaran responsif gender kami belum membuat karena pada waktu tahun 2016 belum ada pengajuan anggaran ke arah gender. Hal ini dikarenakan menurut atasan kami anggaran gender belum menjadi prioritas ketika membahas anggaran di badan ketahanan pangan. Kami fokusnya memang bukan responsif gender tetapi kalau kegiatan kami dikait-kaitkan dengan responsif gender memang ada misalnya seperti pelatihan membuat pangan untuk ibu-ibu.”(Wawancara dengan informan I₂₋₅, Jum’at, 26 Mei 2017 pukul 8.30 WIB di Ruang Tamu Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten)

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG Tahun 2016 bahwa ia tidak mengumpulkan dokumen anggaran responsif gender karena tidak ada pengajuan anggaran untuk gender dan pengajuan anggaran responsif gender belum menjadi prioritas di Badan Ketahanan Pangan berdasarkan pembahasan internal Badan Ketahanan Pangan dengan pimpinan.

Wawancara dengan Informan yaitu staf di Bidang PEP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan staf di Bidang Umum Dinas Badan Ketahanan Pangan tersebut menunjukkan bahwa di instansinya belum memprioritaskan fokusnya kegiatan responsif gender sehingga tidak dapat memenuhi permintaan untuk mengumpulkan dokumen responsif gender

karena memang tidak tercantum di dalam Rencana Kerja SKPD masing-masing.

Selain itu, terdapat SKPD yang hanya menyebutkan nominal anggaran responsif gendernya tanpa menyusun dokumen perencanaannya. Besaran anggaran responsif gendernya yaitu Rp3.303.611.000,- dengan persentase anggaran responsif gender dalam APBD sebesar 0,04%. Berikut hasil wawancara dengan salah satu pegawai Satpol PP yang pernah mengikuti Bimbingan Teknis Fasilitator Tahun 2016 (I₂₋₆) menyatakan bahwa :

“Saya menyerahkan kepada BPPMD, Renja yang sudah saya pilah yang kira-kira memiliki keterkaitan dengan responsif gender. Saya belum menyusun TOR gender dan sebagainya karena itu tidak tercantum dalam DPA dan ketika itu anggaran gender ini pernah saya ajukan ternyata tidak disetujui oleh atasan sebab belum menjadi prioritas di Satpol PP”(Wawancara dengan informan I₂₋₆, Rabu, 21 Juni 2017 pukul 12.32 WIB di Ruang Bidang Pemadam Kebakaran)

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari salah satu Pegawai Satpol PP yang pernah mengikuti Bimbingan Teknis Fasilitator Tahun 2016 bahwa beliau hanya memberikan Renja beberapa kegiatan di Satpol PP yang menurutnya memiliki keterkaitan dengan responsif gender karena sebenarnya dalam anggaran Satpol PP belum terdapat alokasi anggaran untuk responsif gender dan saat pengajuan pun tidak disetujui oleh atasan karena belum menjadi prioritas di Satpol PP.

Penulis mengkaji hasil wawancara tersebut bahwa perencanaan anggaran responsif gender ini berkaitan dengan persetujuan dari pimpinan karena pimpinan bertanggung jawab sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). PPTK tidak mendapat pengetahuan dari pelatihan responsif gender

dan PPTK meminta staf untuk mewakili SKPDnya mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG akan tetapi ketika staf yang dilatih tersebut kembali ke kantor dan menjelaskan tentang kegiatan responsif gender kepada pimpinannya, kegiatan responsif gender malah dianggap belum prioritas di SKPD tersebut.

Adapun masalah kesenjangan gender tidak bisa diselesaikan jika hanya melibatkan satu sektor SKPD tetapi memerlukan keterlibatan dari berbagai sektor SKPD namun saat ini penyelesaian masalah kesenjangan gender belum terpadu antar SKPD dan masih diselesaikan secara parsial sesuai kewenangan SKPD. Penulis menganalisis dari kegiatan responsif gender yang telah direncanakan oleh SKPD-SKPD yang ada di Provinsi Banten. Terdapat 17 SKPD yang telah melakukan analisis gender. Analisis gender yang digunakan dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan direkomendasikan oleh Inpres Nomor 9 tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 adalah GAP (*Gender Analysis Pathway*). Pada dasarnya, GAP ini menganut manajemen berbasis kinerja yang mana pada langkah 1-5 sebagai langkah analisis sedangkan langkah 6-9 merupakan langkah untuk mengukur kerangka kinerja pada rencana aksi yang dirumuskan. Langkah-langkah analisis gender melalui metode GAP (*Gender Analysis Pathway*) ini terdiri dari 9 langkah yakni :

- Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis-Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan;
- Langkah 2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin – Identifikasi Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (Kuantitatif dan Kualitatif);

- Langkah 3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan;
- Langkah 4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi;
- Langkah 5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga;
- Langkah 6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan;
- Langkah 7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender;
- Langkah 8. Tetapkan *Baseline*;
- Langkah 9. Tetapkan indikator gender;

Sumber : Modul *Training of Fasilitator* Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Daerah (2013 : 63)

Berikut perencanaan anggaran responsif gender dari setiap SKPD yang telah menyusun dokumen responsif gender dan kesesuaiannya dengan tema pembangunan daerah Provinsi Banten :

1. Dinas Kesehatan (Dinkes)

Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis-Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan;

Program : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Kegiatan : Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Tujuan :-Menurunkan AKI dan AKB; Meningkatkan persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;
-Meningkatkan cakupan kunjungan neonatal utama (KN1)

Langkah 2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin (Kuantitatif dan Kualitatif);

Data Umum : Masih tingginya AKI dan AKB tahun 2015;

Langkah 3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan;

Akses : Belum meratanya akses layanan kesehatan bagi ibu hamil

Partisipasi : Kurangnya partisipasi dalam pembangunan kesehatan

Kontrol : Kurangnya pengawasan terhadap ibu hamil

Manfaat : Belum meratanya manfaat layanan kesehatan ibu hamil

Langkah 4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi;

Jauhnya fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil

Langkah 5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga;

Kepercayaan masyarakat dalam pemeriksaan kehamilan dan kelahiran terhadap dukun paraji

Langkah 6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan;

Menurunkan AKI dan AKB dengan memperhatikan tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi (laki-laki dan perempuan)

Langkah 7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender;

-Orientasi Pelayanan dan Nifas di fasilitas kesehatan

-Optimalisasi program P4K dalam penurunan jumlah AKI & AKB di Provinsi Banten

Langkah 8. Tetapkan *Baseline*;

Menurunkan AKI dan AKB Tahun 2016 karena masih tingginya AKI dan AKB tahun 2015

Langkah 9. Tetapkan indikator gender;

-Menurunkan AKI dan AKB;

-Meningkatkan persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;

-Meningkatkan cakupan kunjungan neonatal utama (KN1)

Penulis menganalisis dari 9 langkah-langkah GAP yang dilakukan oleh pegawai dari Dinas Kesehatan bahwa penyusun dokumen GAP ini belum spesifik mencantumkan data AKI dan AKB di Provinsi Banten Tahun 2015 yang dalam analisis disebutkan kondisinya masih tinggi meskipun begitu rencana aksi responsif gender dalam Orientasi Pelayanan dan Nifas di fasilitas kesehatan dan Optimalisasi program P4K dalam penurunan jumlah

AKI & AKB di Provinsi Banten sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* dalam pelayanan kesehatan di Provinsi Banten dan juga sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Banten nomor 7 (tujuh) yaitu optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan dan integrasi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat karena bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Banten.

Adapun setelah dibuatnya analisis menggunakan GAP, disusun GBS (*Gender Budget Statement*) sebagai pernyataan bahwa SKPD telah merencanakan anggaran responsif gender. Berikut GBS dari Dinas Kesehatan:

Program : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Kegiatan : Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Analisis Situasi :

1) Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

Data Umum : Masih tingginya AKI dan AKB tahun 2015

Akses : Belum meratanya akses layanan kesehatan bagi ibu hamil

Partisipasi : Kurangnya Partisipasi dalam pembangunan Kesehatan

Kontrol : Kurangnya Pengawasan terhadap ibu hamil

Manfaat : Belum meratanya manfaat pembangunan kesehatan yang diperoleh ibu hamil

2) Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

- a. Faktor Kesenjangan yaitu : Jumlah AKI & AKB yang tinggi karena ibu hamil kurang mendapatkan akses dalam pelayanan kesehatan
- b. Penyebab Internal : Jauhnya fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil

c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender : Kepercayaan masyarakat dalam pemeriksaan kehamilan dan kelahiran terhadap dukun paraji

- Rencana Aksi** :
- Aktivitas** : -Orientasi Pelayanan dan Nifas di fasilitas kesehatan
-Optimalisasi program P4K dalam penurunan jumlah AKI & AKB di Provinsi Banten
- Sumber Daya/Input** : Peserta 60 orang
- Output** : Menurunnya AKI dan AKB di Tahun 2016 dan Tertolongnya jumlah ibu bersalin yang ditangani
- Alokasi Sumber Daya**: Anggaran Rp 807.865.000, dan Peralatan berupa Alat Kesehatan dan *leaflet*
- Outcomes** : -Menurunkan AKI dan AKB pada tahun 2016
-Meningkatkan persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih pada tahun 2016

Berdasarkan pernyataan dalam GBS (*Gender Budget Statement*) oleh Dinkes Provinsi Banten, penulis menganalisis bahwa besaran anggaran yang dialokasikan oleh Dinkes adalah sebesar 0,01% dari total APBD Provinsi Banten Tahun 2016 yang berjumlah Rp 8.656.395.495.445.

2. Dinas Sosial (Dinsos)

Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis- Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan;

- Program : Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan
- Kegiatan : Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesosmas
- Tujuan : -Mewujudkan persamaan persepsi pola mekanisme pendataan; Membekali panduan dalam pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS;

Langkah 2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin (Kuantitatif dan Kualitatif);

Data Umum : Berdasarkan data TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Provinsi Banten yang akan dibina sebanyak 155 orang (125 orang laki-laki, 30 orang perempuan) terdiri dari :

- Kota Serang (6 orang laki-laki)
- Kab. Serang (25 orang laki-laki, 4 orang perempuan)
- Kota Tangerang (10 orang laki-laki, 3 orang perempuan)
- Kab.Tangerang (29 orang laki-laki)
- Kota Tangsel (5 orang laki-laki, 2 orang perempuan)
- Kab.Pandeglang (27 orang laki-laki, 8 orang perempuan)
- Kab.Lebak (16 orang laki-laki, 12 orang perempuan)
- Kota Cilegon (7 orang laki-laki, 1 orang perempuan)

Langkah 3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan;

Dari 155 TKSK, lebih banyak laki-laki dibanding perempuan.

Langkah 4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi;

Tidak adanya kebijakan Dinas Sosial Provinsi Banten yang menetapkan peserta bimbingan Pembinaan Tugas TKSK harus berwawasan gender sehingga dalam setiap kegiatan tidak memperhatikan prosentase jumlah peserta laki-laki dan perempuan.

Langkah 5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga;

Belum dipahaminya kebijakan tentang program berwawasan gender dalam penerapan kegiatan.

Langkah 6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan;

-Mengadakan kegiatan baik penyuluhan dan diklat tentang pentingnya aplikasi program berwawasan gender dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah.

-Seleksi yang dilaksanakan dalam rangka perekrutan TKSK Kabupaten/Kota harus memperhatikan responsif gender.

Langkah 7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender;

Peningkatan kemampuan dan pemahaman petugas baik Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Pelaksanaan Pembinaan Tugas TKSK yang berwawasan gender.

Langkah 8. Tetapkan *Baseline*;

-Adanya petugas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki keterampilan dalam merencanakan kegiatan pembinaan tugas TKSK berwawasan gender.

-Adanya sumber dana dari APBD 2015 sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan berwawasan gender.

Langkah 9. Tetapkan indikator gender;

-Tersedianya petugas Provinsi dan Kabupaten/Kota baik perencana dan pelaksana teknis yang memahami tentang kegiatan bimbingan pembinaan Tugas TKSK yang berwawasan gender setiap tahun

-Teralokasikannya anggaran untuk kegiatan pembinaan Tugas TKSK yang telah responsif gender setiap tahun baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Penulis menganalisis dari 9 langkah-langkah GAP yang dilakukan oleh pegawai dari Dinas Sosial bahwa rencana aksi responsif gender dalam Pelaksanaan Pembinaan Tugas TKSK yang berwawasan gender belum sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial sebagai *leading sector* dalam mengurus permasalahan sosial karena belum menyentuh ke pokok permasalahan sosial yang diurus oleh Dinas Sosial namun rencana aksi ini mendukung poin ke 9 (sembilan) yaitu pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah karena bertujuan untuk membuka wawasan tentang saat pembinaan TKSK.

Adapun setelah dibuatnya analisis menggunakan GAP, disusun GBS (*Gender Budget Statement*) sebagai pernyataan bahwa SKPD telah merencanakan anggaran responsif gender. Berikut GBS dari Dinas Sosial :

Program : Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Dan Keagamaan
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesosmas
Analisis Situasi :

1) Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

Data Umum : Berdasarkan data TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Provinsi Banten yang akan dibina sebanyak 155 orang (125 orang laki-laki, 30 orang perempuan)

2) Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Faktor Kesenjangan yaitu : Dari 155 TKSK, lebih banyak laki-laki dibanding perempuan

b. Penyebab Internal :

Tidak adanya kebijakan Dinas Sosial Provinsi Banten yang menetapkan peserta bimbingan Pembinaan Tugas TKSK harus berwawasan gender sehingga dalam setiap kegiatan tidak memperhatikan prosentase jumlah peserta laki-laki dan perempuan

c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender :

Belum dipahaminya kebijakan tentang program berwawasan gender dalam penerapan kegiatan

Rencana Aksi :

Aktivitas : Pembinaan Tugas TKSK

Sumber Daya/*Input* : Peserta 155 orang dari 8 Kabupaten/Kota

Output : Meningkatnya peran lembaga dalam pelayanan masyarakat

Alokasi Sumber Daya : Anggaran Rp 1.983.763.000,.

Outcomes : Memberikan bimbingan pelaksanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan pernyataan dalam GBS (*Gender Budget Statement*) oleh Dinsos Provinsi Banten, penulis menganalisis bahwa besaran anggaran yang dialokasikan oleh Dinsos adalah sebesar 0,02% dari Total APBD Provinsi Banten Tahun 2016 yang berjumlah Rp 8.656.395.495.445.

3. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)

Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis-Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan;

Program : Kepemudaan Kepramukaan

Kegiatan : Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda

Tujuan : -Meningkatkan kompetensi pemuda dalam berwirausaha;
-Memperkuat pengelolaan dalam sektor ekonomi unggulan Provinsi Banten.

Langkah 2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin (Kuantitatif dan Kualitatif);

Masih rendahnya jumlah pemuda yang berwirausaha dalam sektor ekonomi unggulan Provinsi Banten.

Langkah 3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan;

Rendahannya daya beli barang/jasa oleh perempuan di Provinsi Banten

Langkah 4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi;

Belum adanya kebijakan yang berwawasan responsif gender dalam pengelolaan kewirausahaan

Langkah 5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga;

Minimnya kompetensi masyarakat dalam berwirausaha

Langkah 6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan;

Menaikkan daya beli masyarakat perempuan terhadap barang/jasa

Langkah 7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender;

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Tingkat Provinsi Banten
- Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
- Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif
- Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan
- Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga
- Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa
- Rancangan Pergub Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi Banten
- Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten

Langkah 8. Tetapkan *Baseline*;

Rendahnya daya beli masyarakat perempuan sedangkan memiliki potensi jumlah penduduk perempuan yang hampir sama dengan jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Banten.

Langkah 9. Tetapkan indikator gender;

- Meningkatkan daya beli masyarakat perempuan;
- Meningkatkan keberdayaan yang setara antara laki-laki dan perempuan;

Penulis menganalisis dari 9 langkah-langkah GAP yang dilakukan oleh pegawai dari Dinas Pemuda dan Olahraga bahwa rencana aksi responsif gender dalam pelatihan wirausaha untuk pemuda menunjukkan kesesuaian dengan tugas, pokok dan fungsi sebagai *leading sector* dalam mengembangkan potensi pemuda. Selain itu, rencana aksi ini juga sesuai dengan poin kedua dalam tema pembangunan daerah Provinsi Banten yaitu perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan antisipasi kerawanan sosial

karena pelatihan wirausaha bagi pemuda termasuk ke dalam pemberdayaan ekonomi dan antisipasi kerawanan sosial.

Adapun setelah dibuatnya analisis menggunakan GAP, disusun GBS (*Gender Budget Statement*) sebagai pernyataan bahwa SKPD telah merencanakan anggaran responsif gender. Berikut GBS dari Dispora :

Program : Kepemudaan Kepramukaan

Kegiatan : Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda

Analisis Situasi :

1) Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

Data Umum : Masih rendahnya jumlah pemuda yang berwirausaha dalam sektor ekonomi unggulan Provinsi Banten

2) Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

- a. Faktor Kesenjangan yaitu : Rendahnya daya beli barang/jasa oleh perempuan di Provinsi Banten
- b. Penyebab Internal : Belum adanya kebijakan yang berwawasan responsif gender dalam pengelolaan kewirausahaan
- c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender : Minimnya kompetensi masyarakat dalam berwirausaha

Rencana Aksi :

Aktivitas :

-Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wirausaha Pemuda

Tingkat Provinsi Banten

-Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

-Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif

-Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Kelautan dan Perikanan

-Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Jasa Boga

-Pelatihan Penguatan Wirausaha Muda Pemula Bidang Perdagangan Jasa

-Rancangan Pergub Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi Banten

-Temu Usaha Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Provinsi Banten

Output : -Meningkatkan kompetensi pemuda dalam berwirausaha;
-Memperkuat pengelolaan dalam sektor ekonomi unggulan Provinsi Banten.

Alokasi Sumber Daya: Anggaran Rp 266.657.000,.

Outcomes : -Meningkatkan daya beli masyarakat perempuan;
-Meningkatkan keberdayaan yang setara antara laki-laki dan perempuan;

Berdasarkan pernyataan dalam GBS (*Gender Budget Statement*) oleh Dispora Provinsi Banten, penulis menganalisis bahwa besaran anggaran yang dialokasikan oleh Dispora adalah sebesar 0,003% dari Total APBD Provinsi Banten Tahun 2016 yang berjumlah Rp 8.656.395.495.445.

4. RSUD Malingping

Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis-Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan;

Program : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Pelayanan Kesehatan bagi keluarga

Tujuan : Meningkatkan layanan kesehatan bagi keluarga miskin

Langkah 2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin (Kuantitatif dan Kualitatif);

Masih tingginya prosentase angka kemiskinan di Kabupaten Lebak pada tahun 2014 (9.17%)

Langkah 3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan;

Angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kab. Lebak lebih tinggi di bandingkan Kab/Kota lainnya di Provinsi Banten.

Langkah 4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi;

Kesadaran masyarakat tentang kesehatan masih rendah.

Langkah 5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga;

Akses layanan kesehatan (puskesmas) jauh dari tempat tinggal masyarakat

Langkah 6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan;

Meningkatkan layanan kesehatan keluarga miskin bagi perempuan dan anak

Langkah 7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender;

Jumlah masyarakat/ pasien mendapat layanan kesehatan gratis (251 orang)

Langkah 8. Tetapkan *Baseline*;

Masyarakat/ Pasien yang mendapatkan pengobatan gratis

Langkah 9. Tetapkan indikator gender;

Jumlah pasien mendapat layanan kesehatan gratis (100 orang perempuan, 100 orang laki-laki, 51 orang anak)

Penulis mengkaji dari 9 langkah-langkah GAP yang telah dilakukan oleh RSUD Malingping bahwa rencana aksi responsif gender berupa 251 pasien mendapatkan pelayanan kesehatan gratis menunjukkan kesesuaian dengan dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Malingping dalam menyediakana fasilitas kesehatan di daerah Malingping yang merupakan daerah tertinggal. Jika dikaitkan antara rencana aksi ini dengan tema pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2016 maka sesuai dengan poin ke 7 (tujuh) Optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan dan integrasi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Adapun setelah dibuatnya analisis menggunakan GAP, disusun GBS (*Gender Budget Statement*) sebagai pernyataan bahwa SKPD telah merencanakan anggaran responsif gender. Berikut GBS dari RSUD Malingping :

Program : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : Pelayanan Kesehatan bagi keluarga miskin

Analisis Situasi :

1) Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

Data Umum : Masih tingginya prosentase angka kemiskinan di Kabupaten Lebak pada tahun 2014 (9.17%)

2) Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Faktor Kesenjangan yaitu : Angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kab. Lebak lebih tinggi di bandingkan kab/kota lainnya di Provinsi Banten

b. Penyebab Internal : Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan masih rendah

c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender :

Akses layanan kesehatan (puskesmas) jauh dari tempat tinggal masyarakat

Rencana Aksi :

Aktivitas : Pengobatan gratis, Khitanan Massal, Penyuluhan kesehatan

Sumber Daya/*Input* : 15 orang tenaga kesehatan terdiri dari :
Dokter spesialis : 2 orang, Dokter Umum : 3 orang,
Perawat : 5 orang, Apoteker: 3 orang, Bidan: 2 orang,
panitia internal 15 orang

Output : Terlaksananya pengobatan gratis pada 251 masyarakat miskin di Kec. Cikutok Kab. Lebak

Alokasi Sumber Daya : Anggaran Rp 355.590.000,. dan Peralatan berupa Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran

Outcomes : Terlayannya sebanyak 251 orang (110=P, 90=L, 51=A) masyarakat/pasien miskin di Kecamatan Cikotok Kab. Lebak yang mendapatkan layanan kesehatan gratis; pengobatan dan sunatan massal

Berdasarkan pernyataan dalam GBS (*Gender Budget Statement*) oleh RSUD Malingping Provinsi Banten, penulis menganalisis bahwa besaran anggaran yang dialokasikan oleh Dinkes adalah sebesar 0,004 % dari total APBD Provinsi Banten Tahun 2016 yang berjumlah Rp 8.656.395.495.445.

5. Satpol PP

Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis-Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan;

Program : Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Kegiatan :-Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum
-Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
-Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas
-Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Tujuan : Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

Satpol PP tidak membuat analisis GAP dikarenakan anggaran responsif gender memang tidak dianggarkan namun program yang dipilih oleh salah satu informan di Satpol PP yaitu Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang jika dikaitkan dengan gender

akan terlihat manfaatnya bagi masyarakat meskipun tidak memiliki kesenjangan gender di dalamnya.

6. Dinas Pendidikan (Dindik)

Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis-Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan;

Program : Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan : Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Tujuan :

- Meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan pada jenjang pra sekolah bagi Anak Usia Dini Laki-Laki dan Perempuan
- Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK PAUD) dan IPM Provinsi Banten
- Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan Kepastian layanan PAUD

Langkah 2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin (Kuantitatif dan Kualitatif);

Data Umum : Target capaian APK PAUD tahun 2016 di pusat data adalah 70,1 % dan pada tahun 2014 sudah tercapai 66,81 % .

Data Penduduk 3-6 Tahun di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

-Laki-laki : 336.131 anak

-Perempuan: 318.122 anak

Total Jumlah P+L = 654.253 anak

Jumlah anak usia 3-6 tahun yang terlayani PAUD 103.254 anak sedangkan Provinsi Banten sebesar 55,39%. Masih ada sekitar 550.999 anak usia 3-6 tahun di Provinsi Banten yang belum terlayani PAUD apapun.

Langkah 3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan;

Akses : Peluang Pendidikan Anak Usia Dini di Desa masih rendah

Partisipasi : Keikutsertaan Pendidikan Anak Usia Dini masih rendah

Kontrol :Keputusan anak untuk mengikuti pra sekolah masih kurang
 Manfaat :Kesempatan untuk anak mendapatkan pendidikan pra sekolah masih tinggi di kota sedangkan di desa masih rendah

Langkah 4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi;

- Masih rendahnya program dan dana bagi pendidikan Anak Usia Dini di bandingkan sekolah formal
- Masih kurangnya SDM kualifikasi pendidikan non formal
- Belum optimalnya penguatan manajemen internal dan penguatan mutu lembaga PAUD

Langkah 5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga;

- Adanya anggapan belum pentingnya pendidikan pra sekolah untuk anak usia 3-6 tahun
- Orang tua tidak ada waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah khususnya di desa, lebih baik ikut orang tua ke sawah atau ke pasar
- Adanya anggapan bahwasekolah itu mahal sehingga banyak anak usia Pra sekolah tidak mendapatkan layanan pendidikan.

Langkah 6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan;

- Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini laki-laki dan perempuan usia 3-6 tahun
- Meningkatkan kualitas lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Meningkatkan partisipasi masyarakat akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini

Langkah 7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender;

Penyelenggaran PAUD Model Holistik Integratif

Langkah 8. Tetapkan *Baseline*;

- Terlaksananya dukungan manajemen lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, mensinergikan TK, KOBER, TPA dengan Posyandu, BKB, TPQ dengan penyelenggaraan PAUD Model Holistik Integratif;

-Ikut peran sertanya keluarga, masyarakat akan pentingnya pra sekolah dengan model holistik integratif

Langkah 9. Tetapkan indikator gender;

-Terlaksananya peran serta semua *Stakeholder* untuk kemudahan akses pra sekolah untuk anak laki-laki dan perempuan

-Meningkatnya kualitas dan layanan pendidikan pada jenjang pra sekolah untuk anak laki-laki dan ikut peran sertanya masyarakat dan *stakeholder* seperti keluarga, tutor, bidan, aparat desa.

Penulis menganalisis dari 9 langkah-langkah GAP yang dilakukan oleh pegawai dari Dindik bahwa rencana aksi responsif gender dalam Penyelenggaraan PAUD Model HolistikIntegratifdi Provinsi Banten sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dindik sebagai *leading sector* dalam pelayanan pendidikan di Provinsi Banten dan juga sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Banten nomor 6 (enam) yaitu Peningkatan kapasitas pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja karena bertujuan untuk membuat Angka Partisipasi Anak dalam Sekolah naik.

Adapun setelah dibuatnya analisis menggunakan GAP, disusun GBS (*Gender Budget Statement*) sebagai pernyataan bahwa SKPD telah merencanakan anggaran responsif gender. Berikut GBS dari Dinas Pendidikan :

Program : Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan : Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Analisis Situasi

1) Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

Data Penduduk 3-6 Tahun Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Laki-Laki : 336.131 Anak

Perempuan : 318.122 Anak

Total Jumlah P+L = 654.253 Anak

Jumlah Anak Usia 3-6 Tahun Yang Terlayani PAUD 103.254 Anak.

Masih ada sekitar 550,999 Ribu anak usia 3-6 tahun di Provinsi banten yang belum terlayani PAUD.

2) Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Faktor Kesenjangan yaitu :

-Akses : Masih rendahnya Akses Partisipasi Pendidikan Anak Pra Sekolah atau Pendidikan Anak Usia Dini laki-laki dan perempuan dan Peran serta Masyarakat

-Kontrol /Kewenangan: Diperlukan Peran serta Keluarga, Aparatur Desa serta masyarakat akan Pentingnya Pendidikan Pra sekolah

-Partisipasi : Keikutsertaan Anak usia Pra Sekolah Masih Kurang dibandingkan Jumlah Anak Di Sekolah Formal

-Manfaat : Kesempatan Anak Pra Sekolah Untuk Mendapatkan Pendidikan Usia dini Perlu Ditingkatkan dan Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD

b. Penyebab Internal :

-Masih Kurangnya SDM Kualifikasi Pendidikan Non Formal Di Setiap Lembaga PAUD

-Masih Rendahnya Dukungan Dana dan Program Pendidikan anak usia Dini di bandingkan Sekolah Formal

-Penguatan Manajemen Internal dan Penguatan Mutu Lembaga PAUD

c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender :

Masih Banyak Masyarakat Terutama Dipedesaan yang Menganggap belum Pentingnya Pendidikan Pra Sekolah dan Anggapan Bahwa Pendidikan Itu adalah Mahal.

Rencana Aksi

Aktivitas :Bintek Penyelenggaraan PAUD Model Holistik Integratif

Sumber Daya/Input	:Panitia 7 orang, Trainer 6 orang, peserta 120 orang
Output	:Terlaksananya Dukungan Manajemen Lembaga PAUD, mensinergikan PAUD, KOBER, TPA dengan POSYANDU, BKB, TPQ Dengan Penyelenggaraan PAUD Model Holistik Integratif
Alokasi Sumber Daya	: Anggaran Rp 449.957.000,.
Outcomes	: Terlaksananya Peran serta semua <i>StakeHolder</i> Untuk Kemudahan Akses Pra Sekolah untuk Anak usia Dini laki-laki dan Perempuan.

Berdasarkan pernyataan dalam GBS (*Gender Budget Statement*) oleh Dinkes Provinsi Banten, penulis menganalisis bahwa besaran anggaran yang dialokasikan oleh Dinkes adalah sebesar 0,01% dari total APBD Provinsi Banten Tahun 2016 yang berjumlah Rp 8.656.395.495.445.

7. Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak)

Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis-Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan;

Program	: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Pembinaan Pengarusutamaan Gender
Tujuan	: Tersusunnya perencanaan pembangunan gender yang partisipatif.

Langkah 2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin (Kuantitatif dan Kualitatif);

- Partisipasi masyarakat secara sukarela baik dalam penyusunan perencanaan pertanian, pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi terhadap kegiatan dirasa masih kurang.
- Peningkatan partisipatif dalam perencanaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja instansi efektifitas dan berperan dalam menjaga kearifan lokal.

Langkah 3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan;

- Dalam penyusunan perencanaan masih berorientasi dalam sistem *top down* sehingga peran partisipasi masyarakat belum berjalan baik.
- Partisipasi petani dalam penyusunan perencanaan masih kurang, karena rendahnya pengetahuan petani maupun identifikasi oleh penyelenggara pemerintah

Langkah 4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi;

- Para pengambil keputusan belum paham tentang konsep dan isu gender dalam perencanaan kegiatan yang bersifat partisipatif
- Para perencana belum memahami tentang analisis gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Langkah 5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga;

Kurangnya pemahaman dan kemudahan bagi masyarakat untuk berperan dalam perencanaan pertanian

Langkah 6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan;

- Menyusun perencanaan pertanian yang partisipatif dan bersifat *bottum up*
- Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah dalam menyusun perencanaan partisipatif

Langkah 7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender;

Pembinaan pengarusutamaan gender.

Langkah 8. Tetapkan *Baseline*;

Peserta pembinaan terdiri dari penyusun rencana kerja masing-masing seksi lingkup distrik provinsi dan bagian program di kab/kota

Langkah 9. Tetapkan indikator gender;

Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah dalam menyusun perencanaan gender dan tersusunnya perencanaan partisipatif yang bersifat *bottum up*

Penulis menganalisis dari 9 langkah-langkah GAP yang dilakukan oleh pegawai dari Distanak bahwa rencana aksi responsif gender dalam Pembinaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten sesuai dengan kategori anggaran kelembagaan pengarusutamaan gender dan juga sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Banten nomor 9 (Sembilan) yaitu Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah karena bertujuan untuk membuat membuka wawasan responsif gender pada pegawai yang ada di Distanak.

Adapun setelah dibuatnya analisis menggunakan GAP, disusun GBS (*Gender Budget Statement*) sebagai pernyataan bahwa SKPD telah merencanakan anggaran responsif gender. Berikut GBS dari Dinas Pertanian dan Peternakan :

Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Analisis Situasi

-Partisipasi masyarakat secara sukarela baik dalam penyusunan perencanaan pertanian, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi terhadap kegiatan masih kurang

-Peningkatan partisipatif dalam perencanaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja instansi efektifitas dan berperan dalam menjaga kearifan lokal

Rencana Aksi

Aktivitas : Pembinaan Pengarus Utamaan Gender

Sumber Daya/*Input* : Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah dalam menyusun perencanaan gender

Output : Tersusunnya perencanaan partisipatif *bottom up*

Alokasi Sumber Daya: Anggaran Rp 72.866.000,.

Outcomes : -Meningkatnya pemahaman aparatur negara dalam menyusun perencanaan partisipatif
-Tersusunnya perencanaan partisipatif yang bersifat *bottum up*

Berdasarkan pernyataan dalam GBS (*Gender Budget Statement*) oleh Distanak Provinsi Banten, penulis menganalisis bahwa besaran anggaran yang dialokasikan oleh Distanak adalah sebesar 0,001% dari Total APBD Provinsi Banten Tahun 2016 yang berjumlah Rp 8.656.395.495.445.

8. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR)

Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis-Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan;

Program : Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan : Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak

Tujuan : Meningkatkan kemantapan jalan

Langkah 2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin (Kuantitatif dan Kualitatif);

Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan mendukung peningkatan akses kepada pelayanan kesehatan dan pendidikan

Langkah 3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan;

Rusaknya kondisi jalan dan jembatan akan menghambat akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Langkah 4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi;

Terbatasnya SDM di Dinas Bina Marga dalam penanganan pemeliharaan jalan sehingga kerusakan jalan kurang tertangani dengan cepat

Langkah 5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga;

Keterbatasan anggaran sehingga tidak semua jalan yang rusak dapat tertangani.

Langkah 6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan;

Meningkatkan kemantapan jalan yang responsif gender (mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, ibu dan anak)

Langkah 7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender;

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di wilayah Lebak

Langkah 8. Tetapkan *Baseline*;

Pemeliharaan Ruas Jalan; Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Wilayah Lebak; Penanganan Longsoran di Wilayah Lebak

Langkah 9. Tetapkan indikator gender;

6 Ruas jalan; 80 titik/ Sepanjang 849.7 M; 3 Ruas Jalan

Penulis menganalisis dari 9 langkah-langkah GAP yang dilakukan oleh pegawai dari DBMTR bahwa rencana aksi responsif gender dalam Pembinaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi DBMTR dan juga sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Banten nomor 5 (lima) yaitu Peningkatan konektivitas dan daya dukung kawasan pusat pertumbuhan karena bertujuan untuk membuat jalan sebagai penghubung akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Adapun setelah dibuatnya analisis menggunakan GAP, disusun GBS (*Gender Budget Statement*) sebagai pernyataan bahwa SKPD telah merencanakan anggaran responsif gender. Berikut GBS dari DBMTR :

Program : Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan : Pembangunan Jalan Prioritas Tahun Jamak

Analisis Situasi

1) Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan mendukung peningkatan akses kepada pelayanan kesehatan dan pendidikan

2) Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

- a. Faktor Kesenjangan yaitu : Rusaknya kondisi jalan dan jembatan akan menghambat akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- b. Penyebab Internal : Terbatasnya SDM di Dinas Bina Marga dalam penanganan pemeliharaan jalan sehingga kerusakan jalan kurang tertangani dengan cepat
- c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender : Keterbatasan anggaran sehingga tidak semua jalan yang rusak dapat tertangani.

Rencana Aksi :

=> Aktivitas Kegiatan Pemeliharaan Jalan:

- Inventarisasi dan identifikasi kerusakan jalan
- Penyusunan prioritas penanganan kerusakan jalan
- Penanganan Pemeliharaan rutin 6 ruas jalan secara bertahap

Sumber Daya/*Input* : 96 orang kenek dan 24 orang penilik jalan

Output : Ruas jalan yang tertangani melalui pemeliharaan rutin sepanjang 118,401 Km

=>Aktivitas Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan:

- Inventarisasi dan identifikasi jembatan yang rusak
- Penyusunan prioritas penanganan jembatan
- Penanganan Pemeliharaan 80 titik jembatan di Wilayah Lebak secara bertahap

Sumber Daya/*Input* : 96 orang kenek dan 24 orang penilik jalan

Output : Ruas jembatan yang tertangani melalui pemeliharaan jembatan sepanjang 849, 7 m.

Aktivitas Kegiatan Penanganan Longsoran:

- Inventarisasi dan identifikasi ruas jalan yang mengalami longsoran
- Penyusunan prioritas penanganan longsoran jalan

-Penanganan longsor di 3 ruas jalan secara bertahap

Sumber Daya/*Input* : 96 orang kenek dan 24 orang penilik jalan

Output : Ruas jembatan yang tertangani melalui pemeliharaan jembatan sepanjang 849,7 m.

Alokasi Sumber Daya: Anggaran Rp 185.286.690.435,.

Outcomes : Kelancaran, kenyamanan dan keamanan masyarakat (laki-laki, perempuan, anak-anak) dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan maupun perekonomian

Berdasarkan pernyataan dalam GBS (*Gender Budget Statement*) oleh DBMTR Provinsi Banten, penulis menganalisis bahwa besaran anggaran yang dialokasikan oleh DBMTR adalah sebesar 2,14% dari Total APBD Provinsi Banten Tahun 2016 yang berjumlah Rp 8.656.395.495.445.

9. Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)

Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis-Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan;

Program : Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

Kegiatan : Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak)

Tujuan : Adanya pemahaman yang sama antara perempuan dan laki-laki terhadap pentingnya pemanfaatan dan Keselamatan listrik rumah tangga

Langkah 2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin (Kuantitatif dan Kualitatif);

-Selama ini pengetahuan tentang kelistrikan hanya diketahui oleh kaum laki-laki saja sedangkan perempuan banyak yang tidak memahaminya;
-Jumlah laki-laki yang mengikuti sosialisasi lebih banyak dibanding perempuan;

-Sasaran utamanya untuk masyarakat penerima listrik pedesaan baik laki-laki maupun perempuan.

Langkah 3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan;

- Perempuan kurang sepenuhnya memahami informasi tentang kelistrikan beserta pemanfaatannya dalam penggunaan listrik dibandingkan laki-laki;
- Terdapat perbedaan yang nyata antara jumlah laki-laki dan perempuan yang hadir untuk mengikuti sosialisasi keselamatan listrik rumah tangga yaitu 80% laki-laki dan 20% Perempuan;
- Perempuan kurang percaya diri dan beranggapan bahwa urusan listrik itu dominan laki-laki yang mengerjakan padahal perempuan juga perlu memahaminya;
- Selama ini Perempuan masih beranggapan bahwa laki-laki lebih menguasai bidang kelistrikan dibanding perempuan;
- Berdasarkan data yang ada jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi relatif masih sedikit dibandingkan laki-laki.-Kurangnya Pemahaman Masyarakat perempuan terhadap Pemanfaatan dan Keselamatan Listrik Rumah Tangga.

Langkah 4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi;

Masih adanya kesenjangan bahwa pada saat ini pengetahuan tentang masalah kelistrikan lebih banyak didominasi laki-laki sedangkan perempuan tidak perlu tahu/memahaminya

Langkah 5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga;

Selama ini masyarakat belum memahami sepenuhnya bahwa kegiatan sosialisasi keselamatan listrik rumah tangga bukan hanya laki-laki saja yang harus hadir tapi perempuan juga.

Langkah 6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan;

-Adanya pemahaman yang sama antara laki-laki dan Perempuan terhadap

- pentingnya pemanfaatan dan Keselamatan listrik rumah tangga
- Meningkatnya wawasan masyarakat laki-laki dan Perempuan terhadap Pemanfaatan dan Keselamatan listrik rumah tangga
- Meningkatkan Aktivitas Sosial Masyarakat
- Meningkatnya rasio elektrifitas, terutama memberikan akses energi listrik kepada masyarakat perdesaan dan masyarakat miskin perkotaan

Langkah 7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender;

- Melaksanakan Sosialisasi Pemanfaatan dan Keselamatan Listrik Rumah Tangga
- Terlatihnya kelompok masyarakat calon penerima dan pengguna program listrik perdesaan secara menyeluruh baik laki-laki maupun Perempuan
- Pekerjaan Pemasangan instalasi rumah (IR) dan SR kepada setiap rumah penduduk penerima bantuan lides

Langkah 8. Tetapkan *Baseline*;

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terhadap pemanfaatan dan keselamatan listrik rumah tangga

Langkah 9. Tetapkan indikator gender;

- Adanya pemahaman yang sama antara perempuan dan laki-laki terhadap pentingnya pemanfaatan dan Keselamatan listrik rumah tangga
- Meningkatnya wawasan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terhadap Pemanfaatan dan Keselamatan listrik rumah tangga
- Meningkatnya rasio elektrifitas, terutama memberikan akses energi listrik kepada masyarakat perdesaan dan masyarakat miskin perkotaan

Penulis menganalisis dari 9 langkah-langkah GAP yang dilakukan oleh pegawai dari Distamben bahwa rencana aksi responsif gender dalam sosialisasi pemanfaatan dan keselamatan listrik di perdesaan di Provinsi Banten sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Distamben dan juga sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Banten nomor 8 (delapan) yaitu Pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air,

mitigasi, serta adaptasi bencana karena bertujuan untuk membuat perempuan juga terlatih dalamantisipasi bencana yang disebabkan oleh arus listrik.

Adapun setelah dibuatnya analisis menggunakan GAP, disusun GBS (*Gender Budget Statement*) sebagai pernyataan bahwa SKPD telah merencanakan anggaran responsif gender. Berikut GBS dari Dinas Pertambangan dan Energi :

Program : Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
Kegiatan : Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak) Sosialisasi Keselamatan Pemanfaatan Listrik Rumah Tangga, Sosialisasi bagi kepala Desa/Lurah, Sosialisasi bagi masyarakat penerima bantuan lides

Analisis Situasi :

1) Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

- Selama ini pengetahuan tentang kelistrikan lebih banyak diketahui oleh kaum laki-laki saja sedangkan perempuan banyak yang tidak memahaminya;
- Jumlah laki-laki yang mengikuti sosialisasi lebih banyak dibanding perempuan;
- Sasaran utamanya masyarakat penerima listrik pedesaan baik laki-laki maupun perempuan.

2) Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Faktor Kesenjangan yaitu :

- Akses
Perempuan kurang sepenuhnya memahami informasi tentang kelistrikan beserta pemanfaatannya dalam menggunakan listrik dibandingkan laki-laki.
- Partisipasi
Terdapat perbedaan yang nyata antara jumlah laki-laki dan perempuan yang hadir untuk mengikuti sosialisasi keselamatan listrik rumah tangga.

Perempuan kurang percaya diri dan beranggapan bahwa urusan listrik itu dominan laki-laki yang mengerjakan padahal perempuan juga perlu mengetahui dan memahaminya.

-Kontrol

Selama ini Perempuan masih beranggapan bahwa laki-laki lebih menguasai bidang kelistrikan dibanding perempuan;

Berdasarkan data yang ada jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi relatif masih sedikit dibandingkan laki-laki.

-Manfaat

Adanya pemahaman yang sama antara perempuan dan laki-laki terhadap pentingnya pemanfaatan dan Keselamatan listrik rumah tangga;

Meningkatnya wawasan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terhadap Pemanfaatan dan Keselamatan listrik rumah tangga;

Meningkatnya rasio elektrifikasi, terutama memberikan akses energi listrik kepada masyarakat perdesaan dan masyarakat miskin perkotaan.

b. Penyebab Internal :

Masih adanya kesenjangan bahwa pada saat ini pengetahuan tentang masalah kelistrikan lebih banyak didominasi laki-laki sedangkan perempuan tidak perlu mengetahuinya/memahaminya.

c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender :

Selama ini masyarakat belum memahami sepenuhnya bahwa kegiatan sosialisasi keselamatan listrik rumah tangga bukan hanya laki-laki saja yang harus hadir tapi perempuan juga.

Rencana Aksi :

Aktivitas :

-Melakukan survei dan pemetaan kondisi lapangan yang akan dijadikan tempat sosialisasi.

-Koordinasi dengan pimpinan, Koordinasi dengan Narasumber,

Pemberitahuan Kepada Kabupaten/Kota tempat dan tanggal pelaksanaan,

Pengiriman Undangan Kepada Masyarakat, Persiapan Materi,

Administrasi, dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan dan Penerimaan/

Pendaftaran Peserta.

-Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi LISDES bagi Masyarakat Penerima Bantuan LISDES dan Sosialisasi Pemanfaatan dan Keselamatan Listrik Rumah Tangga.

-Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Sumber Daya/Input : 10 orang aparatur Distamben dan Narasumber terdiri dari Dinas, Aparat Kepolisian, Kecamatan, dan PLN

Output : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terhadap pemanfaatan dan keselamatan listrik rumah tangga

Alokasi Sumber Daya : Anggaran Rp 777.145.000,. dan Peralatan berupa materi sosialisasi

Outcomes :

-Adanya pemahaman yang sama antara perempuan dan laki-laki terhadap pentingnya pemanfaatan dan Keselamatan listrik rumah tangga;

-Meningkatnya wawasan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terhadap Pemanfaatan dan Keselamatan listrik rumah tangga;

-Meningkatnya rasio elektrifitas, terutama memeberikan akses energi listrik kepada masyarakat perdesaan dan masyarakat miskin perkotaan.

Berdasarkan pernyataan dalam GBS (*Gender Budget Statement*) oleh Distamben Provinsi Banten, penulis menganalisis bahwa besaran anggaran yang dialokasikan oleh Distamben adalah sebesar 0,01% dari Total APBD Provinsi Banten Tahun 2016 yang berjumlah Rp 8.656.395.495.445.

10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis-Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan;

Program : Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak

Tujuan : Meningkatkan Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Perempuan dan Anak

Langkah 2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin (Kuantitatif dan Kualitatif);

Data Umum : Angkatan kerja di provinsi banten menurut jenis kelamin tahun 2014 yaitu :

Laki-laki 3.546.825 (105 %)

Perempuan 1.791.220 (33 %)

Jumlah penduduk yang bekerja menurut jenis Kelamin pada tahun 2014 :

Laki – laki 3.226.730 (96 %)

Perempuan 1.627.262 (33 %)

Dari data di atas terdapat kesenjangan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan.

Langkah 3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan;

Akses :

-Masih banyak Perusahaan yang tidak memperhatikan kesejahteraan terhadap pekerja perempuan.

-Masih rendahnya tenaga kerja perempuan dalam persaingan kerja dengan tenaga kerja laki-laki.

Partisipasi :

- Kurangnya perhatian perusahaan terhadap kesehatan reproduksi bagi tenaga kerja perempuan.
- Rendahnya daya saing perempuan dibanding laki-laki dalam upaya persaingan kesempatan kerja yang ada.

Kontrol :

- Kurangnya perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja perempuan di perusahaan terkait kesehatan reproduksi perempuan.
- Lemahnya komunikasi, Informasi dan edukasi terhadap kesempatan kerja bagi perempuan dalam pengembangan peningkatan karir.

Manfaat :

- Penerimaan manfaat terkait kesehatan reproduksi bagi perempuan masih dianggap kurang.
- Masih kurangnya perhatian perusahaan terhadap pengembangan karir tenaga kerja perempuan

Langkah 4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi;

- Kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi kepada perusahaan terkait tenaga kerja perempuan
- Kurangnya Pengetahuan SDM aparatur pemerintah tentang Pengarusutamaan Gender.

Langkah 5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga;

- Perusahaan lebih mengutamakan peningkatan kapasitas produksi dibandingkan kesehatan bagi tenaga kerja perempuan.
- Masih adanya marginalisasi terhadap perempuan.

Langkah 6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan;

- Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan
- Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja perempuan agar dapat bersaing dengan tenaga kerja laki-laki.

Langkah 7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender;

- Bimtek Ketenagakerjaan dan Advokasi Kesehatan Reproduksi sekaligus Pemasangan Alat Kontrasepsi Bagi Pekerja Perempuan di perusahaan
- Bimtek Peningkatan Motivasi Penerima Manfaat Program PPA-PKH untuk kembali ke Dunia Pendidikan di Provinsi Banten Tahun 2016.

Langkah 8. Tetapkan *Baseline*;

- Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Bagi Tenaga Kerja Perempuan sebesar 50 %
- Meningkatkan keahlian tenaga kerja perempuan dalam jenjang karir sebesar 50 %

Langkah 9. Tetapkan indikator gender;

- Terciptanya kesejahteraan kesehatan reproduksi tenaga kerja perempuan sebesar 50 %
- Terlatihnya tenaga kerja perempuan dalam rangka peningkatan karir sebesar 50 %

Penulis menganalisis dari 9 langkah-langkah GAP yang dilakukan oleh pegawai dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten bahwa rencana aksi responsif gender dalam Bimtek Ketenagakerjaan dan Advokasi Kesehatan Reproduksi sekaligus Pemasangan Alat Kontrasepsi Bagi Pekerja Perempuan di perusahaan dan Bimtek Peningkatan Motivasi Penerima Manfaat Program PPA-PKH untuk kembali ke Dunia Pendidikan di Provinsi Banten Tahun 2016 untuk meningkatkan hubungan industrial, kesejahteraan pekerjadan perlindungan tenaga kerja terhadap perempuan dan anak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Disnakertrans sebagai *leading sector* dalam pelayanan ketenagakerjaan di Provinsi Banten dan juga sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Banten nomor 1 (satu) yaitu Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran karena

bertujuan untuk memberi perlindungan dan peluang bagi perempuan untuk dapat memaksimalkan potensinya di dalam dunia kerja.

Adapun setelah dibuatnya analisis menggunakan GAP, disusun GBS (*Gender Budget Statement*) sebagai pernyataan bahwa SKPD telah merencanakan anggaran responsif gender. Berikut GBS dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

Program : Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak

Analisis Situasi :

1) Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

Data angkatan kerja di Provinsi Banten menurut jenis kelamin tahun 2014 :

Laki-laki 3.546.825 (105 %)

Perempuan 1.791.220 (33 %)

Data Jumlah penduduk yang bekerja menurut jenis Kelamin pada tahun 2014:

Laki - laki 3.226.730 (96 %)

Perempuan 1.627.262 (33 %)

Akses :

-Masih banyak Perusahaan yang tidak memperhatikan kesejahteraan terhadap pekerja perempuan.

-Masih rendahnya tenaga kerja perempuan dalam persaingan kerja dengan tenaga kerja laki-laki.

Partisipasi :

-Kurangnya perhatian perusahaan terhadap kesehatan reproduksi bagi tenaga kerja perempuan.

-Rendahnya daya saing perempuan di banding laki-laki dalam upaya persaingan kesempatan kerja yang ada.

Kontrol :

- Kurangnya perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja perempuan di perusahaan terkait kesehatan reproduksi perempuan.
- Lemahnya komunikasi, Informasi dan edukasi terhadap kesempatan kerja bagi perempuan dalam pengembangan peningkatan karir.

Manfaat :

- Penerimaan manfaat terkait kesehatan reproduksi bagi perempuan masih dianggap kurang.
- Masih kurangnya perhatian perusahaan terhadap pengembangan karir tenaga kerja perempuan.

2) Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

- a. Faktor Kesenjangan yaitu : Kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi kepada perusahaan terkait tenaga kerja perempuan
- b. Penyebab Internal : Kurangnya Pengetahuan SDM aparatur pemerintah tentang Pengarusutamaan Gender.
- c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender :
 - Perusahaan lebih mengutamakan peningkatan kapasitas produksi di bandingkan kesehatan bagi tenaga kerja perempuan.
 - Masih adanya marginalisasi terhadap perempuan

Rencana Aksi :

Aktivitas :

- Bimtek Ketenagakerjaan dan Advokasi Kesehatan Reproduksi sekaligus Pemasangan Alat Kontrasepsi Bagi Pekerja Perempuan di perusahaan
- Bimtek Peningkatan Motivasi Penerima Manfaat Program PPA-PKH untuk kembali ke Dunia Pendidikan di Provinsi Banten Tahun 2016.

Alokasi Sumber Daya: Anggaran Rp 1.100.000.000,.

Outcomes

- Meningkatnya Hubungan Industrial, kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja sebesar 4,73%, meningkatnya Indeks pembangunan Masyarakat sebesar 75,13 % dan menurunnya Persentase pengangguran terbuka di Provinsi Banten sebesar 8,74 %.

Berdasarkan pernyataan dalam GBS (*Gender Budget Statement*) oleh Disnakertrans Provinsi Banten, penulis menganalisis bahwa besaran anggaran yang dialokasikan oleh Disnakertrans adalah sebesar 0,01% dari total APBD Provinsi Banten Tahun 2016 yang berjumlah Rp 8.656.395.495.445.

11. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis-Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan;

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Gender

Tujuan : Meningkatkan pemahaman PUG bagi aparatur dan mengintegrasikan PUG pada seluruh sektor pembangunan

Langkah 2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin (Kuantitatif dan Kualitatif);

-Pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender bagi aparatur di Provinsi Banten masih terbatas dan perlu ditingkatkan

-Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten sudah mulai diterapkan dari tahun 2006, pada tahun 2005 telah dikeluarkan Perda No. 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

-Anggaran berdasar Program dan Kegiatan responsif Gender di Provinsi Banten tahun 2014 : Rp. 195.318.548.850 (anggaran per kegiatan); 40 SKPD Provinsi Banten

Langkah 3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan;

Akses : Akses aparatur baik laki-laki maupun perempuan terhadap implementasi PUG dalam pembangunan masih kurang

Partisipasi : Partipasi aparatur baik laki-laki dan perempuan terhadap implementasi PUG dalam pembangunan masih kurang.

Kontrol : Kurangnya kontrol aparaturnya baik laki-laki dan perempuan terhadap Implementasi PUG dalam pembangunan

Manfaat : Kurang pengetahuan aparaturnya laki-laki dan perempuan tentang implementasi PUG dalam pembangunan

Langkah 4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi;

-Para pengambil keputusan belum memahami tentang implementasi PUG dalam pembangunan

-Kurangnya analisis penganggaran yang responsif gender

-Kurangnya personil yang memahami PPRG

Langkah 5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga;

-Masyarakat tidak mengetahui manfaat dari PUG dalam pembangunan

-Masyarakat menganggap program PUG adalah program hanya khusus untuk perempuan

-*Mindset* masyarakat tentang PUG masih menganggap urusan perempuan saja

Langkah 6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan;

Meningkatkan pemahaman PUG bagi aparaturnya baik perempuan maupun laki-laki untuk dapat mengintegrasikan PUG pada seluruh sektor pembangunan

Langkah 7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender;

Dokumen Perencanaan PUG : Inventarisasi anggaran yang responsif gender, Rakor PUG, Tim Penyusunan Pedoman PPRG, RTD Pembangunan PUG, Rapat rutin fasilitasi KHPPIA , Rakor KHPPIA, RTD Perencanaan PUHA, Rakor PUHA , Komparasi Perencanaan Penganggaran PUHA

Langkah 8. Tetapkan *Baseline*;

-Inventarisasi anggaran yang responsif gender belum terdokumentasikan dalam Program dan Kegiatan Yang Responsif Gender

-Perencanaan dan pengambil keputusan belum memahami analisis penganggaran yang responsif gender dan belum mencukupinya personil yang memahami PPRG

- Pengetahuan aparatur laki-laki dan perempuan tentang implementasi PUG dalam pembangunan masih kurang
- Kurangnya kontrol aparatur baik laki-laki dan perempuan terhadap PUG dalam pembangunan

Langkah 9. Tetapkan indikator gender;

- Meningkatnya IPG di Provinsi Banten (target tahun 2016 sesuai RPJMD Provinsi Banten 2012 - 2017 sebesar 68.29 % menjadi 69.39 % pada tahun 2017).;
- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur sehingga dapat terinventarisasi dan terdokumennya anggaran yang responsif gender bagi 20 orang perempuan dan 20 orang laki laki.;
- Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan analisis gender bagi 25 orang perencana SKPD laki laki dan 25 orang perencana SKPD Perempuan.
- Meningkatkan pemahaman aparatur sehingga dapat terinventarisasi dan terdokumenkan anggaran perlindungan anak bagi 30 orang perempuan dan laki-laki

Penulis menganalisis dari 9 langkah-langkah GAP yang dilakukan oleh pegawai dari Bappeda bahwa rencana aksi responsif gender dalam dokumen perencanaan PUGdi Provinsi Banten sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Bappeda sebagai *leading sector* perencanaan dan juga sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Banten nomor 9 (sembilan) yaitu pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah karena bertujuan untuk membuat perencanaan pengarusutamaan gender lebih baik.

Adapun setelah dibuatnya analisis menggunakan GAP, disusun GBS (*Gender Budget Statement*) sebagai pernyataan bahwa SKPD telah

merencanakan anggaran responsif gender. Berikut GBS dari Bappeda Provinsi Banten :

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran
 Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Gender

Analisis Situasi : Pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender bagi aparatur di Provinsi Banten masih terbatas dan perlu ditingkatkan. Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten sudah mulai diterapkan dari tahun 2006, pada tahun 2005 telah dikeluarkan Perda No. 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Rencana Aksi : Penyusunan Dokumen Perencanaan PUG dan PA

Aktivitas 1 : Inventarisasi Anggaran yang Responsif Gender

Output 1 :

- Tersedianya Tim Penyusunan Pedoman PPRG
- Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
- Program, Kegiatan dan Anggaran Yang Responsif Gender Tahun 2016 (SKPD dan Kabupaten/Kota)

Aktivitas 2 : Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan yang Responsif Gender

Output 2 : Program, Kegiatan dan Anggaran Yang Responsif Gender Tahun 2016 dan Tahun 2017 (SKPD dan Kabupaten/Kota)

Aktivitas 3 : Rakor Pelaksanaan Pembangunan yang Responsif Gender

Output 3 : Program, Kegiatan dan Anggaran Yang Responsif Gender Tahun 2016 dan Tahun 2017 (SKPD dan Kabupaten/Kota)

Aktivitas 4 : RTD Pembangunan yang Responsif Gender

Output 4 : Tersedianya Renja SKPD Tahun 2017

Aktivitas 5 : Bimtek Penyusunan GBS (*Gender Budget Statement*)

Output 5 : Tersedianya Fasilitator untuk penyusunan PPRG, Program, Kegiatan dan Anggaran Yang Responsif Gender Tahun 2016

(SKPD dan Kabupaten/Kota)

Aktivitas 6 :Rakor Perencanaan Perlindungan Anak

Output 6 : Program, Kegiatan dan Anggaran Perlindungan Anak Tahun 2016 dan Tahun 2017 (SKPD dan Kabupaten/Kota)

Aktivitas 7 :RTD Perlindungan Anak

Output 7 : Tersedianya Renja SKPD Tahun 2017

Alokasi Sumber Daya: Anggaran Rp 340.180.000,.

Outcomes :Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Banten (Target tahun 2016 sesuai RPJMD Provinsi Banten 2012-2017 sebesar 68.29% menjadi 69.39 %.

Berdasarkan pernyataan dalam GBS (*Gender Budget Statement*) oleh Bappeda Provinsi Banten, penulis menganalisis bahwa besaran anggaran yang dialokasikan oleh Bappeda adalah sebesar 0,004% dari Total APBD Provinsi Banten Tahun 2016 yang berjumlah Rp 8.656.395.495.445.

12. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)

Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis-Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan;

Program : Peningkatan Daya Saing Dan Pemasaran Produk Pertenakan, Perikanan,Pertanian, Dan Perkebunan

Kegiatan : Diversifikasi Produk Perikanan

Tujuan : Meningkatkan Konsumsi Ikan

Langkah 2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin (Kuantitatif dan Kualitatif);

Data Umum : Tingkat Konsumsi Ikan 29 kg/perkapita di provinsi Banten

Langkah 3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan;

Akses :

- Masih kurangnya konsumsi ikan karena masih tingginya harga ikan di daerah tertentu
- Masih adanya mindside tentang makan ikan
- Kurangnya informasi tentang manfaat makan ikan

Partisipasi :

- Masih kurangnya ibu-ibu untuk memberikan konsumsi ikan bagi keluarganya
- Masih adanya pengetahuan tentang cara pengolahan perikanan

Kontrol :

- Masih belum sinkron data pengolah hasil perikanan antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat
- Harus terus menerus melakukan penyuluhan tentang penganekaragaman pengolahan perikanan

Manfaat :

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana penganekaragaman pengolahan ikan
- Meningkatkan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil dengan meningkatkan konsumsi ikan

Langkah 4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi;

Program dan Dana Peningkatan Konsumsi Ikan masih kurang

Langkah 5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga;

- Masih kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan SKPD Lainnya
- Masih kurangnya sosialisasi tentang manfaat makan ikan

Langkah 6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan;

Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan dan pengetahuan bagaimana pengolahan ikan khususnya untuk anak-anak (responsif gender)

Langkah 7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender;

- Penyusunan Perencanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan
- Sosialisasi tentang manfaat makan ikan karena masih banyak masyarakat tentang mindset “banyak makan ikan itu cacingan”
- Memberikan pelatihan penganekaagaman pengolahan

Langkah 8. Tetapkan *Baseline*;

Tercapainya tingkat konsumsi ikan 32 kg/perkapita tahun 2016

Langkah 9. Tetapkan indikator gender;

- Meningkatkan Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB
- Tercapainya Target tingkat konsumsi Ikan

Penulis menganalisis dari 9 langkah-langkah GAP yang dilakukan oleh pegawai dari DKP bahwa rencana aksi responsif gender dalam sosialisasi gerakan makan ikan beserta pengolahannya di Provinsi Banten sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi DKP dan juga sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Banten nomor 3 (tiga) yaitu Pemantapan ketahanan pangan karena ikan termasuk produk pangan yang sehat.

Adapun setelah dibuatnya analisis menggunakan GAP, disusun GBS (*Gender Budget Statement*) sebagai pernyataan bahwa SKPD telah merencanakan anggaran responsif gender. Berikut GBS dari Dinas Kelautan dan Perikanan :

Program : Peningkatan Daya Saing Dan Pemasaran Produk
Pertanian, Perikanan, Pertanian, Dan Perkebunan

Kegiatan : Diversifikasi Produk Perikanan

Analisis Situasi :

1) Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

Data Umum : Target Tingkat Konsumsi Ikan

2) Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Faktor Kesenjangan yaitu :

Akses : -Masih adanya gizi buruk di masyarakat
 -Masih kurangnya Diversifikasi/ Penganekaragaman Pengolahan Perikanan

Partisipasi: Masih kurangnya kesadaran untuk meningkatkan gizi keluarga melalui makan ikan

Kontrol : -Masih belum sinkron data pengolah hasil perikanan antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat
 -Harus rutin melakukan penyuluhan tentang penganekaragaman pengolahan perikanan

Manfaat : Meningkatkan gizi khususnya memasyarakatkan makan ikan di masyarakat

b. **Penyebab Internal** : Program dan Dana Peningkatan Konsumsi Ikan masih kurang

c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender :

-Masih kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan SKPD Lainnya

-Masih kurangnya sosialisasi tentang manfaat makan ikan

Rencana Aksi :

Aktivitas :Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemar ikan)

Sumber Daya/*Input* : -Panitia dari aparaturn Dinas Kelautan dan Perikanan
 -Trainer dari KKP, Untirta
 -Peserta dari Masyarakat, Anak Usia Sekolah, PKK, Kader Posyandu

Output : Tercapainya tingkat konsumsi ikan 32 kg/perkapita

Alokasi Sumber Daya : Anggaran Rp 600.000.000,. dan Peralatan berupa Panggangan Ikan, Mobil Insulin, Cool Box, Freezer

Outcomes : -Meningkatkan Kontribusi sector perikanan terhadap PDRB dan Target tingkat konsumsi Ikan tercapai

Berdasarkan pernyataan dalam GBS (*Gender Budget Statement*) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, penulis menganalisis bahwa besaran anggaran yang dialokasikan oleh DKP adalah sebesar 0,007% dari Total APBD Provinsi Banten Tahun 2016 yang berjumlah Rp 8.656.395.495.445.

13. Badan Pendidikan dan Latihan

Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis- Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan;

Program : Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Kegiatan : Diklat Struktural Bagi PNS Daerah

Tujuan :

-Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural eselon III dan IV secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansinya.

-Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan kesatuan bangsa.

-Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

-Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Langkah 2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin (Kuantitatif dan Kualitatif);

Data Umum :

-Tahun 2012 badan diklat melatih Pejabat Eselon IV sebanyak 78 Orang

-Tahun 2013 badan diklat melatih Pejabat Eselon IV sebanyak 40 Orang

-Tahun 2014 badan diklat melatih Pejabat Eselon IV sebanyak 71 Orang

-Data Jumlah Peserta Diklatpim Tk. IV yang ditugaskan Tahun 2012

Laki-laki = 57 Orang (73,08 %)

Perempuan = 21 Orang (26,92 %)

-Data Jumlah Peserta Diklatpim Tk. IV yang ditugaskan Tahun 2013

Laki-laki = 31 Orang (77,5 %)

Perempuan = 9 Orang (22,5 %)

-Data Jumlah Peserta Diklatpim Tk. IV yang ditugaskan Tahun 2014

Laki-laki = 56 Orang (78,87 %)

Perempuan = 15 Orang (21,13 %)

Langkah 3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan;

Akses :

-Kurangnya informasi kepada pejabat Eselon IV perempuan

-Penugasan terakut diklatpim IV lebih diutamakan laki-laki

Partisipasi :

-Secara akumulatif terdapat perbedaan yang nyata antara laki-laki dan perempuan

Kontrol :

-Belum semua peserta dalam hal ini perempuan memiliki kewenangan dalam menentukan jenis pelatihan yang diterima karena kurikulum sudah ditentukan

Manfaat :

-Tidak ada perbedaan dalam memperoleh pelatihan tersebut

Langkah 4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi;

-Kurangnya koordinasi dengan BKD terkait penugasan pejabat eselon IV untuk mengikuti Diklatpim dan Kurangnya SDM

Langkah 5. Temu kenali isu gender di eksternal lembaga;

-Lemahnya koordinasi BKD dengan SKPD terkait kebutuhan peserta Diklatpim

-Lemahnya data terkait peserta yang akan mengikuti dan sudah mengikuti Diklatpim

Langkah 6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan;

Meningkatkan partisipasi perempuan dalam mengikuti Diklatpim Tk. IV

Langkah 7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender;

Diklat Kepemimpinan Tk. IV

Langkah 8. Tetapkan *Baseline*;

Meningkatnya kualitas peserta dalam melakukan proyek perubahan di instansi masing-masing

Langkah 9. Tetapkan indikator gender;

Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan

Penulis menganalisis dari 9 langkah-langkah GAP yang dilakukan oleh pegawai dari Badiklat bahwa rencana aksi responsif gender dalam Diklatpim IV di Provinsi Banten sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Badiklat sebagai *leading sector* penyelenggaraan pendidikan dan latihan dan juga sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Banten nomor 9 (sembilan) yaitu pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah daerah karena bertujuan untuk membuat perempuan terlatih dalam kepemimpinan.

Adapun setelah dibuatnya analisis menggunakan GAP, disusun GBS (*Gender Budget Statement*) sebagai pernyataan bahwa SKPD telah merencanakan anggaran responsif gender. Berikut GBS dari Badiklat :

Program : Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Kegiatan : Diklat Struktural Bagi PNS Daerah

Analisis Situasi :

1) Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

Data Umum :

-Tahun 2012 badan diklat telah melatih Pejabat Eselon IV sebanyak 78 Orang

-Tahun 2013 badan diklat telah melatih Pejabat Eselon IV sebanyak 40 Orang

-Tahun 2014 badan diklat telah melatih Pejabat Eselon III sebanyak 71 Orang

-Data Jumlah Peserta Diklatpim Tk. IV yang ditugaskan Tahun 2012

Laki-laki = 57 Orang (73,08 %)

Perempuan = 21 Orang (26,92 %)

-Data Jumlah Peserta Diklatpim Tk. IV yang ditugaskan Tahun 2013

Laki-laki = 31 Orang (77,5 %)

Perempuan = 9 Orang (22,5 %)

-Data Jumlah Peserta Diklatpim Tk. IV yang ditugaskan Tahun 2014

Laki-laki = 56 Orang (78,87 %)

Perempuan = 15 Orang (21,13 %)

Akses : -Kurangnya informasi kepada pejabat Eselon IV perempuan

-Penugasan terkait diklatpim Tk. IV lebih diutamakan laki-laki

Partisipasi: Secara akumulatif terdapat perbedaan yang nyata antara laki-laki dan perempuan

Kontrol : Belum semua peserta dalam hal ini perempuan memiliki kewenangan dalam menentukan jenis pelatihan yang diterima karena kurikulum sudah ditentukan

Manfaat : Tidak ada perbedaan didalam memperoleh pelatihan tersebut

2) Isu dan Faktor Kesenjangan Gender.

a. Faktor Kesenjangan yaitu : Kurangnya koordinasi dengan BKD terkait penugasan pejabat eselon IV untuk mengikuti Diklatpim

b. Penyebab Internal : Kurangnya SDM

c. Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender :

-Lemahnya koordinasi BKD dengan SKPD terkait kebutuhan peserta Diklatpim

-Lemahnya data terkait peserta yang akan mengikuti dan sudah mengikuti
Diklatpim

Rencana Aksi :

Aktivitas 1 :Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan

Output 1 : Pada tahap ini peserta on campus dengan penekanan pembelajaran pada pengembangan wawasan kebangsaan dan integritas. Selain itu, peserta mulai melakukan diagnosa kebutuhan untuk perubahan di kantornya.

Aktivitas 2:Tahap *Taking Ownership (Breakthrough I)*

Output 2 : Tahap kedua, peserta off campuss yaitu kembali ke tempat kerjanya untuk memperdalam kebutuhan perubahan dan melakukan komunikasi dengan stakeholder. Pada tahap ini, peserta harus sudah dapat menentukan topik perubahan.

Aktivitas 3:Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim

Output 3 : Tahap ketiga, peserta kembali on campuss. Pada tahap ini pembelajaran menekankan pada penyusunan proposal proyek perubahan.

Aktivitas 4:Tahap Laboratorium Kepemimpinan (*Breakthrough II*)

Output 4 : Tahap keempat, peserta kembali off campuss. Pada tahap ini, peserta mengimplementasikan proyek perubahan di tempat kerjanya. Keberhasilan peserta dalam diklat lebih banyak ditentukan pada tahap ini. Peserta harus mampu menyelesaikan proyek perubahan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada proposal proyek perubahan.

Aktivitas 5 : Tahap Evaluasi

Output 5 : Pada tahap ini, peserta mempresentasikan hasil yang telah dicapai selama implementasi proyek perubahan yang telah dilakukan pada Tahap IV. Peserta yang berhasil lulus adalah yang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proposal proyek perubahannya.

Alokasi Sumber Daya : Anggaran Rp 840.229.000,.

Outcomes : Meningkatnya kualitas peserta perempuan dalam melakukan proyek perubahan di instansi masing-masing

Berdasarkan pernyataan dalam GBS (*Gender Budget Statement*) oleh Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Banten, penulis menganalisis bahwa besaran anggaran yang dialokasikan oleh Badiklat adalah sebesar 0,01% dari Total APBD Provinsi Banten Tahun 2016 yang berjumlah Rp 8.656.395.495.445.

4.2.2.3 Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat ARG Tahun 2016

Faktor pendukung merupakan faktor yang memudahkan terlaksananya perencanaan sedangkan faktor penghambat yaitu faktor yang menjadi kendala terlaksananya perencanaan. Tujuan mengidentifikasi kedua hal ini supaya dapat ditemukenali cara memperkuat faktor pendukung dan cara meminimalisasikan faktor yang menghambat pelaksanaan rencana. Dengan demikian, apabila ada gangguan yang datang secara tidak terduga dapat diantisipasi. Di sini akan dideskripsikan apa yang mendukung dan yang menghambat dalam merencanakan anggaran responsif gender. Penjelasan ini diawali dari hasil wawancara dengan Kabid PUG dan kualitas hidup BPPMD Provinsi Banten (I₁₋₂) melalui wawancara:

“Alhamdulillah pimpinan mendukung terbukti dari adanya Peraturan Gubernur untuk PPRG juga ada Surat Edaran dari Sekretaris Daerah untuk himbauan kepada SKPD agar merencanakan satu kegiatan responsif gender”(Wawancara dengan informan I₁₋₂, Selasa, 28 Juni 2016 pukul 14.35 WIB di Ruang Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup)

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Ibu Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup bahwa dengan adanya Peraturan Gubernur membuat komitmen menjadi lebih baik sehingga Sekretaris Daerah juga memberi dukungannya melalui turunnyanya Surat Edaran terkait kegiatan responsif gender. Jadi, bentuk komitmen Provinsi Banten dalam anggaran responsif gender ditunjukkan melalui diterbitkannya kebijakan. Provinsi Banten memang telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait anggaran responsif gender yaitu :

- a) Perda Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah
- b) Instruksi Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2005 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah
- c) Pergub Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- d) Keputusan Gubernur No. 269/Kep. 660-Huk/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG Provinsi Banten
- e) Keputusan Gubernur No. 269. 05/Kep. 769-Huk/2012 tentang Pembentukan Focal Point PUG Provinsi Banten

Adapun salah satu pegawai Bappeda Provinsi Banten Bidang Sosial Kemasyarakatan (I₁₋₁) menyebutkan mengenai kebijakan di Provinsi Banten melalui wawancara :

“Ya ada kebijakannya tahun ini ada Surat Keputusan (SK) Focal Point di SKPD. Itu terobosan tahun ini. SKPD mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Focal Point untuk menunjukkan bahwa SKPD tersebut punya aturan untuk melakukan analisis gender. Kalau kebijakan yang sudah-sudah memang pelaksanaannya masih pelan-pelan perkembangannya tapi yang terpenting adalah komitmen dari pimpinan” (Wawancara dengan informan I₁₋₁, Senin 30 Mei 2016 Pukul 12.52 WIB di Ruang Bidang Sosial Kemasyarakatan)

Berdasarkan wawancara dengan informan dari Bidang Sosial Kemasyarakatan Bappeda Provinsi Banten menyatakan bahwa SKPD mulai

mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Focal Point sebagai dasar bagi SKPD untuk melakukan analisis gender dan kebijakan-kebijakan tentang anggaran responsif gender sudah berjalan tetapi capaiannya masih rendah dan paling penting menurut informan dari Bappeda itu adalah bentuk komitmen dari pimpinan. Selain dukungan dalam bentuk kebijakan, dukungan dalam bentuk data terpilah mayoritas didapat dari BPS Provinsi Banten dan Profil Gender Provinsi Banten. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Provinsi Banten :

“Biasanya kita ambil data terpilah di BPS. Kita punya buku Banten Dalam Angka. Intinya dari BPS Provinsi Banten. Masing-masing SKPD seharusnya ada karena kebutuhannya SKPD berbeda-beda”(Wawancara dengan informan_{I1-2}, Selasa, 28 Juni 2016 pukul 14.35 WIB di Ruang Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten bahwa data terpilah yang digunakan sebagai data kesenjangan gender berasal dari BPS Provinsi Banten yang diambil dari Buku Banten Dalam Angka. Kebutuhan SKPD yang berbeda-beda dalam mengatasi kesenjangan gender sehingga masing-masing SKPD memungkinkan untuk memiliki data terpilah tersendiri.

Faktor pendukung dalam merencanakan anggaran responsif gender, Provinsi Banten juga telah membentuk kelembagaan pengarusutamaan gender di Provinsi Banten terdiri dari Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG), Focal Point SKPD dan Sekretariat Bersama PPRG (Sekber PPRG). POKJA PUG merupakan kelompok yang mengelola

pengarusutamaan gender di tingkat daerah sedangkan Focal Point merupakan kelompok yang mengurus pengarusutamaan gender di tingkat SKPD sementara Sekber PPRG merupakan kelompok yang khusus memfasilitasi PPRG.

POKJA PUG di Provinsi Banten diatur dalam Perda PUG yang mana diketuai oleh Bappeda dan sekretarisnya yaitu BPPMD serta anggotanya yaitu SKPD-SKPD; Focal Point diketuai oleh Kepala SKPD dan Sekretarisnya yaitu Kepala Subbid PEP dengan anggotanya seluruh Kabid Teknis sedangkan Sekber PPRG diketuai oleh Bappeda sebagai *leading sector* perencanaan, sekretarisnya BPPMD Provinsi Banten dan Sekber ini mulai disosialisasikan kembali saat Rapat Koordinasi Tahun 2016. Berikut pernyataan melalui wawancara dengan Ibu Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten (I₁₋₂) :

“Kita ada sekretariat bersama, ada tim dalam percepatan penganggaran responsif gender, ini pun kita belum berjalan secara baik, artinya kita belum sepakat nanti seperti apa tugas masing-masing yang spesifik gender apalagi kalau tugas masing-masing disesuaikan dengan yang rutin mereka laksanakan, Bappeda sebagai ketua POKJA PUG dia lebih banyak inovasi, sedangkan BPPMD sebagai sekretaris POKJA PUG sehingga kami tidak capek sendiri, kalau tim ini sudah berjalan, sebetulnya enak kesannya cuma pemahamannya yang harus selalu kami sepakati bersama tim, karena saat ini masing-masing sibuk, belum ada kesepakatan untuk bertemu.” (Wawancara dengan informan I₁₋₂, Jum’at, 29 Juli 2016 pukul 13.37 WIB di Ruang Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten menyatakan bahwa Sekretariat Bersama sebagai tim untuk percepatan penganggaran responsif gender belum berjalan dengan baik karena yang berjalan selama ini Bappeda

Provinsi Banten sebagai Ketua POKJA PUG Provinsi Banten dan BPPMD Provinsi Banten sebagai Sekretaris POKJA PUG Provinsi Banten. Berkaitan dengan hal tersebut, belum ada kesepakatan antar anggota tim untuk membahas keberlangsungan tugas sebagai anggota tim Sekretariat Bersama PPRG. Lembaga *Driver* atau tim percepatan penganggaran responsif gender belum memenuhi tugas-tugasnya yang telah tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 dan bahkan informan dari DPPKD Provinsi Banten menyatakan bahwa DPPKD belum mendapatkan salinan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 yang salah satu isinya tentang tugas-tugas DPPKD dalam tim percepatan penganggaran responsif gender. Senada dengan pernyataan dari Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten, salah satu pegawai di Bidang Sosial Kemasyarakatan Bappeda Provinsi Banten (I₁₋₁) juga menambahkan melalui wawancara sebagai berikut :

“Saat Rapat Koordinasi pada Maret 2016 telah disosialisasikan kembali mengenai Sekber ini beserta tugas-tugas bagi masing-masing SKPD yang tergabung dalam Sekretariat Bersama PPRG ini. Dan hal tersebut sudah disepakati oleh seluruh peserta Rapat Koordinasi PUG. (Wawancara dengan informan I₁₋₁, Senin 30 Mei 2016 Pukul 12.52 WIB di Ruang Bidang Sosial Kemasyarakatan)

Berdasarkan pernyataan yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu pegawai di Bidang Sosial Kemasyarakatan Bappeda Provinsi Banten bahwa telah ada sosialisasi dan kesepakatan tentang tugas-tugas anggota tim Sekretariat Bersama PPRG. Penulis juga mengkaji bahwa di dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran

Responsif Gender Di Provinsi Banten telah diatur tugas dari Sekretariat Bersama PPRG namun di dalam Pergub Nomor 80 Tahun 2014 ini belum spesifik menyoar kepada tugas anggota tim tersebut. Tugas Sekretariat Bersama PPRG dalam pergub nomor 80 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tugas Sekretariat PPRG:

1. Menyusun program kerja setiap tahun;
2. Mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada masing-masing SKPD;
3. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran responsif gender;
4. Meneliti kepastian pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA-SKPD;
5. Menetapkan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG;
6. Melakukan pelatihan analisis gender dan penyusunan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan PPRG dalam Penyusunan RKA-SKPD;
7. Melakukan sosialisasi dan Advokasi kepada seluruh pejabat eselon 2 dan 3 di seluruh SKPD mengenai PUG dan PPRG; serta kepada Pemerintah kabupaten/kota;
8. Melakukan peningkatan kapasitas SDM bidang perencana di setiap SKPD dalam pelaksanaan PUG dan PPRG;
9. Meneliti dan memastikan pengintegrasian PUG dalam penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD;
10. Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
11. Menyusun Profil Gender Provinsi;
12. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-masing SKPD , Memonitor realisasi pelaksanaan PUG dan PPRG;
13. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah responsif gender;
14. Menyusun dan membuat laporan pengendalian dan evaluasi PPRG setiap Triwulan dan melaporkan kepada Sekretariat Bersama Fasilitasi Pelaksanaan Percepatan PPRG setiap semester.

Selama ini di lapangan, dalam pengerjaan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas tim Sekretariat Bersama PPRG dalam perencanaan anggaran responsif gender masih dibebankan kepada Bappeda Provinsi Banten sebagai Ketua POKJA PUG dan BPPMD Provinsi Banten sebagai Sekretaris POKJA PUG. Penulis kemudian melakukan kroscek mengenai pengerjaan tugas tim Sekretariat Bersama PPRG yang dibebankan kepada Bappeda Provinsi Banten dan BPPMD Provinsi Banten. Berikut wawancara dengan salah satu informan dari Bidang PEP DBMTR Provinsi Banten (I₂₋₃) :

“Membuat ARG diminta oleh BPPMD dikirim lewat email, DBMTR juga diundang oleh BPPMD untuk menghadiri Bimbingan Teknis PPRG, Kalau Bappeda memberi arahan ke DBMTR dan SKPD lainnya agar memasukkan satu kegiatan yang responsif gender, ada lagi saat Rapat Koordinasi juga ada Bappeda hadir di sana. Selain BPPMD dan Bappeda, tidak ada SKPD lainnya yang bahas gender atau mengecek ke DBMTR tentang gender.” (Wawancara dengan informan I₂₋₃, Selasa, 09 Agustus 2016 pukul 14.49 WIB di Ruang Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Program)

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari informan di Bidang PEP DBMTR Provinsi Banten bahwa DBMTR diminta membuat ARG oleh BPPMD setelah sebelumnya diundang untuk menghadiri Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG. DBMTR mendapat arahan dari Bappeda dalam menyusun kegiatan yang responsif gender saat Rapat Koordinasi. Selain BPPMD dan Bappeda, tidak ada yang meminta dokumen PPRG ke DBMTR.

Penulis juga mengkaji bahwa di dalam struktur organisasi BPPMD terdapat Bidang Pengarusutamaan Gender dan di Bappeda Provinsi Banten terdapat Seksi Sosial Gender meskipun gender tidak tertera di dalam struktur organisasi di SKPD lainnya tetapi permasalahan gender tetap merupakan

permasalahan yang hanya dapat diselesaikan secara sinergi antar SKPD bukan hanya SKPD sektor tertentu. Permasalahan gender ini tentu saja membutuhkan keterlibatan tidak hanya dari SKPD sebagai perencana dan pelaksana kegiatan tetapi juga memerlukan keterlibatan dari legislatif dan lembaga swadaya masyarakat yang mendukung proses perencanaan anggaran responsif gender.

Dalam kaitannya dengan gender ini, Provinsi Banten memiliki organisasi yang bernama Kaukus Parlemen Perempuan. organisasi ini bertujuan untuk mewadahi anggota-anggota dewan perempuan agar senantiasa dapat mewakili aspirasi kebutuhan-kebutuhan perempuan maupun anak-anak. Hasil wawancara dengan salah satu informan yang merupakan Ketua Kaukus Parlemen berikut akan mendeskripsikan apa saja keterlibatannya kaukus parlemen perempuan dalam perencanaan anggaran responsif gender di Provinsi Banten :

“Kaukus Parlemen Perempuan secara terorganisir di internal parlemen dengan memberdayakan dan mengoptimalkan perempuan parlemen, mengembangkan tugas, pokok dan fungsi di setiap komisi, untuk itu kita berupaya agar pendidikan mencapai 20% dan memaksimalkan pelayanan kesehatan di tiap kecamatan tetapi kuota keterwakilan perempuan di parlemen masih 20% lebih” (Wawancara dengan informan I₃₋₂, Rabu, 31 Mei 2017 pukul 11.16 WIB di Ruang Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I₃₋₂ bahwa keterlibatan kaukus parlemen perempuan sebagai wadah anggota dewan perempuan yang mengupayakan untuk saling memperkuat setiap anggota dewan perempuan agar berani mengaspresiasi kebutuhan perempuan khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga dapat berkompetisi saat pengambilan

kebijakan yang mengutamakan persoalan perempuan. Hal ini berarti keterlibatan kaukus parlemen perempuan dalam perencanaan anggaran responsif gender sebagai penggerak anggota dewan perempuan untuk berfokus pada usulan-usulan yang responsif gender. Dalam wawancara berikut dengan salah satu informan yang merupakan anggota dewan perempuan dari Fraksi Gerindra menyatakan keterlibatannya sebagai anggota dewan di dalam perencanaan anggaran responsif gender :

“Keterlibatan saya dari Baperda Bagian legislasinya pada tahun 2016 itu saya menjadi Ketua Pansus tentang perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan yang sekarang sudah dibuat Peraturan Daerahnya, kita sudah mengatur di dalamnya bagaimana melindungi perempuan dan anak baik di tingkat private maupun publik jadi pemerintah memiliki kewajiban untuk membina organisasi-organisasi perempuan yang ada di Provinsi Banten agar bisa ikut memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang responsif gender” (Wawancara dengan informan I₃₋₁, Rabu, 31 Mei 2017 pukul 11.53 WIB di Ruang Komisi V DPRD Provinsi Banten)

Berdasarkan wawancara dengan informan I₃₋₁ bahwa sebagai anggota dewan, dirinya mengupayakan diri agar dapat terlibat dalam pengambilan kebijakan terkait kebutuhan perempuan dan anak seperti pada tahun 2016 menjadi ketua pansus perda kekerasan anak. Jadi, keterlibatan anggota dewan secara tidak langsung berperan dalam kegiatan responsif gender. Adapun selain keterlibatan legislatif, ada pula keterlibatan di masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang menurut Kepala Bidang PUG dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten yang memiliki fokus kepada PPRG. Berikut merupakan wawancara dengan salah satu anggota LSM Pattiro Banten:

“Tahun 2016 Pattiro Banten tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan anggaran responsif gender. Pada Tahun 2015, Pattiro Banten pernah dilibatkan dalam melakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Provinsi Banten dalam menyusun analisis anggaran responsif gender melalui Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), yang dijumpai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) karena pada saat itu belum ada penerapan ARG yang sesuai petunjuk pelaksanaan dari KPPPA. Selama 2015-2016, ini Pattiro Banten sedang melakukan assesment terhadap tim driver PPRG dalam menyusun GAP GBS dan mencoba mengadvokasi proses perencanaan ARG di Provinsi Banten.” (Wawancara dengan informan I₄₋₁, Rabu, 22 Mei 2017 pukul 13.32 WIB di Ruang Rapat Pattiro Banten)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan I₄₋₁ bahwa Pattiro Banten pernah dilibatkan saat tahun 2015 dimana Pattiro diminta untuk melatih aparatur Pemerintah Provinsi Banten agar meningkatnya kapasitas dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dan pada tahun 2016, Pattiro Banten tidak pernah dilibatkan oleh Pemerintah Provinsi Banten tetapi Pattiro Banten selama 2015-2016 melakukan *assessment* kepada tim *driver* PPRG dan mencoba melakukan advokasi kepada Pemerintah Provinsi Banten. Jadi, faktor pendukung dalam terlaksananya anggaran responsif gender yaitu adanya kebijakan terkait responsif gender dan adanya peran BPPMD dan Bappeda sementara faktor penghambatnya yaitu kurangnya koordinasi antar anggota tim Sekretariat Bersama PPRG dan partisipasi dari keterlibatan berbagai pihak baik itu legislatif maupun lembaga swadaya masyarakat.

Dalam mengatasi hambatan dan dengan adanya dukungan tersebut, Provinsi Banten memiliki cara untuk mengantisipasi hal-hal yang mengganggu proses perencanaan anggaran responsif gender. Berikut

dijelaskan melalui wawancara dengan salah satu informan yang merupakan staf pelaksana di Bidang Sosial Kemasyarakatan Bappeda Provinsi Banten :

“Selama ini kami mengandalkan kegiatan advokasi baik itu kepada pimpinan, perencana atau pun kepada pelaksana teknis. Advokasi ini bentuknya seperti rapat koordinasi atau pelatihan PPRG di setiap tahunnya. Ini ditujukan untuk memberikan pemahaman staf yang dikirim oleh perwakilan dari SKPD yang selalu berganti-ganti. Dengan dilatih, staf tersebut akan memiliki kapasitas untuk menganalisis gender di kegiatan SKPDnya masing-masing.”
”(Wawancara dengan informan I₁₋₁, Senin 30 Mei 2016 Pukul 12.52 WIB di Ruang Bidang Sosial Kemasyarakatan)

Berdasarkan wawancara dengan staf pelaksana di Bidang Sosial Kemasyarakatan Bappeda Provinsi Banten bahwa antisipasi perencanaan anggaran responsif gender selama ini dengan menekankan pada advokasi baik itu pimpinan, perencana atau pelaksana teknis yang menjadi perwakilan dari SKPD. Ini dikarenakan pihak yang dikirim masing-masing SKPD untuk ikut pelatihan PPRG selalu berganti-ganti setiap tahun. Akibatnya, Bappeda Provinsi Banten dan BPPMD Provinsi Banten selalu mengupayakan bagaimana kegiatan advokasi ini harus menjadi prioritas di setiap tahunnya. Hal ini dinyatakan oleh Kabid PUG dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten (I₁₋₂) dalam wawancara sebagai berikut :

“Anggaran kita untuk pelatihan ini hampir dicoret, waktu itu Bappeda berkomentar, mengapa selalu pelatihan setiap tahun. Lalu kita jelaskan alasannya namun Bappeda menolak untuk tetap mengadakan pelatihan tetapi kami punya cara dengan mengganti nama kegiatannya menjadi advokasi yang di dalamnya juga ada pelatihannya”(Wawancara dengan informan I₁₋₂, Selasa, 28 Juni 2016 pukul 14.35 WIB di Ruang Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang PUG dan Kualitas Hidup Provinsi Banten bahwa alokasi anggaran untuk pelatihan sudah tidak diperbolehkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dari Bappeda karena selalu melaksanakan pelatihan setiap tahunnya. Akhirnya, BPPMD melakukan perubahan nama kegiatan yang pada dasarnya saat pelaksanaan bentuknya adalah kegiatan pelatihan. Anggaran BPPMD untuk pelatihan terbatas sehingga hanya bisa mengundang satu orang dari tiap perwakilan SKPD padahal untuk melatih keterampilan analisis gender adalah penting manfaat ke depannya agar pegawai semakin responsif.

4.2.2.4 Mengembangkan Rencana dan Menjabarkannya

Pengembangan rencana harus dipahami oleh pelaksana kegiatan agar seluruh pihak dapat mencapai sasaran dan tujuan dari anggaran responsif gender di tahun 2016. Di Provinsi Banten dilakukan pelatihan PPRG atau sosialisasi PPRG untuk membangun kapasitas pegawai yang ada di SKPD agar terampil dalam menganalisis gender pada anggaran SKPD masing-masing. Pelatihan ini diadakan oleh BPPMD Provinsi Banten sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan kegiatan teknis pengarusutamaan gender. Pada tahun 2016, seluruh SKPD diminta mengirimkan satu orang Kepala Sub Bagian Program untuk mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis PPRG tetapi staf yang mewakili SKPD untuk hadir di pelatihan tersebut hanya berjumlah 25 peserta dari yang seharusnya 42 peserta.

Para pegawai setelah mendapat pelatihan diminta untuk melakukan tindak lanjut dengan *transfer knowledge* hasil pelatihan Bimbingan Teknis PPRG. Tujuannya adalah untuk berbagi pemahaman tentang hal-hal yang responsif gender terutama yang berada dalam lingkup kewenangan SKPDnya. Salah satu pegawai dari Satpol PP (I₂₋₆) mengatakan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Setelah bimtek PPRG atau pelatihan, rapat dan sebagainya saya seperti biasa menceritakannya kepada kawan-kawan di satu bidang, Itu sudah menjadi kebiasaan. Untuk menceritakan kepada bidang lain, hanya satu atau dua orang. Belum bisa menyampaikan di forum yang sifatnya resmi, untuk sampai pada forum seperti itu butuh pendekatan juga kepada pimpinan dari berbagai bidang. Saya belum berani dengan posisi saya seperti ini lagipula Satpol PP pun sifatnya bukan fokus gender juga dan kita hanya mendukung gender seperti sekarang ini. Semestinya BPPMD yang membuat forum resminya karena mereka yang punya kewenangannya jadi bisa melakukan pendekatan kepada atasan-atasan yang ada di bidang-bidang.”(Wawancara dengan informan I₂₋₆, Rabu, 21 Juni 2017 pukul 12.25 WIB di Ruang Bidang Pemadam Kebakaran)

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari informan di Satpol PP menyatakan bahwa setelah mengikuti Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG, beliau hanya menceritakan kepada teman-temannya secara informal dalam satu bidang tetapi ada juga teman dari lain bidang yang ikut mendengarkan ceritanya tentang hasil dari Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG. Beliau belum berani untuk menyampaikan dalam forum yang formal dikarenakan posisi jabatannya tidak memungkinkan untuk menegosiasikan dan melakukan pendekatan kepada pimpinan di berbagai bidang untuk mengadakan forum yang membahas gender.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban peserta pelatihan untuk menyebarkan hasil pelatihannya, penulis juga mempertanyakan bagaimana tanggapan pimpinan pasca pelatihan bimbingan teknis fasilitator PPRG, berikut hasil wawancara dengan salah satu pegawai dari Satpol PP (I₂₋₆) :

“Sebenarnya pimpinan mendukung, hanya saja pengetahuan tentang gender yang ada pada pemangku kebijakan perlu ditingkatkan lagi pemahamannya, saat ini belum memberikan ruang bagi anggaran kegiatan gender” .”(Wawancara dengan informan I₂₋₆, Rabu, 21 Juni 2017 pukul 12.25 WIB di Ruang Bidang Pemadam Kebakaran)

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari informan di Satpol PP menyatakan bahwa tanggapan pimpinan pasca pelatihan bimbingan teknis fasilitator PPRG yaitu mendukung kegiatan yang responsif gender hanya saja belum dapat mengalokasikan anggaran responsif gender di SKPDnya.

4.3 Pembahasan

Pada tahapan ini, peneliti melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data yang telah diinterpretasikan dalam deskripsi hasil penelitian karena dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah Perencanaan Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 maka pembahasan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan anggaran responsif gender dalam APBD Provinsi Banten Tahun 2016

Dalam menentukan sasaran anggaran responsif gender, Provinsi Banten mengacu kepada Pergub Nomor 80 Tahun 2014 Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran

Responsif Gender Di Provinsi Banten sehingga semua SKPD menyusun anggaran responsif gender dengan didahului oleh analisis gender lalu dilanjut membuat GAP, GBS (*Gender Budget Statement*) dan TOR. Berdasarkan kenyataan di lapangan, analisis gender dilakukan bukan pada saat penyusunan rancangan awal Renja SKPD di bulan Februari hingga Maret 2016 tetapi saat anggaran masing-masing SKPD telah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di bulan Desember 2016. Pola analisisnya pun berbentuk *top-down* artinya perencana melihat nama kegiatan terlebih dahulu yang menurut perencana berkaitan dengan responsif gender dari keseluruhan kegiatan yang ada dalam DPA kemudian baru dicari data yang sesuai dengan kegiatan yang dipilih. Pola tersebut tidak sesuai karena idealnya perencana menemukan kesenjangannya terlebih dahulu baru kemudian menganalisis apakah kegiatan yang sudah ada yang bisa menyelesaikan permasalahan gender yang ditemukan. Selain itu, hanya 17 SKPD dari 42 SKPD (38 % dari jumlah keseluruhan SKPD) di Provinsi Banten yang telah mengumpulkan dokumen responsif gender hasil analisis di masing-masing SKPD.

Kendala terbesar dalam pengumpulan dokumen dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, SKPD sebagai pihak yang merencanakan program dan kegiatan serta wajib mengumpulkan dokumen responsif gender memiliki kendala dengan pimpinan yang belum memahami persoalan gender sehingga dokumen responsif gender belum dapat disusun dan di sisi lainnya, BPPMD sebagai pihak pengumpul dokumen responsif gender memiliki kendala dalam

menghadapi SKPD yang kurang aktif dalam memberikan tanggapan ketika diminta mengumpulkan dokumen responsif gender.

2. Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang anggaran responsif gender dalam APBD Provinsi Banten Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Provinsi Banten diupayakan minimal 5% dari total APBD Provinsi untuk membiayai program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender. Keadaan, situasi dan kondisi sekarang anggaran responsif gender saat ini dapat melihat dari capaian anggaran responsif gender tahun 2015 yang hanya mencapai 0,83% sebesar Rp 60.614.388.716,- dari total APBD 2015 yang berjumlah Rp 7.328.220.769.427,- sedangkan pada tahun 2016 mencapai 2,83% sebesar Rp 199.129.478.435,- dari APBD Tahun 2016 yang berjumlah Rp 8.656.395.495.445,-.Capaian anggaran responsif gender mengalami kenaikan meskipun tidak dapat mencapai seperti yang tertera di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005. Berdasarkan wawancara dari beberapa informan, diperoleh informasi bahwa sebanyak 25 SKPD belum mengumpulkan dokumen anggaran responsif gender karena tidak ada anggaran responsif gender di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran misalnya menurut informan dari Satpol PP yang menyatakan bahwa ketika itu anggaran gender ini pernah diajukan kepada pimpinan ternyata tidak disetujui oleh pimpinan sebab di instansinya belum memprioritaskan fokusnya dalam

kegiatan responsif gender sehingga tidak dapat memenuhi permintaan untuk mengumpulkan dokumen responsif gender karena memang tidak tercantum di dalam Rencana Kerja Satpol PP.

3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat anggaran responsif gender dalam APBD Provinsi Banten Tahun 2016

Faktor pendukung anggaran responsif gender yang utama berdasarkan data di lapangan di Provinsi Banten adalah adanya kebijakan yang mendukung anggaran responsif gender sehingga memudahkan untuk tindak lanjut dalam mempercepat penyusunan anggaran responsif gender dan peran aktif Bappeda Provinsi Banten sebagai Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Provinsi Banten dan BPPMD Provinsi Banten sebagai Sekretaris BPPMD Provinsi Banten dalam menggerakkan SKPD untuk menyusun kegiatan yang sensitif gender sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya koordinasi yang mana menurut data di lapangan melalui wawancara bahwa SKPD akan melakukan pergerakan jika BPPMD Provinsi Banten maupun Bappeda Provinsi Banten memberikan dorongan dan arahan terkait hal-hal yang responsif gender sehingga pekerjaan tim percepatan penganggaran responsif gender masih dibebankan kepada Bappeda Provinsi Banten dan BPPMD Provinsi Banten. Lembaga *Driver* atau tim percepatan penganggaran responsif gender belum memenuhi tugas-tugasnya yang telah tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 dan bahkan informan dari DPPKD Provinsi Banten

menyatakan bahwa DPPKD belum mendapatkan salinan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 yang salah satu isinya tentang tugas-tugas DPPKD dalam tim percepatan penganggaran responsif gender.

Cara meminimalisasikan faktor penghambat itu sama dengan cara yang digunakan untuk memaksimalkan faktor pendukung yaitu melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan responsif gender kepada para pegawai di SKPD sehingga BPPMD Provinsi Banten sebagai bagian teknis pengarusutamaan gender melakukan upaya antisipasi untuk selalu tetap ada anggaran semacam pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan cara mengganti nama kegiatan pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan nama yang serupa pelatihan contohnya advokasi atau bimbingan teknis.

4. Mengembangkan rencana dan menjabarkan anggaran responsif gender dalam APBD Provinsi Banten Tahun 2016

Dalam mengembangkan rencana anggaran responsif gender, pelaksana anggaran responsif gender perlu memahami seperti apa gambaran rencananya sehingga ketika pelaksana mendapat masalah bisa dijadikan solusi atas permasalahan tersebut. Perwakilan dari salah satu pegawai tiap-tiap SKPD setelah mendapat pelatihan berupa Bimbingan Teknis Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) agar dapat melakukan *transfer knowledge* di SKPD masing-masing. Berdasarkan hasil melalui wawancara, pegawai yang telah mewakili SKPDnya untuk ikut

Bimbingan Teknis Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) belum percaya diri untuk melakukan *transfer knowledge* di forum yang formal dan biasanya pegawai tersebut hanya menyebarkan pengetahuannya sembari bercerita rutinitas sehari-hari dengan pegawai terdekat. Adapun pertanggungjawaban pasca pelatihan Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG dari pegawai yang mewakili SKPDnya kepada pimpinan misalnya informan dari Badan Ketahanan Pangan Daerah dengan melaporkan kepada pimpinan bahwa ia telah mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis Fasilitator PPRG dan mengatakan bahwa SKPDnya wajib untuk menyusun dokumen PPRG akan tetapi atasan menanggapi bahwa kegiatan responsif gender belum menjadi prioritas di SKPDnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti kemukakan pada BAB IV mengenai Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dijelaskan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dalam Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan anggaran responsif gender dilakukan analisis secara *top-down*. *Kedua*, Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang dalam anggaran responsif gender dapat diketahui dari pencapaian anggaran responsif gender terhadap total APBD Provinsi Banten pada tahun 2016 sebesar 2,83% dan pada tahun sebelumnya sebesar 0,83%. *Ketiga*, Faktor pendukungnya yaitu adanya kebijakan anggaran responsif gender dan peran aktif POKJA PUG serta faktor penghambatnya yaitu koordinasi yang belum terjalin intensif. Kedua hal tersebut diantisipasi melalui pelatihan atau sosialisasi PPRG pada setiap tahunnya. *Keempat*, Mengembangkan rencana dan menjabarkan anggaran responsif gender tergantung pimpinan dalam mengakomodir usulan

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Provinsi Banten, sebagai berikut :

1. Memaksimalkan pemahaman perencanaan dan penganggaran daerah dengan mengkomunikasikan pentingnya anggaran responsif gender kepada pimpinan pelaksana kegiatan.
2. Memperkuat koordinasi antara tim percepatan penganggaran responsif gender melalui tiga kali pertemuan dalam setahun agar lebih intensif.
3. Memaksimalkan pelaksanaan tugas tiap anggota tim percepatan penganggaran responsif gender dengan menetapkan *reward and punishment*.
4. Memperkuat koordinasi antar bidang di setiap SKPD supaya anggaran responsif gender dapat diwujudkan dengan membahas tolak ukur bagi capaian anggaran responsif gender ketika pembahasan anggaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alwasilah, A. C. 2003. *Pokoknya Kualitatif : Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Amirullah & Haris Budiyo. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Pustaka Setia.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana .
- Daft, Richard L. 2002. *Manajemen : Edisi Kelima Jilid Satu*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta : Rajawali Press.
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Fakih, Mansour. 2007. *Analisis Gender Dan Transformasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Firdaus, Muhammad. 2008. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Fuady, A. H., Dati Fatimah, Rinto Andriono, Wahyu W. B. 2002. *Memahami Anggaran Publik*. Yogyakarta : Institut of Development and Economic Analysis.
- Handoko, T. Hani. 1993. *Manajemen II*. Yogyakarta : BPFE YOGYAKARTA.
- _____. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE YOGYAKARTA.
- _____. 2013. *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV ANDI Offset.
- Mastuti, Sri dan Rinusu. 2007. *Anggaran Responsif Gender: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Civic Education and Budget Transparency Advocation.
- Miles, M. B dan Huberman A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Arman Hakim. 2006. *Manajemen Industri*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Panggabean, Mutiara Sibarani. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor Selatan : PT Ghalia Indonesia.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Ke-3*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sholeh, Habib dan Heru Rochmansyah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung : FOKUSMEDIA.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suparmoko, M. 2009. *Metode Penelitian Praktis (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis)*. Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA.
- The Liang Gie. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

PUBLIKASI ELEKTRONIK

- Budlender, Debbie dan Guy Hewitt. 2003. *Engendering Budget : A Practitioners' Guide to Understanding and Implementing Gender-responsive Budgets*. London : Commonwealth Secretariat. Melalui www.unicef.org/lac/spbarbados/Finance/Global/Guide_engendering_budgets_2003.pdf. Diakses tanggal 14 April 2016.
- Civardi, Deborah. 2014. *Stoljar's Gender Nominalism vs Gender Realism*. Melalui, <http://www.academia.edu/7835355/Stoljars_Gender_Nominalism_vs_Gender_Realism>. Diakses tanggal 23 Januari 2018
- (tanpa nama). (tanpa tahun). *Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. <https://publikasi.kominfo.go.id/handle/54323613/647?show=full>. Diakses 28 Oktober 2015.
- (tanpa nama). (tanpa tahun). *Karakteristik Anggaran Responsif Gender*. www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw51/pdfs/panelpapers/Rhonda%20Sarp.pdf . Diakses tanggal 07 Januari 2016.
- Kestari, Mira. 2011. *Analisis Alokasi Anggaran Responsif Gender Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Pada APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2008-2010*. Tesis FISIP Universitas Indonesia. <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20238047&lokasi=lokal>. Diakses tanggal 07 April 2016.
- Mikkola, Mari. 2017. *Feminist Perspectives on Sex and Gender*. Melalui, <<https://plato.stanford.edu/entries/feminism-gender>>. Diakses tanggal 23 Januari 2018
- Pitu, Marisa. 2010. *Analisis Anggaran Responsif Gender Di Provinsi Banten Tahun 2008 & 2009*. Skripsi, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. <http://repository.fisip-untirta.ac.id/view/creators/Pitu=3AMarisa=3A=3A.html>. Diakses tanggal 24 Oktober 2015.
- Sodani, P.R. and Sharma, Shilpi. 2008. *Gender Responsive Budgeting*. Journal of Health Management Vol.10, No. 2. m.jhm.sagepub.com/content/10/2/227.extract?patientinform-links=yes&legid=spjhm%3b10/2/227. Diakses tanggal 06 Maret 2016.

DOKUMEN NEGARA

Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2013.

Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah Tahun 2015.

Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender
Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2015.

Sundari, Eva K, Maya Rostanty, Hana Satriyo, Mimin Rukmini, Lily Purba,
Maryati, Fitria, Dini Mentari, Susana Dewi R. 2008. Modul Pelatihan
Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender (Edisi
Revisi). Jakarta : PATTIRO.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pergub Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Strategi Daerah Percepatan
Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan Dan Penganggaran
Responsif Gender Di Provinsi Banten.

Undang-Undang Dasar 1945: UUD 1945. 2009. UUD 1945 (Amandemen
Lengkap) & Susunan Kabinet 2009-2014. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

DAFTAR ISTILAH

Gender

merupakan suatu konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat terhadap perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan. Gender ini bukan jenis kelamin yang mana sifatnya kodrati tetapi gender ini dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Sasaran gender yaitu perempuan, anak-anak, lanjut usia dan laki-laki yang mengalami kesenjangan gender.

Anggaran Responsif Gender

adalah anggaran yang merespon akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dalam pembangunan yang diperoleh dari kebutuhan, permasalahan dan pengalaman tiap-tiap masyarakat.

Pengarusutamaan Gender (PUG)

Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG)

adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah.

Focal Point

adalah individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari Instansi atau Lembaga atau Organisasi atau Unit Organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah masing-masing;

Sekretariat Bersama PPRG

adalah tim driver atau disebut juga sebagai penggerak PPRG. Tugasnya yaitu memfasilitasi PPRG melalui koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD. Penggerak di daerah terdiri dari :

- Bappeda : Lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan
- Badan Pemberdayaan Perempuan : Lembaga yang memberikan bantuan teknis substansi Pengarusutamaan Gender
- Badan Keuangan Daerah : Koordinasi dan supervisi penganggaran
- Inspektorat : Lembaga supervisi dan evaluasi kegiatan

PPRG

adalah perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan akses, peran, manfaat dan kontrol dalam pembangunan antara laki-laki, perempuan, lanjut usia, anak-anak, disabilitas dan kaum marjinal yang mengalami kesenjangan sehingga anggaran yang dihasilkan dapat tepat sasaran membantu menyelesaikan kesenjangan gender yang ada di lingkungan masyarakat.

Analisis Gender

adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.

Isu Gender

Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG juga serupa dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur tingkat pencapaian harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan hanya saja dalam IPG lebih spesifik melihat seberapa besar kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia.

Gender Analysis Pathway (GAP)

Model analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.

Gender Budget Statement (GBS)

Lembar pernyataan yang memuat bahwa suatu instansi telah mengalokasikan dana untuk program atau kegiatan yang responsif gender.

Term of Reference (TOR)

Rincian atau kerangka kerja yang menjadi acuan pelaksana program atau kegiatan yang responsif gender di suatu instansi.

Member Check Hasil Wawancara

Nama Informan	: Lia Muliawati
Kode Informan	: I ₁₋₁
Status Sosial/Jabatan	: Fungsional Umum Bidang Sosial Kemasyarakatan Bappeda Provinsi Banten
Pendidikan	: S1 Kesehatan Masyarakat
Umur	: 42 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Waktu dan Tempat	: Senin, 30 Mei 2016 pukul 12.52 WIB di Ruang Rapat Bidang Sosial Kemasyarakatan

I. Menetapkan Sasaran atau perangkat tujuan

- 1) Bagaimana menentukan kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan gender?

Jawab : Mekanismenya tentu saja melalui analisis gender dengan GAP (*Gender Analysis Pathway*), GBS (*Gender Budget Statement*) dan TOR (*Term of Reference*). Sebelumnya dilakukan bimbingan teknis PPRG lalu Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender untuk seluruh SKPD Provinsi Banten, dalam Rakor ini SKPD mendapat arahan dari Bappeda agar setiap SKPD memiliki minimal satu kegiatan yang responsif gender.

- 2) Apa syarat yang dimiliki oleh seseorang yang merencanakan anggaran responsif gender?

Jawab : Aparatur yang memiliki pemahaman PPRG

- 3) Apa saja kesenjangan gender di Provinsi Banten tahun 2016?

Jawab : Dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

4) Siapa saja sasaran yang mengalami kesenjangan gender tahun 2016?

Jawab : Masyarakat yang mengalami kesenjangan pada sektor-sektor pembangunan misal Angka Kematian Bayi (AKB), Kekurangan Energi Kalori (KEK), Angka Partisipasi Sekolah, penduduk yang tergolong miskin, pengangguran

5) Kapan batas akhir pengumpulan hasil analisis gender?

Jawab : Dikumpulkan saat asistensi RKA oleh TAPD

6) Kapan analisis gender dilakukan?

Jawab : Prosesnya dimulai dari Rancangan Renja dan DRPK (Daftar Rincian Program dan Kegiatan), dari situ analisis seharusnya mulai dipersiapkan

7) Apa tujuan yang hendak dicapai tahun 2016?

Jawab : Capaian indikator makro lebih baik seperti IPM, IPG, IDG, LPE, Persentase Penduduk Miskin, Persentase Pengangguran Terbuka, tepatnya berkurangnya kesenjangan pada sektor-sektor pembangunan seperti AKB, KEK, APS

II. Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang

8) Berapa persentase anggaran responsif gender tahun 2015?

Jawab : Ada di rekap

9) Berapa persentase anggaran responsif gender tahun 2016?

Jawab : Belum di rekap

10) Apakah ada sanksi jika tidak melakukan analisis gender?

Jawab : Sejauh ini belum ada

III. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

11) Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab : Komitmen pimpinan dan sumber daya manusia yang terlatih dalam PPRG

12) Bagaimana upaya yang dilakukan agar faktor yang mendukung tersebut dapat dimaksimalkan?

Jawab : Selama ini kami mengandalkan kegiatan advokasi baik itu kepada pimpinan, perencana atau pun kepada pelaksana teknis. Advokasi ini bentuknya seperti rapat koordinasi atau pelatihan PPRG di setiap tahunnya. Ini ditujukan untuk memberikan pemahaman staf yang dikirim oleh perwakilan dari SKPD yang selalu berganti-ganti. Dengan dilatih, staf tersebut akan memiliki kapasitas untuk menganalisis gender di kegiatan SKPDnya masing-masing

13) Apa saja faktor yang menghambat terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab : Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis untuk menyusun rencana aksi dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender sedangkan tiap SKPD hanya memiliki satu orang yang telah dilatih dan itu pun biasanya yang mewakili tidak memberikan pemahaman PPRG pada semua aparatur melalui Kasubbag PEP SKPD

14) Bagaimana upaya yang dilakukan agar hambatan dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dapat diminimalisasi?

Jawab : Selama ini kami mengandalkan kegiatan advokasi baik itu kepada pimpinan, perencana atau pun kepada pelaksana teknis. Advokasi ini bentuknya seperti rapat koordinasi atau pelatihan PPRG di setiap tahunnya. Ini ditujukan untuk memberikan pemahaman staf yang dikirim oleh perwakilan dari SKPD yang selalu berganti-ganti. Dengan dilatih, staf tersebut akan memiliki kapasitas untuk menganalisis gender di kegiatan SKPDnya masing-masing

15) Apa saja antisipasi yang dilakukan agar anggaran responsif gender dapat terlaksana dengan baik?

Jawab : Melakukan advokasi secara rutin setiap tahunnya kepada pimpinan, perencana atau pelaksana teknis, untuk tahun ini bentuknya Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender

IV. Mengembangkan rencana dan menjabarkannya

16) Apa tindak lanjut dari pegawai setelah mendapat pelatihan?

Jawab : Memberikan pemahaman PPRG kepada semua aparatur melalui Kasubbag PEP SKPD

17) Bagaimana tanggapan pimpinan atas perencanaan anggaran responsif gender di tahun 2016?

Jawab : Pimpinan berkomitmen untuk melaksanakan PPRG tetapi komitmen merupakan pengakuan yang tercermin pada tindakan dan saat ini komitmen mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIA MULIAWATI
Pekerjaan/Jabatan : Fungsional umum
Umur : 42 Th.
Pendidikan : S1-Kesmas
Jenis Kelamin : Perempuan

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian skripsi ini.

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga pernyataan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 04 Mei 2016



(Lia Muliawati)
NTP : 19750121201001 2 002

Nama Informan	: Dra. Evi Sofia
Kode Informan	: I ₁₋₂
Status Sosial/Jabatan	: Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten
Pendidikan	: S1
Umur	: 50 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Waktu dan Tempat	: Selasa, 28 Juni 2016 pukul 14.35 WIB di Ruang Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten

I. Menetapkan Sasaran atau perangkat tujuan

- 1) Bagaimana menentukan kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan gender?

Jawab : Kalau kita memilih kegiatan tersebut, setelah kita analisis ternyata banyak isu-isu gender nah itulah yg kita lanjutkan untuk rencana aksinya seperti apa dengan menggunakan GAP (Gender Analysis Pathway), GBS (Gender Budget Statement), TOR (Term of Reference). Kita tidak memaksakan SKPD mau memilih kegiatan yang mana karena tidak semua kegiatan punya isu gender.

- 2) Apa syarat yang dimiliki oleh seseorang yang merencanakan anggaran responsif gender?

Jawab : Punya keterampilan menganalisis PPRG

- 3) Apa saja kesenjangan gender di Provinsi Banten tahun 2016?

Jawab : Berbeda setiap kebutuhan masyarakat misal dalam kesehatan di Provinsi Banten berkaitan dengan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang tinggi

4) Siapa saja sasaran yang mengalami kesenjangan gender tahun 2016?

Jawab : Bukan hanya laki-laki dan perempuan tapi ada lanjut usia, difabel, anak-anak dan kaum miskin

5) Kapan batas akhir pengumpulan hasil analisis gender?

Jawab : Kami (BPPMD) memberi waktu hingga pertengahan Juli 2016 sebelum penilaian dari KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

6) Kapan analisis gender dilakukan?

Jawab : Seharusnya saat menyusun Renja, SKPD sudah membuat analisis gendernya sehingga saat pengecekan RKA bisa ditampilkan dokumen PPRGnya

7) Apa tujuan yang hendak dicapai tahun 2016?

Jawab : Peningkatan IPG, IDG, mendapat APE dari evaluasi penilaian oleh KemenPPPA

II. Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang

8) Berapa persentase anggaran responsif gender tahun 2015?

Jawab : Di arsip rekap

9) Berapa persentase anggaran responsif gender tahun 2016?

Jawab : Di arsip rekap

10) Apakah ada sanksi jika tidak melakukan analisis gender?

Jawab : Seharusnya bagi SKPD yang tidak membuat dokumen PPRG saat RKA, dipulangkan untuk selanjutnya membuat dokumen PPRG

III. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

11) Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab : Alhamdulillah pimpinan mendukung terbukti dari adanya Peraturan Gubernur untuk PPRG juga ada Surat Edaran dari Sekretaris Daerah untuk himbauan kepada SKPD agar merencanakan satu kegiatan responsif gender, dukungan data terpilah sebagian besar masih berasal dari BPS, kalau SDM yang menganalisis gender ada dukungan hanya saja masih kurang secara kuantitas karena kita hanya melatih satu dari tiap SKPD

12) Bagaimana upaya yang dilakukan agar faktor yang mendukung tersebut dapat dimaksimalkan?

Jawab : Anggaran kita untuk pelatihan ini hampir dicoret, waktu itu Bappeda berkomentar, mengapa selalu pelatihan setiap tahun. Lalu kita jelaskan alasannya namun Bappeda menolak untuk tetap mengadakan pelatihan tetapi kami upayakan cara dengan mengganti nama kegiatannya menjadi advokasi yang di dalamnya juga ada pelatihannya

13) Apa saja faktor yang menghambat terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab : Satu adalah pemahaman dari pemangku kepentingan yang ada di SKPD namun kami juga tidak menyalahkan meskipun telah ada sosialisasi tetapi belum tentu pemahamannya sampai kepada pemangku kepentingan, kedua adalah koordinasi yang intensif di antara driver atau tim penggerak PPRG, ketiga yaitu tadi masih kurangnya sumber daya manusia yang punya kapasitas dalam menganalisis gender pada kegiatan-kegiatan di SKPD.

14) Bagaimana upaya yang dilakukan agar hambatan dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dapat diminimalisasi?

Jawab : Anggaran kita untuk pelatihan ini hampir dicoret, waktu itu Bappeda berkomentar, mengapa selalu pelatihan setiap tahun. Lalu kita jelaskan alasannya namun Bappeda menolak untuk tetap mengadakan pelatihan tetapi kami upayakan cara dengan mengganti nama kegiatannya menjadi advokasi yang di dalamnya juga ada pelatihannya

15) Bagaimana keterlibatan legislatif dalam anggaran responsif gender tahun 2016?

Jawab : Untuk PPRG, kami mencoba berkomunikasi dan mensosialisasikan apa itu PPRG, jadi masih dalam rangka meningkatkan pemahaman apa itu PPRG, kita belum ada keterlibatan yang secara langsung berkoordinasi untuk PPRG

16) Bagaimana keterlibatan jejaring masyarakat dalam anggaran responsif gender tahun 2016?

Jawab : Ada Pattiro Provinsi Banten yang fokusnya PPRG sering terlibat ketika kita mengadakan peningkatan pemahaman PPRG untuk aparatur

17) Apa saja antisipasi yang dilakukan agar anggaran responsif gender dapat terlaksana dengan baik?

Jawab : Mengupayakan adanya pelatihan PPRG meskipun anggarannya hampir dicoret oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

IV. Mengembangkan rencana dan menjabarkannya

18) Apa tindak lanjut dari pegawai setelah mendapat pelatihan?

Jawab : Hasil pelatihan supaya dibagikan ke teman-teman yang ada di SKPD masing-masing

19) Bagaimana tanggapan pimpinan atas perencanaan anggaran responsif gender di tahun 2016?

Jawab : Pasti mendukung tetapi feedback yang diberikan dalam bentuk GAP GBSnya cukup lama

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Evi Sofia
Pekerjaan/Jabatan : Kabid PUG dan Kualitas Hidup
Umur : 50 th
Pendidikan : SI
Jenis Kelamin : Perempuan

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian skripsi ini.

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga pernyataan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 28 / June / 2016



Evi Sofia
NIP. 196620261992022002

Nama Informan	: Dra. Kufti Eka Prasetya, M.Si
Kode Informan	: I ₂₋₁
Status Sosial/Jabatan	: Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial Provinsi Banten
Pendidikan	: S2
Umur	: 52 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Waktu dan Tempat	: Selasa, 09 Agustus 2016 pukul 10.05 WIB di Ruang Rapat Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan

I. Menetapkan Sasaran atau perangkat tujuan

- 1) Bagaimana menentukan kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan gender?

Jawab : Paling menonjol memang masalah TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) karena kita melihat dari jumlahnya lebih banyak laki-laki 136 orang sedangkan perempuannya 29 orang dan untuk pengolahan analisisnya dilakukan oleh Subbag Program tetapi data TKSKnya didapat dari bidang potensi yang ada di Dinas Sosial Provinsi Banten, dari tahun ke tahun kita memang selalu gunakan data TKSK untuk kegiatan responsif gender, untuk penyusunan dokumennya baru kita melihat dari DPAnya.

- 2) Apa syarat yang dimiliki oleh seseorang yang merencanakan anggaran responsif gender?

Jawab : Mendapat dukungan dari atasan dan bidang-bidang dapat berkoordinasi

- 3) Apa saja kesenjangan gender di Provinsi Banten tahun 2016?

Jawab : Paling menonjol masalah jumlah TKSK antara laki-laki dan perempuan

4) Siapa saja sasaran yang mengalami kesenjangan gender tahun 2016?

Jawab : TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di Provinsi Banten

5) Kapan batas akhir pengumpulan hasil analisis gender?

Jawab : Setelah pelatihan kemudian kita dikirim email setelah itu kita kerjakan analisisnya dan langsung kita kirimkan ke BPPMD

6) Kapan analisis gender dilakukan?

Jawab : Setelah diemail oleh BPPMD

II. Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang

7) Apakah ada sanksi jika tidak melakukan analisis gender?

Jawab : Belum ada

III. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

8) Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab : Data yang lengkap, ada persetujuan dari atasan, intinya ada kesepakatan dengan pimpinan dengan saya

9) Bagaimana upaya yang dilakukan agar faktor yang mendukung tersebut dapat dimaksimalkan?

Jawab : Hampir setiap rapat bulanan kita sampaikan kepada teman-teman di Dinas Sosial bahwa jangan menyepelekan masalah responsif gender karena itu memberi nilai poin juga untuk Gubernurnya dari Kementerian

10) Apa saja faktor yang menghambat terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab : Tidak ada kendala

11) Bagaimana upaya yang dilakukan agar hambatan dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dapat diminimalisasi?

Jawab : Hampir setiap rapat bulanan kita sampaikan kepada teman-teman di Dinas Sosial bahwa jangan menyepelekan masalah responsif gender karena itu memberi nilai poin juga untuk Gubernurnya dari Kementerian

IV. Mengembangkan rencana dan menjabarkannya

12) Apa tindak lanjut dari pegawai setelah mendapat pelatihan?

Jawab : Kita bicarakan dengan atasan kita dan kita koordinasikan dengan bidang

13) Bagaimana tanggapan pimpinan atas perencanaan anggaran responsif gender di tahun 2016?

Jawab : Bukannya tidak menanggapi tetapi mungkin cukup tau dan silahkan saja laksanakan sesuai tupoksi (Tugas, Pokok dan Fungsi), serta yang terpenting atasan mendukung karena ada tembusan juga dari BPPMD bahwa Provinsi Banten harus mendapat APE (Anugrah Parahita Ekapraya)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Kufri Eka Prasetya, M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Kasubbag Program, Evaluasi & Pelaporan Dinsos
Umur : 52 th
Pendidikan : S2
Jenis Kelamin : Perempuan

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian skripsi ini.

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga pernyataan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 09 Agustus 2016


Kufri Eka P

Nama Informan	: Mochamad Hamdi
Kode Informan	: I ₂₋₂
Status Sosial/Jabatan	: Pelaksana Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Provinsi Banten
Pendidikan	: S1 Administrasi Negara
Umur	: 24 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Waktu dan Tempat	: Rabu, 10 Agustus 2016 pukul 08.42 WIB di Ruang Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

I. Menetapkan Sasaran atau perangkat tujuan

- 1) Bagaimana menentukan kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan gender?

Jawab : Untuk menyusun PPRG, terlebih dahulu kita mempersiapkan ketersediaan data dahulu, kita selalu menyampaikan pada saat rancangan anggaran di setiap tahunnya bahwa program-program kita harus berbicara menyeluruh baik itu dari segi pengentasan pengangguran, kemiskinan maupun responsif gender, kita slalu sampaikan kepada bidang-bidang teknis yang ada di dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Provinsi Banten melalui Kasubag programnya dan untuk penyusunan GAP GBS ini setelah DPA.

Jadi, setelah penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2016 ada nih satu kegiatan misalnya pelatihan kejuruan menjahit di BLK, kita sudah tentukan kegiatan mana yang akan kita susun GAP GBSnya. Kita buat terkait dengan data terpilah yang mengikuti pelatihan tersebut ada berapa orang, laki-lakinya berapa perempuannya berapa. Harusnya disediakan terlebih dahulu data-datanya setelah itu membuat permasalahan-permasalahan yang memang dihadapi pada kegiatan tersebut.

- 2) Apa syarat yang dimiliki oleh seseorang yang merencanakan anggaran responsif gender?

Jawab : Mendapat bimbingan teknis penyusunan GBS setiap tahun

- 3) Apa saja kesenjangan gender di Provinsi Banten tahun 2016?

Jawab : Di bidang pengawasan dan ketenagakerjaan itu ada pengawasan untuk perempuan dan anak, di sana ada isu bagaimana perusahaan memperlakukan tenaga kerja perempuan dan mengembalikan anak-anak yang sudah terjun ke dunia kerja supaya dapat kembali ke dunia pendidikan

- 4) Siapa saja sasaran yang mengalami kesenjangan gender tahun 2016?

Jawab : Tenaga kerja perempuan dan anak yang ada di perusahaan-perusahaan wilayah Provinsi Banten

- 5) Kapan batas akhir pengumpulan hasil analisis gender?

Jawab : Secepatnya kita diminta mengumpulkan hasil analisis PPRG

- 6) Kapan analisis gender dilakukan?

Jawab : Dimintanya setelah pelatihan

II. Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang

- 7) Apakah ada sanksi jika tidak melakukan analisis gender?

Jawab : Belum ada

III. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

- 8) Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab : Koordinasi dengan bidang-bidang teknis dalam penyediaan data

9) Bagaimana upaya yang dilakukan agar faktor yang mendukung tersebut dapat dimaksimalkan?

Jawab : Pada saat rancangan anggaran, Kasubbag Program menyampaikan kepada bidang-bidang teknis yang ada di Disnakertrans Provinsi Banten bahwa program-program kita harus menyeluruh baik itu dari segi pengentasan pengangguran, kemiskinan maupun responsif gender

10) Apa saja faktor yang menghambat terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab : Koordinasi dengan bidang-bidang teknis dalam ketersediaan data, dan kesibukan rutinitas pekerjaan

11) Bagaimana upaya yang dilakukan agar hambatan dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dapat diminimalisasi?

Jawab : Pada saat rancangan anggaran, Kasubbag Program menyampaikan kepada bidang-bidang teknis yang ada di Disnakertrans Provinsi Banten bahwa program-program kita harus menyeluruh baik itu dari segi pengentasan pengangguran, kemiskinan maupun responsif gender.

IV. Mengembangkan rencana dan menjabarkannya

12) Apa tindak lanjut dari pegawai setelah mendapat pelatihan?

Jawab : Saya bicarakan dengan pimpinan program lalu Kasubbag Program menyampaikan ke kepala bidang-bidang teknis agar paham bahwa gender itu bukan hanya untuk perempuan karena bidang teknis masih banyak yang belum paham kegiatan mana saja yang termasuk responsif gender

13) Bagaimana tanggapan pimpinan atas perencanaan anggaran responsif gender di tahun 2016?

Jawab : Pimpinan setuju karena banyak sekali anggaran program dan kegiatan yang berhubungan dengan gender seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengawasan tenaga kerja dan kegiatan penempatan kerja di dalam dan luar negeri

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochamad Handi
Pekerjaan/Jabatan : pelaksana PEP
Umur : 24 th
Pendidikan : S1 Administrasi Negara
Jenis Kelamin : laki-laki

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian skripsi ini.

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga pernyataan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 10 Agustus 2016

M. Handi

Nama Informan	: Nunuk Dwi Maryati, ST., MT
Kode Informan	: I ₂₋₃
Status Sosial/Jabatan	: Pelaksana Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
Pendidikan	: S2 Magister Perencanaan Wilayah Kota
Umur	: 37 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Waktu dan Tempat	: Selasa, 09 Agustus 2016 pukul 14.49 WIB di Ruang Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

I. Menetapkan Sasaran atau perangkat tujuan

- 1) Bagaimana menentukan kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan gender?

Jawab : Kita di Bidang Program mengumpulkan semua kegiatan di Bina Marga, jadi kegiatan-kegiatan di Bina Marga ini kita lihat yang memiliki hubungan dengan gender di Bina Marga apa, awalnya tidak memahami apa hubungannya gender dengan Bina Marga, selain dari pelatihan saya baca-baca juga di internet hubungan gender di sini (Bina Marga) ini apa saja. Kita pakai DPA di situ kita lihat kegiatannya, di sini (Bina Marga) mungkin tidak kelihatan gender tapi secara umum itu memperlancar akses pendidikan semua orang, tidak hanya perempuan saja, supaya mereka semua lancar aksesnya mau ke puskesmas mau berobat mudah, intinya seperti itu, kalau di sini tidak spesifik menyebutkan responsif gender tetapi kalau dihubung-hubungkan ya ada hubungannya juga, seperti pemeliharaan jalan otomatis terkena manfaatnya bukan, kalau spesifik misalkan dengan adanya jalan ini berapa perempuan yang lewat terselamatkan persalinannya, berapa jumlah yang kecelakaan, oh itu tidak bisa kita tampilkan datanya, hanya secara umum saja,

ini pasti ada hubungannya. Jadi, sebenarnya telah menyusun ARG hanya tidak terdokumentasi ARG yang seperti apa, kalau misalkan tujuannya apa manfaatnya apa ya terkait juga, hanya saja tidak terdokumentasi dari awal secara khusus kita membuat ARG untuk menyelesaikan masalah gender yang spesifik.

- 2) Apa syarat yang dimiliki oleh seseorang yang merencanakan anggaran responsif gender?

Jawab : Mendapat pelatihan dari Bimbingan Teknis PPRG dan bisa memahami gender dan kegiatan yang ada di SKPD

- 3) Apa saja kesenjangan gender di Provinsi Banten tahun 2016?

Jawab : Kami memilih pemeliharaan Jalan Palima sebagai kegiatan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan akses dalam mencapai fasilitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi

- 4) Siapa saja sasaran yang mengalami kesenjangan gender tahun 2016?

Jawab : Masyarakat yang mengalami kesenjangan dalam akses kepada fasilitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi

- 5) Kapan batas akhir pengumpulan hasil analisis gender?

Jawab : Ketika setelah selesai pelatihan pada Maret 2016, kami diminta untuk mengumpulkan dokumen analisis gendernya

- 6) Kapan analisis gender dilakukan?

Jawab : Sebenarnya saat pelatihan Bimbingan Teknis PPRG sudah melakukan analisis gender tetapi yang sesungguhnya setelah pelatihan itu dilakukan analisisnya

II. Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang

7) Apakah ada sanksi jika tidak melakukan analisis gender?

Jawab : Belum ada, tidak membuat dokumen PPRG saat asistensi RKA tidak dipulangkan RKA kami karena dokumen PPRG memang tidak diminta

III. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

8) Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab : Dukungan dari pimpinan, saya konsultasi dahulu dengan pimpinan saya di bidang PEP lalu setelah itu saya membuat analisis gendernya

9) Bagaimana upaya yang dilakukan agar faktor yang mendukung tersebut dapat dimaksimalkan?

Jawab : Pelatihan tetap diadakan setiap tahunnya lalu melakukan konsultasi dan komunikasi baik itu dengan pimpinan maupun bidang-bidang yang ada di Bina Marga

10) Apa saja faktor yang menghambat terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab : Hambatannya pertama banyak yang belum paham maksudnya apalagi dengan kebinamargaan apa hubungannya dengan gender lalu yang kedua koordinasinya karena di sini bidangnya banyak

11) Bagaimana upaya yang dilakukan agar hambatan dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dapat diminimalisasi?

Jawab : Pelatihan tetap diadakan setiap tahunnya lalu melakukan konsultasi dan komunikasi baik itu dengan pimpinan maupun bidang-bidang yang ada di Bina Marga

IV. Mengembangkan rencana dan menjabarkannya

12) Apa tindak lanjut dari pegawai setelah mendapat pelatihan?

Jawab : Berbagi hasil pelatihan dengan teman-temnn saja, belum kemana-mana, jadi bentuknya informal seperti cerita saja, belum ada formal seperti workshop, pelatihan, karena yang dilatih pun belum paham kalau disuruh menjelaskan begitu

13) Bagaimana tanggapan pimpinan atas perencanaan anggaran responsif gender di tahun 2016?

Jawab : Setelah saya kerjakan sendiri analisisnya baru saya konsultasikan ke pimpinan dan beliau setuju saja

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nunuk Pwi Maryati, ST, MT
Pekerjaan/Jabatan : Pelaksana Dinas Bina Marga & Tata Ruang Prov. Banten
Umur : 37 th
Pendidikan : S2 MPWK
Jenis Kelamin : Perempuan

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian skripsi ini.

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga pernyataan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang...../...../2016



NUNUK PWI MARYATI

NIP. 19790322 200604 2 007

Nama Informan	: Yanyan Royani
Kode Informan	: I ₂₋₄
Status Sosial/Jabatan	: Pelaksana Bidang Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten
Pendidikan	:
Umur	: 41 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Waktu dan Tempat	: Senin, 22 Mei 2017 pukul 12.01 WIB di Ruang Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten

I. Menetapkan Sasaran atau perangkat tujuan

- 1) Bagaimana menentukan kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan gender?

Jawab : Saya belum tahu bagaimana kelanjutannya karena saya hanya diutus datang ke kegiatan tersebut dan sudah tidak ada instruksi dari atasan.

- 2) Apa syarat yang dimiliki oleh seseorang yang merencanakan anggaran responsif gender?

Jawab : Adanya instruksi dari atasan

- 3) Apa saja kesenjangan gender di Provinsi Banten tahun 2016?

Jawab : Kurang tahu

- 4) Siapa saja sasaran yang mengalami kesenjangan gender tahun 2016?

Jawab : Tidak tahu

- 5) Kapan batas akhir pengumpulan hasil analisis gender?

Jawab : Tidak tahu pengumumannya

- 6) Kapan analisis gender dilakukan?

Jawab : Saya tidak tahu kelanjutannya

II. Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang

7) Apakah ada sanksi jika tidak melakukan analisis gender?

Jawab : Saya belum tahu kelanjutannya

III. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

8) Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab : Aparatur yang benar-benar memahami

9) Bagaimana upaya yang dilakukan agar faktor yang mendukung tersebut dapat dimaksimalkan?

Jawab : Berbicara dengan pimpinan

10) Apa saja faktor yang menghambat terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab : Koordinasi yang kurang sinkron karena pimpinan menunjuk saya untuk mewakili kegiatan yang tidak saya pahami

11) Bagaimana upaya yang dilakukan agar hambatan dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dapat diminimalisasi?

Jawab : Berbicara dengan pimpinan

IV. Mengembangkan rencana dan menjabarkannya

12) Apa tindak lanjut dari pegawai setelah mendapat pelatihan?

Jawab : Kita membawa hasil kegiatan yang didapat dari BPPMD ke bagian umum dan sekarang kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya

13) Bagaimana tanggapan pimpinan atas perencanaan anggaran responsif gender di tahun 2016?

Jawab : Saya tidak lapor ke atasan, hanya ke bagian umum saja

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAN YAN, ROYANI
Pekerjaan/Jabatan : PMS / PELAKSANA
Umur : 41
Pendidikan :
Jenis Kelamin : L


Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian skripsi ini.

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga pernyataan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 22 / Mei / 2017


YAN YAN, ROYANI
197605042011011001

Nama Informan	: M. Ridwan Kurniawan, S. IP
Kode Informan	: I ₂₋₅
Status Sosial/Jabatan	: Pelaksana Bidang Sekretariat Umum Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten
Pendidikan	: S1 Ilmu Pemerintahan
Umur	: 39 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Waktu dan Tempat	: Jum'at, 26 Mei 2017 pukul 08.29 WIB di Ruang Tamu Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten

I. Menetapkan Sasaran atau perangkat tujuan

- 1) Bagaimana menentukan kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan gender?

Jawab : Saya dengan Ibu Lin sudah mengajukan masukan tetapi karena tiap SKPD berbeda arahnya dari Kepala Dinas sehingga tahun 2016 belum ada kegiatan responsif gender, hanya kegiatan yang berhubungan dengan perempuan seperti konsumsi ahli pangan itu kita ada.

- 2) Apa syarat yang dimiliki oleh seseorang yang merencanakan anggaran responsif gender?

Jawab : Arahan dari Kepala Dinas

- 3) Apa saja kesenjangan gender di Provinsi Banten tahun 2016?

Jawab : Tentang kerawanan pangan

- 4) Siapa saja sasaran yang mengalami kesenjangan gender tahun 2016?

Jawab : Perempuan

- 5) Kapan batas akhir pengumpulan hasil analisis gender?

Jawab : Diminta secepatnya setelah pelatihan selesai

- 6) Kapan analisis gender dilakukan?

Jawab : Kemarin saya tidak bikin GAP GBS karena waktu itu saya hanya menggantikan ibu Lin yang sedang di rumah sakit

II. Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang

7) Apakah ada sanksi jika tidak melakukan analisis gender?

Jawab : Tidak ada

III. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

8) Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab : Tidak tahu

9) Bagaimana upaya yang dilakukan agar faktor yang mendukung tersebut dapat dimaksimalkan?

Jawab : Banyak *sharing* dengan BPPMD

10) Apa saja faktor yang menghambat terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab : Masih kesulitan dalam memahami

11) Bagaimana upaya yang dilakukan agar hambatan dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dapat diminimalisasi?

Jawab : Banyak *sharing* dengan BPPMD

IV. Mengembangkan rencana dan menjabarkannya

12) Apa tindak lanjut dari pegawai setelah mendapat pelatihan?

Jawab : Laporan ke bagian umum dan cerita ke teman-teman di bagian umum

13) Bagaimana tanggapan pimpinan atas perencanaan anggaran responsif gender di tahun 2016?

Jawab : Belum ada arahan ke gender, kita fokusnya ke ketahanan pangan saja karena gender mengarah kepada kewenangan BPPMD

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.A Ridwan. Kurniawan SIP
Pekerjaan/Jabatan : Pelaksana bid. Sekretariat umum
Umur : 39
Pendidikan : Sa.jana Pemerintahan.
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian skripsi ini.

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga pernyataan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 26.1.05. /2017



M.A Ridwan. K. SIP
NIP 19771010 20081011014

Nama Informan	: Mohamad Imron Rosadi
Kode Informan	: I ₂₋₆
Status Sosial/Jabatan	: Pelaksana Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan Satpol PP Provinsi Banten
Pendidikan	: SLTA
Umur	: 42 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Waktu dan Tempat	: Rabu, 21 Juni 2017 pukul 12.32 WIB di Ruang Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

I. Menetapkan Sasaran atau perangkat tujuan

- 1) Bagaimana menentukan kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan gender?

Jawab : Berdasarkan permasalahan yang ditemukan saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita usulkan melalui Rencana Kerja 2016 (Renja 2016) kemudian bisa dibahas terlebih dahulu bagaimana tolak ukurnya dan plafonnya tetapi anggaran di Pol PP tidak ada yang responsif gender karena belum ada ruang untuk responsif gender.

- 2) Apa syarat yang dimiliki oleh seseorang yang merencanakan anggaran responsif gender?

Jawab : Pemahaman bahwa memang isu gender itu perlu tidak hanya pemahaman bagi pelaksana tetapi juga bagi pemangku kebijakan atau pejabat-pejabat di masing-masing SKPD karena pelaksana bergantung pada pimpinan

- 3) Apa saja kesenjangan gender di Provinsi Banten tahun 2016?

Jawab : Kesenjangan di Pol PP yaitu masalah kekurangan jumlah pegawai perempuan di lapangan padahal perempuan dibutuhkan ketika saat penataan

pedagang kaki lima, perempuan dapat melakukan persuasi kepada pedagang kaki lima perempuan selain itu saya punya usulan seragam untuk perempuan agar panjang karena banyak perempuan berjilbab

- 4) Siapa saja sasaran yang mengalami kesenjangan gender tahun 2016?

Jawab : Pegawai perempuan yang bertugas di Satpol PP

- 5) Kapan batas akhir pengumpulan hasil analisis gender?

Jawab : Saya selalu ditelepon oleh ibu Kasinya jadi kita cepat mengumpulkannya

- 6) Kapan analisis gender dilakukan?

Jawab : Saat Renja 2016 tetapi baru dalam bentuk usulan

II. Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang

- 7) Apakah ada sanksi jika tidak melakukan analisis gender?

Jawab : Sanksi belum ada

III. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

- 8) Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab : Kita belum melaksanakan

- 9) Bagaimana upaya yang dilakukan agar faktor yang mendukung tersebut dapat dimaksimalkan?

Jawab : Dengan mengusulkan saat Renja

- 10) Apa saja faktor yang menghambat terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab : Belum ada ruang untuk membahas responsif gender dalam anggaran yang dialokasikan untuk Satpol PP

11) Bagaimana upaya yang dilakukan agar hambatan dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dapat diminimalisasi?

Jawab : Dengan mengusulkan saat Renja

IV. Mengembangkan rencana dan menjabarkannya

12) Apa tindak lanjut dari pegawai setelah mendapat pelatihan?

Jawab : Sebagai pelaksana saya memberi masukan kepada pimpinan

13) Bagaimana tanggapan pimpinan atas perencanaan anggaran responsif gender di tahun 2016?

Jawab : Pimpinan belum mengakomodir isu gender karena belum menjadi prioritas di Satpol PP dan masih berpikir kegiatan mana yang ada di Satpol PP yang termasuk responsif gender

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Imron Rosadi
Pekerjaan/Jabatan : PHS
Umur : 42 Th
Pendidikan : SLTA
Jenis Kelamin : Laki - laki


Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian skripsi ini.

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga pernyataan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 21 Juni 2017


M. Imron R.
NP. 1975 0721 2014 101 002

Nama Informan	: Pipit Puspita
Kode Informan	: I ₂₋₇
Status Sosial/Jabatan	: Pelaksana Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
Pendidikan	: S1 Hubungan Internasional
Umur	: 41 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Waktu dan Tempat	: Senin, 22 Mei 2017 pukul 12.33 WIB di Ruang Tamu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

I. Menetapkan Sasaran atau perangkat tujuan

- 1) Bagaimana menentukan kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan gender?

Jawab : Arahan dari Pak Sekretaris Dinas untuk memilih kegiatan destinasi pariwisata dan saya diminta mencari kesenjangan di dalamnya tetapi kami kesulitan data untuk menganalisis kegiatan tersebut

- 2) Apa syarat yang dimiliki oleh seseorang yang merencanakan anggaran responsif gender?

Jawab : *Political will* karena semua orang pasti sibuk jadi kalau ada kemauan maka pemahaman maupun data apapun akan diprioritaskan untuk masalah gender

- 3) Apa saja kesenjangan gender di Provinsi Banten tahun 2016?

Jawab : Pemahaman sumber daya manusia tentang responsif gender

- 4) Siapa saja sasaran yang mengalami kesenjangan gender tahun 2016?

Jawab :

Aparatur di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

5) Kapan batas akhir pengumpulan hasil analisis gender?

Jawab :Setelah mengikuti bimbingan teknis diinstruksikan langsung membuat GAP GBS

6) Kapan analisis gender dilakukan?

Jawab :Setelah mendapat arahan dari Pak (Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

II. Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang

7) Apakah ada sanksi jika tidak melakukan analisis gender?

Jawab :Tidak ada

III. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

8) Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab :Kebijakan yang tegas misal dari Bappeda supaya sebelum penganggaran membuat analisisnya

9) Bagaimana upaya yang dilakukan agar faktor yang mendukung tersebut dapat dimaksimalkan?

Jawab : Banyak konsultasi dengan atasan

10) Apa saja faktor yang menghambat terlaksananya anggaran responsif gender?

Jawab :*Political will* karena semua orang pasti sibuk jadi kalau ada kemauan maka pemahaman maupun data apapun akan diprioritaskan untuk masalah gender

11) Bagaimana upaya yang dilakukan agar hambatan dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dapat diminimalisasi?

Jawab : Banyak konsultasi dengan atasan

IV. Mengembangkan rencana dan menjabarkannya

12) Apa tindak lanjut dari pegawai setelah mendapat pelatihan?

Jawab : Saya konsultasikan ke atasan

13) Bagaimana tanggapan pimpinan atas perencanaan anggaran responsif gender di tahun 2016?

Jawab : Memberi arahan kegiatan apa yang dijadikan responsif gender

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pipit
Pekerjaan/Jabatan : Relaksan
Umur : 41 th
Pendidikan : S1 HI
Jenis Kelamin : Perempuan


Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian skripsi ini.

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga pernyataan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 22 Mei/2017


Pipit Puspita
NIP. 19760731 200604 2 016

Nama Informan	: Encop Sofia
Kode Informan	: I ₃₋₁
Status Sosial/Jabatan	: Bendahara Fraksi Gerindra/ Anggota Badan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Banten
Pendidikan	: S2 Ilmu Politik
Umur	: 45 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Waktu dan Tempat	: Rabu, 31 Mei 2017 pukul 11.53 WIB di Ruang Komisi V DPRD Provinsi Banten

III. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

- 1) Bagaimana pendapat Anda tentang anggaran responsif gender di Provinsi Banten?

Jawab : Di Provinsi Banten ada Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender mengenai anggaran responsif gender sebesar 5%, di dalamnya ada aturan untuk setiap SKPD mengalokasikan anggaran responsif gender tetapi pengawasan dan koordinasinya masih kurang

- 2) Bagaimana keterlibatan Anda sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dalam perencanaan anggaran responsif gender?

Jawab : Keterlibatan saya dari Baperda Bagian legislasinya pada tahun 2016 itu saya menjadi Ketua Pansus tentang perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan yang sekarang sudah dibuat Peraturan Daerahnya, kita sudah mengatur di dalamnya bagaimana melindungi perempuan dan anak baik di tingkat *private* maupun publik jadi pemerintah memiliki kewajiban untuk membina organisasi-organisasi perempuan yang ada di Provinsi Banten agar bisa ikut memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang responsif gender.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Encop Safia
Pekerjaan/Jabatan : Bendahara fraksi Gerindra pip. Banten
Umur : 45
Pendidikan : S2 Ilmu politik hawaii universitey, USA
Jenis Kelamin : Perempuan

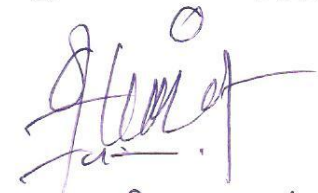
Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian skripsi ini.

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga pernyataan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 31.10.2017


Encop Safia, MA.

Nama Informan	: Sri Hartati
Kode Informan	: I ₃₋₂
Status Sosial/Jabatan	: Ketua Kaukus Parlemen Perempuan DPRD Provinsi Banten
Pendidikan	: S1 Ilmu Hukum
Umur	: 50 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Waktu dan Tempat	: Rabu, 31 Mei 2017 pukul 11.53 WIB di Ruang Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten

III. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

- 1) Bagaimana pendapat Anda tentang anggaran responsif gender di Provinsi Banten?

Jawab : Persoalan anggaran responsif gender menjadi kewajiban kita para politisi perempuan, aktivis perempuan dan pengambil kebijakan perempuan yang memang selayaknya harus memperjuangkan perempuan dan saat ini pendidikan belum mencapai 20% masih ke arah 15%, pelayanan kesehatan yang belum maksimal di tiap kecamatan serta kuota keterwakilan perempuan di parlemen masih 20% lebih dan belum mencapai 30% artinya perempuan masih belum memaksimalkan suaranya untuk menyelesaikan persoalan perempuan sehingga kesempatan di dalam proses pengambilan kebijakan pun menjadi semakin sedikit karena hanya sedikit anggota dewan perempuan yang berani berkompetisi untuk ikut membahas proses kebijakan yang menyangkut persoalan perempuan

2) Bagaimana keterlibatan Kaukus Parlemen Perempuan dalam perencanaan anggaran responsif gender?

Jawab : Kaukus Parlemen Perempuan secara terorganisir di internal parlemen dengan memberdayakan dan mengoptimalkan perempuan parlemen, mengembangkan tugas, pokok dan fungsi di setiap komisi, untuk itu kita berupaya agar pendidikan mencapai 20% dan memaksimalkan pelayanan kesehatan di tiap kecamatan tetapi kuota keterwakilan perempuan di parlemen masih 20% lebih

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Hartati, S.H
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Kakus Parlemen Perempuan
Umur : 50 Tahun
Pendidikan : SI Hukum
Jenis Kelamin : Perempuan

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Mirza Hafidzati Syarifah Adlina
NIM : 6661121012
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian skripsi ini.

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga pernyataan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 31 / 05 / 2017


Sri Hartati, S.H.

Nama Informan	: Angga Andrias
Kode Informan	: I4-1
Status Sosial/Jabatan	: Koordinator Spesialis Kebijakan Publik Pattiro Provinsi Banten
Pendidikan	: S1 Pendidikan Luar Sekolah
Umur	: 26 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Waktu dan Tempat	: Rabu, 31 Mei 2017 pukul 13.22 WIB di Ruang Kantor Pattiro Provinsi Banten

III. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

- 1) Bagaimana keterlibatan Pattiro Provinsi Banten dalam perencanaan anggaran responsif gender?

Jawab : Pattiro Banten tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan anggaran responsif gender. Keterlibatan Pattiro Banten ada di tahun 2015 dalam melakukan peningkatan kapasitas pemerintah provinsi Banten dalam menyusun analisis anggaran responsif gender melalui pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dijematani oleh KPPPA, karena pada saat itu belum ada penerapan anggaran responsif gender sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari KPPPA kemudian dalam dua tahun ini kami mencoba melakukan assessment terkait kordinasi tim driver PPRG dalam menyusun GAP dan GBS di Provinsi Banten karena dugaan sementara kami adalah kordinasi tim driver PPRG (Badan Pemberdayaan Perempuan, BAPPEDA, Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan) kurang berjalan dengan baik. Setelah hasil assessment kami mencoba melakukan advokasi terkait penyusunan ARG di Provinsi Banten.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angga Andrias
Pekerjaan/Jabatan : Kord. Spesialis Kebijakan Publik
Umur : 26 Tahun
Pendidikan : S1
Jenis Kelamin : Laki - laki


Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk kepentingan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian skripsi ini.

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga pernyataan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 31 / Mei / 2017


ANGGA ANDRIAS

PEDOMAN UMUM WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

Pedoman ini disusun sebagai perangkat untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian skripsi dalam Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut uraian yang telah peneliti susun guna memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian :

Judul : Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2016

Informan :

1. Pegawai Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Gender Bappeda Provinsi Banten (I₁₋₁).
2. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten (I₁₋₂).
3. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial Provinsi Banten (I₂₋₁).
4. Pegawai Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten (I₂₋₂).
5. Pegawai Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten (I₂₋₃).
6. Pegawai Sub Bidang Permukiman Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten (I₂₋₄).
7. Pegawai Bidang Umum Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten (I₂₋₅).
8. Pegawai Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satpol PP (I₂₋₆).
9. Pegawai Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten (I₂₋₇).
10. Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi Gerindra (I₃₋₁).
11. Ketua Kaukus Parlemen Perempuan Provinsi Banten (I₃₋₂).
12. Anggota LSM PATTIRO Provinsi Banten (I₄₋₁).

Pertanyaan :

I. Menetapkan Sasaran atau perangkat tujuan

- 1) Bagaimana menentukan kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan gender?
- 2) Apa syarat yang dimiliki oleh seseorang yang merencanakan anggaran responsif gender?
- 3) Apa saja kesenjangan gender di Provinsi Banten tahun 2016?
- 4) Siapa saja sasaran yang mengalami kesenjangan gender tahun 2016?
- 5) Kapan batas akhir pengumpulan hasil analisis gender?
- 6) Kapan analisis gender dilakukan?
- 7) Apa tujuan yang hendak dicapai tahun 2016?

II. Menentukan keadaan, situasi dan kondisi sekarang

- 8) Berapa persentase anggaran responsif gender tahun 2015?
- 9) Berapa persentase anggaran responsif gender tahun 2016?
- 10) Apakah ada sanksi jika tidak melakukan analisis gender?

III. Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

- 11) Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya anggaran responsif gender?
- 12) Bagaimana upaya yang dilakukan agar faktor yang mendukung tersebut dapat dimaksimalkan?
- 13) Apa saja faktor yang menghambat terlaksananya anggaran responsif gender?
- 14) Bagaimana upaya yang dilakukan agar hambatan dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dapat diminimalisasi?
- 15) Bagaimana keterlibatan legislatif dalam anggaran responsif gender tahun 2016?
- 16) Bagaimana keterlibatan jejaring masyarakat dalam anggaran responsif gender tahun 2016?
- 17) Apa saja antisipasi yang dilakukan agar anggaran responsif gender dapat terlaksana dengan baik?

IV. Mengembangkan rencana dan menjabarkannya

- 18) Apa tindak lanjut dari pegawai setelah mendapat pelatihan?
- 19) Bagaimana tanggapan pimpinan atas perencanaan anggaran responsif gender di tahun 2016?

TRANSKRIP DATA

1. Peneliti : Bagaimana menentukan kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan gender?	
I ₁₋₁	Mekanismenya tentu saja melalui analisis gender dengan GAP (Gender Analysis Pathway, GBS (Gender Budget Statement) dan TOR (Term of Reference). Sebelumnya dilakukan bimbingan teknis PPRG lalu Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender untuk seluruh SKPD Provinsi Banten, dalam Rakor ini SKPD mendapat arahan dari Bappeda agar setiap SKPD memiliki minimal satu kegiatan yang responsif gender.
I ₁₋₂	Kalau kita memilih kegiatan tersebut, setelah kita analisis ternyata banyak isu-isu gender nah itulah yg kita lanjutkan untuk rencana aksinya seperti apa dengan menggunakan GAP (Gender Analysis Pathway), GBS (Gender Budget Statement), TOR (Term of Reference). Kita tidak memaksakan SKPD mau memilih kegiatan yang mana karena tidak semua kegiatan punya isu gender.
I ₂₋₁	Paling menonjol memang masalah TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) karena kita melihat dari jumlahnya lebih banyak laki-laki 136 orang sedangkan perempuannya 29 orang dan untuk pengolahan analisisnya dilakukan oleh Subbag Program tetapi data TKSKnya didapat dari bidang potensi yang ada di Dinas Sosial Provinsi Banten, dari tahun ke tahun kita memang selalu gunakan data TKSK untuk kegiatan responsif gender, untuk penyusunan dokumennya baru kita melihat dari DPAnya.
I ₂₋₂	Untuk menyusun PPRG, terlebih dahulu kita mempersiapkan ketersediaan data dahulu, kita selalu menyampaikan pada saat rancangan anggaran di setiap tahunnya bahwa program-program kita harus berbicara menyeluruh baik itu dari segi pengentasan pengangguran, kemiskinan maupun responsif gender, kita selalu sampaikan kepada bidang-bidang teknis yang ada di dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Provinsi Banten melalui Kasubag programnya dan untuk penyusunan GAP GBS ini setelah DPA. Jadi, setelah penyusunan program dan kegiatan pada tahun 2016 ada nih satu kegiatan misalnya pelatihan kejuruan menjahit di BLK, kita sudah tentukan kegiatan mana yang akan kita susun GAP GBSnya. Kita buat terkait dengan data terpilah yang mengikuti pelatihan tersebut ada berapa orang, laki-lakinya berapa perempuannya berapa. Harusnya disediakan terlebih dahulu data-datanya setelah itu membuat permasalahan-permasalahan yang memang dihadapi pada kegiatan tersebut.

I ₂₋₃	<p>Kita di Bidang Program mengumpulkan semua kegiatan di Bina Marga, jadi kegiatan-kegiatan di Bina Marga ini kita lihat yang memiliki hubungan dengan gender di Bina Marga apa, awalnya tidak memahami apa hubungannya gender dengan Bina Marga, selain dari pelatihan saya baca-baca juga di internet hubungan gender di sini (Bina Marga) ini apa saja.</p> <p>Kita pakai DPA di situ kita lihat kegiatannya, di sini (Bina Marga) mungkin tidak kelihatan gender tapi secara umum itu memperlancar akses pendidikan semua orang, tidak hanya perempuan saja, supaya mereka semua lancar aksesnya mau ke puskesmas mau berobat mudah, intinya seperti itu, kalau di sini tidak spesifik menyebutkan responsif gender tetapi kalau dihubung-hubungkan ya ada hubungannya juga, seperti pemeliharaan jalan otomatis terkena manfaatnya bukan, kalau spesifik misalkan dengan adanya jalan ini berapa perempuan yang lewat terselamatkan persalinannya, berapa jumlah yang kecelakaan, oh itu tidak bisa kita tampilkan datanya, hanya secara umum saja, ini pasti ada hubungannya. Jadi, sebenarnya telah menyusun ARG hanya tidak terdokumentasi ARG yang seperti apa, kalau misalkan tujuannya apa manfaatnya apa ya terkait juga, hanya saja tidak terdokumentasi dari awal secara khusus kita membuat ARG untuk menyelesaikan masalah gender yang spesifik.</p>
I ₂₋₄	Saya belum tahu bagaimana kelanjutannya karena saya hanya diutus datang ke kegiatan tersebut dan sudah tidak ada instruksi dari atasan
I ₂₋₅	Saya dengan Ibu Lin sudah mengajukan masukan tetapi karena tiap SKPD berbeda arahnya dari Kepala Dinas sehingga tahun 2016 belum ada kegiatan responsif gender, hanya kegiatan yang berhubungan dengan perempuan seperti konsumsi ahli pangan itu kita ada.
I ₂₋₆	Berdasarkan permasalahan yang ditemukan saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita usulkan melalui Rencana Kerja 2016 (Renja 2016) kemudian bisa dibahas terlebih dahulu bagaimana tolak ukurnya dan plafonnya tetapi anggaran di Pol PP tidak ada yang responsif gender karena belum ada ruang untuk responsif gender.
I ₂₋₇	Arahan dari Pak Sekretaris Dinas untuk memilih kegiatan destinasi pariwisata dan saya diminta mencari kesenjangan di dalamnya tetapi kami kesulitan data untuk menganalisis kegiatan tersebut
2. Peneliti : Apa syarat yang dimiliki oleh seseorang yang merencanakan anggaran responsif gender?	
I ₁₋₁	Aparatur yang memiliki pemahaman PPRG

I ₁₋₂	Punya keterampilan menganalisis PPRG
I ₂₋₁	Dukungan dari atasan dan bidang-bidang dapat berkoordinasi
I ₂₋₂	Mendapat bimbingan teknis penyusunan GBS setiap tahun
I ₂₋₃	Mendapat pelatihan dari Bimbingan Teknis PPRG dan bisa memahami gender dan kegiatan yang ada di SKPD
I ₂₋₄	Adanya instruksi dari atasan
I ₂₋₅	Arahan dari Kepala Dinas
I ₂₋₆	Pemahaman bahwa memang isu gender itu perlu tidak hanya pemahaman bagi pelaksana tetapi juga bagi pemangku kebijakan atau pejabat-pejabat di masing-masing SKPD karena pelaksana bergantung pada pimpinan
I ₂₋₇	Political will karena semua orang pasti sibuk jadi kalau ada kemauan maka pemahaman maupun data apapun akan diprioritaskan untuk masalah gender
3. Peneliti : Apa saja kesenjangan gender di Provinsi Banten tahun 2016?	
I ₁₋₁	Dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
I ₁₋₂	Berbeda setiap kebutuhan masyarakat misal dalam kesehatan di Provinsi Banten berkaitan dengan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang tinggi
I ₂₋₁	Paling menonjol masalah jumlah TKSK antara laki-laki dan perempuan
I ₂₋₂	Di bidang pengawasan dan ketenagakerjaan itu ada pengawasan untuk perempuan dan anak, di sana ada isu bagaimana perusahaan memperlakukan tenaga kerja perempuan dan mengembalikan anak-anak yang sudah terjun ke dunia kerja supaya dapat kembali ke dunia pendidikan
I ₂₋₃	Kami memilih pemeliharaan Jalan Palima sebagai kegiatan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan akses dalam mencapai fasilitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi
I ₂₋₄	Kurang tahu
I ₂₋₅	Tentang kerawanan pangan

I ₂₋₆	Kesenjangan di Pol PP yaitu masalah kekurangan jumlah pegawai perempuan di lapangan padahal perempuan dibutuhkan ketika saat penataan pedagang kaki lima, perempuan dapat melakukan persuasi kepada pedagang kaki lima perempuan selain itu saya punya usulan seragam untuk perempuan agar panjang karena banyak perempuan berjilbab
I ₂₋₇	Pemahaman sumber daya manusia tentang responsif gender
4. Peneliti : Siapa saja sasaran yang mengalami kesenjangan gender tahun 2016?	
I ₁₋₁	Masyarakat yang mengalami kesenjangan pada sektor-sektor pembangunan misal Angka Kematian Bayi (AKB), Kekurangan Energi Kalori (KEK), Angka Partisipasi Sekolah, penduduk yang tergolong miskin, pengangguran
I ₁₋₂	Bukan hanya laki-laki dan perempuan tapi ada lanjut usia, difabel, anak-anak dan kaum miskin
I ₂₋₁	TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di Provinsi Banten
I ₂₋₂	Tenaga kerja perempuan dan anak yang ada di perusahaan-perusahaan wilayah Provinsi Banten
I ₂₋₃	Masyarakat yang mengalami kesenjangan dalam akses kepada fasilitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi
I ₂₋₄	Tidak tahu
I ₂₋₅	Perempuan
I ₂₋₆	Pegawai perempuan yang bertugas di Satpol PP
I ₂₋₇	Aparatur di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
5. Peneliti : Kapan batas akhir pengumpulan hasil analisis gender?	
I ₁₋₁	Dikumpulkan saat asistensi RKA oleh TAPD
I ₁₋₂	Kami (BPPMD) memberi waktu hingga pertengahan Juli 2016 sebelum penilaian dari KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

I ₂₋₁	Setelah pelatihan kemudian kita dikirim email setelah itu kita kerjakan analisisnya dan langsung kita kirimkan ke BPPMD
I ₂₋₂	Secepatnya kita diminta mengumpulkan hasil analisis PPRG
I ₂₋₃	Ketika setelah selesai pelatihan pada Maret 2016, kami diminta untuk mengumpulkan dokumen analisis gendernya
I ₂₋₄	Tidak tahu pengumumannya
I ₂₋₅	Diminta secepatnya setelah pelatihan selesai
I ₂₋₆	Saya selalu ditelepon oleh ibu Kasinya jadi kita cepat mengumpulkannya
I ₂₋₇	Setelah mengikuti bimbingan teknis diinstruksikan langsung membuat GAP GBS
6. Peneliti : Kapan analisis gender dilakukan?	
I ₁₋₁	Prosesnya dimulai dari Rancangan Renja dan DRPK (Daftar Rincian Program dan Kegiatan), dari situ analisis seharusnya mulai dipersiapkan
I ₁₋₂	Seharusnya saat menyusun Renja, SKPD sudah membuat analisis gendernya sehingga saat pengecekan RKA bisa ditampilkan dokumen PPRGnya
I ₂₋₁	Setelah diemail oleh BPPMD
I ₂₋₂	Dimintanya setelah pelatihan
I ₂₋₃	Sebenarnya saat pelatihan Bimbingan Teknis PPRG sudah melakukan analisis gender tetapi yang sesungguhnya setelah pelatihan itu dilakukan analisisnya
I ₂₋₄	Saya tidak tahu kelanjutannya
I ₂₋₅	Kemarin saya tidak bikin GAP GBS karena waktu itu saya hanya menggantikan ibu Lin yang sedang di rumah sakit
I ₂₋₆	Saat Renja 2016 tetapi baru dalam bentuk usulan
I ₂₋₇	Setelah mendapat arahan dari Pak (Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

7. Peneliti : Apa tujuan yang hendak dicapai tahun 2016?	
I ₁₋₁	Capaian indikator makro lebih baik seperti IPM, IPG, IDG, LPE, Persentase Penduduk Miskin, Persentase Pengangguran Terbuka, tepatnya berkurangnya kesenjangan pada sektor-sektor pembangunan seperti AKB, KEK, APS
I ₁₋₂	Peningkatan IPG, IDG, mendapat APE dari evaluasi penilaian oleh KemenPPPA
8. Peneliti : Berapa persentase anggaran responsif gender tahun 2015?	
I ₁₋₁	Ada di rekap
I ₁₋₂	Di arsip rekap
9. Peneliti : Berapa persentase anggaran responsif gender tahun 2016?	
I ₁₋₁	Belum di rekap
I ₁₋₂	Di arsip rekap
10. Peneliti : Apakah ada sanksi jika tidak melakukan analisis gender?	
I ₁₋₁	Sejauh ini belum ada
I ₁₋₂	Seharusnya bagi SKPD yang tidak membuat dokumen PPRG saat RKA, dipulangkan untuk selanjutnya membuat dokumen PPRG
I ₂₋₁	Belum ada
I ₂₋₂	Belum
I ₂₋₃	Belum ada, tidak membuat dokumen PPRG saat asistensi RKA tidak dipulangkan RKA kami karena dokumen PPRG memang tidak diminta
I ₂₋₄	Saya belum tahu kelanjutannya
I ₂₋₅	Tidak ada
I ₂₋₆	Sanksi belum ada
I ₂₋₇	Tidak ada

11. Peneliti : Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya anggaran responsif gender?	
I ₁₋₁	Komitmen pimpinan dan sumber daya manusia yang terlatih dalam PPRG
I ₁₋₂	Alhamdulillah pimpinan mendukung terbukti dari adanya Peraturan Gubernur untuk PPRG juga ada Surat Edaran dari Sekretaris Daerah untuk himbauan kepada SKPD agar merencanakan satu kegiatan responsif gender, dukungan data terpilah sebagian besar masih berasal dari BPS, kalau SDM yang menganalisis gender ada dukungan hanya saja masih kurang secara kuantitas karena kita hanya melatih satu dari tiap SKPD,
I ₂₋₁	Data yang lengkap, ada persetujuan dari atasan, intinya ada kesepakatan dengan pimpinan dengan saya
I ₂₋₂	Koordinasi dengan bidang-bidang teknis dalam penyediaan data
I ₂₋₃	Dukungan dari pimpinan, saya konsultasi dahulu dengan pimpinan saya di bidang PEP lalu setelah itu saya membuat analisis gendernya
I ₂₋₄	Aparatur yang benar-benar memahami
I ₂₋₅	Tidak tahu
I ₂₋₆	Kita belum melaksanakan
I ₂₋₇	Kebijakan yang tegas misal dari Bappeda supaya sebelum penganggaran membuat analisisnya
12. Peneliti : Bagaimana upaya yang dilakukan agar faktor yang mendukung tersebut dapat dimaksimalkan?	
I ₁₋₁	Selama ini kami mengandalkan kegiatan advokasi baik itu kepada pimpinan, perencana atau pun kepada pelaksana teknis. Advokasi ini bentuknya seperti rapat koordinasi atau pelatihan PPRG di setiap tahunnya. Ini ditujukan untuk memberikan pemahaman staf yang dikirim oleh perwakilan dari SKPD yang selalu berganti-ganti. Dengan dilatih, staf tersebut akan memiliki kapasitas untuk menganalisis gender di kegiatan SKPDnya masing-masing
I ₁₋₂	Anggaran kita untuk pelatihan ini hampir dicoret, waktu itu Bappeda berkomentar, mengapa selalu pelatihan setiap tahun. Lalu kita jelaskan alasannya namun Bappeda menolak untuk tetap mengadakan pelatihan tetapi kami upayakan cara dengan mengganti nama kegiatannya menjadi advokasi yang di dalamnya juga ada pelatihannya

I ₂₋₁	Hampir setiap rapat bulanan kita sampaikan kepada teman-teman di Dinas Sosial bahwa jangan menyepelekan masalah responsif gender karena itu memberi nilai poin juga untuk Gubernurnya dari Kementerian
I ₂₋₂	Pada saat rancangan anggaran, Kasubbag Program menyampaikan kepada bidang-bidang teknis yang ada di Disnakertrans Provinsi Banten bahwa program-program kita harus menyeluruh baik itu dari segi pengentasan pengangguran, kemiskinan maupun responsif gender.
I ₂₋₃	Pelatihan tetap diadakan setiap tahunnya lalu melakukan konsultasi dan komunikasi baik itu dengan pimpinan maupun bidang-bidang yang ada di Bina Marga
I ₂₋₄	Berbicara dengan pimpinan
I ₂₋₅	Banyak sharing dengan BPPMD
I ₂₋₆	Dengan mengusulkan saat Renja
I ₂₋₇	Banyak konsultasi dengan atasan
13. Peneliti : Apa saja faktor yang menghambat terlaksananya anggaran responsif gender?	
I ₁₋₁	Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis untuk menyusun rencana aksi dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender sedangkan tiap SKPD hanya memiliki satu orang yang telah dilatih dan itu pun biasanya yang mewakili tidak memberikan pemahaman PPRG pada semua aparatur melalui Kasubbag PEP SKPD
I ₁₋₂	Satu adalah pemahaman dari pemangku kepentingan yang ada di SKPD namun kami juga tidak menyalahkan meskipun telah ada sosialisasi tetapi belum tentu pemahamannya sampai kepada pemangku kepentingan, kedua adalah koordinasi yang intensif di antara driver atau tim penggerak PPRG, ketiga yaitu tadi masih kurangnya sumber daya manusia yang punya kapasitas dalam menganalisis gender pada kegiatan-kegiatan di SKPD.
I ₂₋₁	Tidak ada kendala
I ₂₋₂	Koordinasi dengan bidang-bidang teknis dalam ketersediaan data, dan kesibukan rutinitas pekerjaan
I ₂₋₃	Hambatannya pertama banyak yang belum paham maksudnya apalagi dengan kebinamargaan apa hubungannya dengan gender lalu yang kedua koordinasinya karena di sini bidangnya banyak

I ₂₋₄	Koordinasi yang kurang sinkron karena pimpinan menunjuk saya untuk mewakili kegiatan yang tidak saya pahami
I ₂₋₅	Masih kesulitan dalam memahami
I ₂₋₆	Belum ada ruang untuk membahas responsif gender dalam anggaran yang dialokasikan untuk Satpol PP
I ₂₋₇	Political will karena semua orang pasti sibuk jadi kalau ada kemauan maka pemahaman maupun data apapun akan diprioritaskan untuk masalah gender
14. Peneliti : Bagaimana upaya yang dilakukan agar hambatan dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dapat diminimalisasi?	
I ₁₋₁	Selama ini kami mengandalkan kegiatan advokasi baik itu kepada pimpinan, perencana atau pun kepada pelaksana teknis. Advokasi ini bentuknya seperti rapat koordinasi atau pelatihan PPRG di setiap tahunnya. Ini ditujukan untuk memberikan pemahaman staf yang dikirim oleh perwakilan dari SKPD yang selalu berganti-ganti. Dengan dilatih, staf tersebut akan memiliki kapasitas untuk menganalisis gender di kegiatan SKPDnya masing-masing
I ₁₋₂	Anggaran kita untuk pelatihan ini hampir dicoret, waktu itu Bappeda berkomentar, mengapa selalu pelatihan setiap tahun. Lalu kita jelaskan alasannya namun Bappeda menolak untuk tetap mengadakan pelatihan tetapi kami upayakan cara dengan mengganti nama kegiatannya menjadi advokasi yang di dalamnya juga ada pelatihannya
I ₂₋₁	Hampir setiap rapat bulanan kita sampaikan kepada teman-teman di Dinas Sosial bahwa jangan menyepelekan masalah responsif gender karena itu memberi nilai poin juga untuk Gubernurnya dari Kementerian
I ₂₋₂	Pada saat rancangan anggaran, Kasubbag Program menyampaikan kepada bidang-bidang teknis yang ada di Disnakertrans Provinsi Banten bahwa program-program kita harus menyeluruh baik itu dari segi pengentasan pengangguran, kemiskinan maupun responsif gender.
I ₂₋₃	Pelatihan tetap diadakan setiap tahunnya lalu melakukan konsultasi dan komunikasi baik itu dengan pimpinan maupun bidang-bidang yang ada di Bina Marga
I ₂₋₄	Berbicara dengan pimpinan
I ₂₋₅	Banyak sharing dengan BPPMD

I ₂₋₆	Dengan mengusulkan saat Renja
I ₂₋₇	Banyak konsultasi dengan atasan
15. Peneliti : Bagaimana keterlibatan legislatif dalam anggaran responsif gender tahun 2016?	
I ₁₋₂	Untuk PPRG, kami mencoba berkomunikasi dan mensosialisasikan apa itu PPRG, jadi masih dalam rangka meningkatkan pemahaman apa itu PPRG, kita belum ada keterlibatan yang secara langsung berkoordinasi untuk PPRG
I ₃₋₁	Kami para anggota DPRD perempuan sepakat dengan diwadahi yaitu melalui kaukus parlemen perempuan, tentunya kami meminta kepada pemerintah untuk mengutamakan persoalan-persoalan yang menyangkut perempuan terutama bagaimana pendidikan mencapai 20% dan memaksimalkan pelayanan kesehatan di tiap kecamatan tetapi kuota keterwakilan perempuan di parlemen masih 20% lebih dan belum mencapai 30% artinya perempuan masih belum memaksimalkan suaranya untuk menyelesaikan persoalan perempuan sehingga kesempatan di dalam proses pengambilan kebijakan pun menjadi semakin sedikit karena hanya sedikit anggota dewan perempuan yang berani berkompetisi untuk ikut membahas proses kebijakan yang menyangkut persoalan perempuan
I ₃₋₂	Keterlibatan saya dari Baperda Bagian legislasinya pada tahun 2016 itu saya menjadi Ketua Pansus tentang perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan yang sekarang sudah dibuat Peraturan Daerahnya, kita sudah mengatur di dalamnya bagaimana melindungi perempuan dan anak baik di tingkat private maupun publik jadi pemerintah memiliki kewajiban untuk membina organisasi-organisasi perempuan yang ada di Provinsi Banten agar bisa ikut memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang responsif gender
16. Peneliti : Bagaimana keterlibatan jejaring masyarakat dalam anggaran responsif gender tahun 2016?	
I ₁₋₂	Ada Pattiرو Provinsi Banten yang fokusnya PPRG sering terlibat ketika kita mengadakan peningkatan pemahaman PPRG untuk aparatur
I ₄₋₁	Tahun 2016 Pattiرو Banten tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan anggaran responsif gender. Pada Tahun 2015, Pattiرو Banten pernah dilibatkan dalam melakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Provinsi Banten dalam menyusun analisis anggaran responsif gender melalui Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), yang dijembatani oleh Kementerian Pemberdayaan

	Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) karena pada saat itu belum ada penerapan ARG yang sesuai petunjuk pelaksanaan dari KPPPA. Selama 2015-2016, ini Pattiro Banten sedang melakukan assesment terhadap tim driver PPRG dalam menyusun GAP GBS dan mencoba mengadvokasi proses perencanaan ARG di Provinsi Banten
17.Peneliti : Apa saja antisipasi yang dilakukan agar anggaran responsif gender dapat terlaksana dengan baik?	
I ₁₋₁	Melakukan advokasi secara rutin setiap tahunnya kepada pimpinan, perencana atau pelaksana teknis, untuk tahun ini bentuknya Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender
I ₁₋₂	Mengupayakan adanya pelatihan PPRG meskipun anggarannya hampir dicoret oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
18.Peneliti : Apa tindak lanjut dari pegawai setelah mendapat pelatihan?	
I ₁₋₁	Memberikan pemahaman PPRG kepada semua aparatur melalui Kasubbag PEP SKPD
I ₁₋₂	Hasil pelatihan supaya dibagikan ke teman-teman yang ada di SKPD masing-masing
I ₂₋₁	Kita bicarakan dengan atasan kita dan kita koordinasikan dengan bidang
I ₂₋₂	Saya bicarakan dengan pimpinan program lalu Kasubbag Program menyampaikan ke kepala bidang-bidang teknis agar paham bahwa gender itu bukan hanya untuk perempuan karena bidang teknis masih banyak yang belum paham kegiatan mana saja yang termasuk responsif gender
I ₂₋₃	Berbagi hasil pelatihan dengan teman-temnn saja, belum kemana-mana, jadi bentuknya informal seperti cerita saja, belum ada formal seperti workshop, pelatihan, karena yang dilatih pun belum paham kalau disuruh menjelaskan begitu
I ₂₋₄	Kita membawa hasil kegiatan yang didapat dari BPPMD ke bagian umum dan sekarang kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya
I ₂₋₅	Lapor ke bagian umum dan cerita ke teman-teman di bagian umum
I ₂₋₆	Sebagai pelaksana saya memberi masukan kepada pimpinan
I ₂₋₇	Saya konsultasikan ke atasan

19. Peneliti : Bagaimana tanggapan pimpinan SKPD atas perencanaan Anggaran responsif gender di tahun 2016?	
I ₁₋₁	Pimpinan berkomitmen untuk melaksanakan PPRG tetapi komitmen merupakan pengakuan yang tercermin pada tindakan dan saat ini komitmen mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan
I ₁₋₂	Pasti mendukung tetapi feedback yang diberikan dalam bentuk GAP GBSnya cukup lama
I ₂₋₁	Bukannya tidak menanggapi tetapi mungkin cukup tau dan silahkan saja laksanakan sesuai tupoksi (Tugas, Pokok dan Fungsi), serta yang terpenting atasan mendukung karena ada tembusan juga dari BPPMD bahwa Provinsi Banten harus mendapat APE (Anugrah Parahita Ekapraya)
I ₂₋₂	Pimpinan setuju karena banyak sekali anggaran program dan kegiatan yang berhubungan dengan gender seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengawasan tenaga kerja dan kegiatan penempatan kerja di dalam dan luar negeri
I ₂₋₃	Setelah saya kerjakan sendiri analisisnya baru saya konsultasikan ke pimpinan dan beliau setuju saja
I ₂₋₄	Saya tidak lapor ke atasan, hanya ke bagian umum saja jadi tidak tahu bagaimana tanggapannya
I ₂₋₅	Belum ada arahan ke gender, kita fokusnya ke ketahanan pangan saja karena gender mengarah kepada kewenangan BPPMD
I ₂₋₆	Pimpinan belum mengakomodir isu gender karena belum menjadi prioritas di Satpol PP dan masih berpikir kegiatan mana yang ada di Satpol PP yang termasuk responsif gender
I ₂₋₇	Memberi arahan kegiatan apa yang dijadikan responsif gender

**Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Banten
(Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 per tanggal 23 November 2016)**

Kode Infor-man	Nama Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah
I ₁₋₂	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
I ₂₋₃	Dinas Bina Marga dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
I ₂₋₄	Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
I ₂₋₅	Badan Ketahanan Pangan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan
I ₂₋₇	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pariwisata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 530 /UN.43.6.1/PG/2016

22 Maret 2016

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Bappeda Provinsi Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012

Semester : VIII

Mata Kuliah: Skripsi


Judul : Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam APBD Provinsi Banten

Data : Data perencanaan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten
diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 1267 /UN.43.6.1/PG/2016

20 Mei 2016

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012

Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam APBD Provinsi Banten
Data diperlukan : 1) Wawancara tentang perencanaan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten Tahun 2016
2) Data yang berkaitan dengan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listvaningsih, S.Sos. M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 1267/UN.43.6.1/PG/2016

20 Mei 2016

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012

Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam APBD Provinsi Banten
Data diperlukan : 1) Wawancara tentang perencanaan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten Tahun 2016
2) Data yang berkaitan dengan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listyaningsih, S.Sos. M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 2022/UN.43.6.1/PG/2016

20 Mei 2016

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012

Semester : VIII

Mata Kuliah : Skripsi

Judul : Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam APBD Provinsi Banten

Data diperlukan : 1) Wawancara tentang perencanaan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten Tahun 2016

2) Data yang berkaitan dengan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 1267/UN.43.6.1/PG/2016

20 Mei 2016

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012

Semester : VIII
Mata Kuliah: Skripsi
Judul : Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam APBD Provinsi Banten
Data : 1) Wawancara tentang perencanaan Anggaran Responsif Gender di
diperlukan Provinsi Banten Tahun 2016
2) Data yang berkaitan dengan Anggaran Responsif Gender di
Provinsi Banten

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listvaningsih, S.Sos. M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 2050 /UN.43.6.1/PG/2016

20 Mei 2016

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012

Semester : VIII
Mata Kuliah: Skripsi
Judul : Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam APBD Provinsi Banten
Data : 1) Wawancara tentang perencanaan Anggaran Responsif Gender di
diperlukan Provinsi Banten Tahun 2016
2) Data yang berkaitan dengan Anggaran Responsif Gender di
Provinsi Banten

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listvaningsih, S.Sos. M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 1267 /UN.43.6.1/PG/2016

20 Mei 2016

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,


Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012

Semester : VIII
Mata Kuliah: Skripsi
Judul : Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam APBD Provinsi Banten
Data diperlukan : 1) Wawancara tentang perencanaan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten Tahun 2016
2) Data yang berkaitan dengan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Listvaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : (267) /UN.43.6.1/PG/2016

20 Mei 2016

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Satpol PP Provinsi Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012

Semester : VIII
Mata Kuliah: Skripsi
Judul : Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam APBD Provinsi Banten
Data diperlukan : 1) Wawancara tentang perencanaan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten Tahun 2016
2) Data yang berkaitan dengan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listvaningsih, S.Sos. M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 1267 /UN.43.6.1/PG/2016

20 Mei 2016

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012

Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam APBD Provinsi Banten
Data diperlukan : 1) Wawancara tentang perencanaan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten Tahun 2016
2) Data yang berkaitan dengan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 3033 /UN.43.6.1/PG/2017

20 April 2017

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Ibu Encop Sofia, MA (Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya)
DPRD Provinsi Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012

Semester : IX

Mata Kuliah: Skripsi


Judul : Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam APBD Provinsi Banten Tahun 2016

Data : Wawancara tentang Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam diperlukan APBD Provinsi Banten Tahun 2016

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 2299 /UN.43.6.1/PG/2017
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

14 Februari 2017

Kepada Yth.
Kepala Ketua Kaukus Parlemen Perempuan Provinsi Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,


Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012

Semester : VIII
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam APBD Provinsi Banten Tahun 2016
Data diperlukan : 1) Wawancara tentang perencanaan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten Tahun 2016
2) Data yang berkaitan dengan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM:4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 3033 /UN.43.6.1/PG/2017

20 April 2017

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional Provinsi Banten
(Pattiro Provinsi Banten)
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
NIM : 6661121012

Semester : IX

Mata Kuliah: Skripsi

Judul : Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam APBD Provinsi Banten Tahun 2016

Data : Wawancara tentang Perencanaan Anggaran Responsif Gender dalam diperlukan . APBD Provinsi Banten Tahun 2016

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 197603292003122001



**Wawancara dengan Staf Pelaksana Bidang Sosial Kemasyarakatan
Bappeda Provinsi Banten**



**Wawancara dengan Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten**



Wawancara dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup BPPMD Provinsi Banten



Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial Provinsi Banten



Wawancara dengan Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten



Wawancara dengan Staf Pelaksana Bidang Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten



**Wawancara dengan Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Satpol PP Provinsi Banten**



**Wawancara dengan Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten**



Wawancara dengan Anggota Dewan Fraksi Gerindra di DPRD
Provinsi Banten



Wawancara dengan Ketua Kaukus Parlemen Perempuan di DPRD
Provinsi Banten



Wawancara dengan Anggota LSM Pattiro Provinsi Banten



Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Banten Tahun 2016



Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Banten Tahun 2016



Kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi Banten Tahun 2016



Kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi Banten Tahun 2016



Kegiatan Bimbingan Teknis Fasilitator Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi Banten Tahun 2016

CATATAN BIMBINGAN

Pembimbing I

Ibu Ipah Irma Juniati

Pembimbing II

Ibu Yeni Widayastuti

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
1.	21-03-2016	Ganti lokus penelitian	J
2.	05-06-2016	(1) Tambahkan Tahun Anggaran Pd judul (2) Singkatan boleh digunakan jika sebelumnya singkatan tersebut diperjelas (3) perbaiki penulisan tabel informasi penelitian (4) Buat pedoman wawancara per kategori informasi dan ditetaskan di lampiran (5) Sumber teknik analisis data belum tercantum (6) tambahkan daftar pustaka	J
3.	24-06-2016	→ Kurang Penjabaran di Latar belakang masalah	J
4.	28-07-2016	perbaiki bab 2 Tambahkan data sekunder	J
5.	16/9-2016	Ace Bab 1 s/d 3 Seminar proposal ke pembimbing 2	J

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tatap muka).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
3.	14/11-2016	- Perbaiki sedikit penjabaran data di LBRN. - BAB II dia, edh sesuai pedoman - BAB III msh ada number pustaka sebelum tahun 2000 mhu dicari yg terbaru	J
4.	25/11-2016	- Persiapkan lembar pengesahan dan lampiran 2 Seminar proposal - Ace Seminar Proposal	J

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tatap muka).

Pembimbing II = Ibu Yeni Widayastuti

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
1.	12-05-2016	(1) Penulisan di cover (2) konfirmasi perurusan bahan (3) tambahkan mekanisme perencanaan (4) Perbaiki pengutipan nama Penulis (5) Pegawai SKPD yang diajak pelatihan harusnya jadi informan (6) perbaiki penulisan pada tabel, jangan terpotong (7) tambahkan daftar pustaka	
2.	23/09-2016	.. LRM msh kurang data .. Penjelasan istilah terkait tema penelitian msh kurang .. Data wawancara dipisahkan (kpn, dmn?) .. Alasan pemilihan teori? .. Kerangka BAB 3 sesuai draft	

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tatap muka).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	4/17	ACC Lapangan 4/ EAB IV SV	
	27/12-17	Acc lapangan	
	7/3-17	Acc lapangan	
	29/05-17	Perbaiki: Reduksi data Perbaiki: Triangulasi	
	14/06-17	Perbaiki penulisan hasil wawancara - perbaiki analisis hasil wawancara	
	07/08-17	perbaiki kerangka & BAB Tambahkan hasil dan pembahasan disertai analisis	

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tatap muka).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	8/8-2017	Tambah GBS pd Hasil	8
	15/8-2017	Absorpsi masuk SARAN - Analisis tabel tambah - perbaiki kesiguan - Daftar pustaka masuk 1.	8
	18/8-2017	perbaiki absorpsi dan daftar pustaka	8
	22/8-2017	LENGKAP LAMPIRAN 2.	8

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tatap muka).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
	20/11	Koreksi pembahasan, masalah teman topayan	8
	21/11	.. Koreksi ABSTRAK	8
	22/11	Ace Givung Pemb. II	8
	12/12	Ace - Sany Pemb. I	8

Catatan: Jumlah tatap muka mahasiswa dengan masing-masing pembimbing minimal 7 kali (total dengan 2 pembimbing sebanyak 14 kali tatap muka).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI



Nama	: Mirza Hafidzati Syarofah Adlina
Tempat, Tanggal Lahir	: Serang, 23 Januari 1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Kepodang 21-A Kavling Blok F RT/RW 002/007 Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten Kode pos : 42415
Alamat E-mail	: mirzaadlina@gmail.com
Nomor Handphone	: +6287877681707
Pendidikan Formal	
2000-2006	: SD YPWKS 5 Cilegon
2006-2009	: SMP Negeri 2 Cilegon
2009-2012	: SMA Negeri 1 Cilegon
2012-2017	: S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

